



EXTENDED ABSTRACT

FORUM ON EDUCATION AND LEARNING TRANSFORMATION





FELT
2023

FORUM ON EDUCATION
LEARNING TRANSFORMATION
INDONESIA

EXTENDED ABSTRACT

FORUM ON EDUCATION AND
LEARNING TRANSFORMATION

7-28 November 2023 | Sheraton Grand

<http://www.kemdikbud.go.id>

oud

article33.id/id



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
2024

Judul

Extended Abstract:

Forum on Education and Learning Transformation

Penyunting:

Muhammad Ciro Danuza

Risni Anggi Hasianta Silalahi

Lukman Solihin

Sisca Fujianita

Asma Aisha

Fadhilah Darma

Desain Tata Letak:

Muhammad Ghaniy Candra Mahendra

Fotografer:

Ibar Warsita

Galih Satriyo Utomo

Penerbit:

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dikeluarkan oleh:

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Kompleks Kemendikbudristek, Gedung E Lantai 19

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270

Telp. +6221-5736365 | Faks. +6221-5741664

Website: <https://pskp.kemdikbud.go.id/>

Email: pskp.kemdikbudristek@gmail.com

Hak cipta dilindungi. Semua isi buku ini dilarang diproduksi ulang, disimpan dalam *retrieval system*, atau dikirimkan dalam bentuk atau alat apapun, elektronik, mekanis, fotokopi, rekaman, atau yang lain tanpa izin terlebih dahulu dari Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemdikbudristek.

© 2024 Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemdikbudristek

ISBN: 978-623-504-117-9 (PDF)

Terbitan Maret 2024

Cetak di Indonesia

Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
AKSES PENDIDIKAN	1
Tipologi Akses Pendidikan: Kondisi dan Penyediaan Daya Tampung SMP/MTs di Indonesia	2
<i>Educational Attainment and Labor Market Outcome for Disabilities: An Empirical Study from Indonesia</i>	8
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK	13
Studi Empiris Pendidikan di Indonesia: Apa yang Membuat Sekolah Baik?	14
Pengembangan Holistik Kualitas Pendidikan melalui Program Sekolah Penggerak (PSP) di Satuan PAUD	20
Problematisasi Kepemimpinan Kepala Sekolah Negeri dan Swasta dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui Program Sekolah Penggerak	24
<i>Digugu lan ditiru: Normalisasi Perilaku Guru untuk Terbuka terhadap Perubahan</i>	30
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA	35
Tantangan Penerapan Kurikulum Merdeka: Karakteristik Guru dalam Beradaptasi dengan Kurikulum Baru	36
Upaya Meningkatkan <i>Self Management</i> dalam Belajar Berdasarkan Layanan Bimbingan Kelompok Berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Atas	41
Model-Model Pembelajaran Kurikulum Merdeka yang Mengakomodir Keragaman Karakteristik Peserta Didik	46

INOVASI

PEMBELAJARAN

51

Pembelajaran Berbasis Tugas dan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi: Studi pada Kelas Desain Pembelajaran

52

Peningkatan Keterampilan Berbicara dan HOTS Siswa pada Pembelajaran Bahasa Inggris di Sekolah 3T melalui Permainan Papan Ludo

56

Menjadi Guru yang Efektif dengan *Teaching Mastery Framework* (TMF): Kerangka Peningkatan Kualitas Pengajaran

60

Keterlibatan Siswa dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Sekolah: Studi Kasus Sekolah Lukman Al-Hakim, Mataram

64

PASCASEKOLAH

69

Efektivitas Program BOLD oleh Komunitas Kepemudaan Bidang Pendidikan dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Studi Lanjut

70

Pandemi dan Aspirasi Profesional: Pengaruh Demografi terhadap Pilihan Karier Siswa Sekolah Menengah Atas

75

Pencapaian Tujuan Kemandirian Pasca-Sekolah Remaja Tunanetra-Ganda: Tantangan Kolaborasi Guru dan Orang Tua pada Masa Transisi

81



Kata Pengantar

Sejak beberapa tahun belakangan, fokus kebijakan pendidikan Indonesia telah bergeser dari peningkatan akses pada pemerataan kualitas. Sebuah sistem pendidikan perlu memastikan bahwa anak-anak pergi ke sekolah dengan penuh semangat, belajar dengan gembira, dan lulus membawa bekal kompetensi yang relevan dengan zaman yang terus berubah. Upaya ini memerlukan transformasi secara menyeluruh pada berbagai komponen sistem pendidikan. Sistem pendidikan perlu memiliki mekanisme yang menjamin kesempatan yang setara dalam memperoleh akses pendidikan, memperkuat kapasitas profesional kepala sekolah dan guru, mengenalkan kurikulum yang mendukung pembelajaran yang adaptif dan kontekstual, mempromosikan sistem asesmen dan penjaminan mutu yang kredibel, hingga mendorong partisipasi seluruh ekosistem pendidikan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas.

Pada bulan November 2023, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) bekerja sama dengan lembaga riset Article 33 Indonesia menyelenggarakan *Forum on Education and Learning Transformation* (FELT) yang pertama. Forum ini menjadi wadah bagi para peneliti dan akademisi untuk berbagi dan berdiskusi tentang hasil-hasil penelitian mereka mengenai transformasi pendidikan di Indonesia. Dari 127 proposal abstrak yang masuk, telah diseleksi 18 naskah yang dipresentasikan. Hasil-hasil penelitian yang didiskusikan mencakup topik yang cukup beragam dalam diskursus transformasi pendidikan, baik yang secara spesifik terkait dengan inisiatif Merdeka Belajar maupun tema lain yang lebih umum.

Dokumen ini adalah kompilasi dari ringkasan naskah yang dipresentasikan oleh para pemakalah dan telah dikelompokkan ke dalam enam subtema, yaitu: Akses Pendidikan, Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Inovasi Pembelajaran, Partisipasi Warga Sekolah, dan Pascasekolah. Dokumen hasil-hasil penelitian ini merupakan materi yang berharga untuk memperkaya wacana transformasi pendidikan secara akademik di satu sisi dan memberi dukungan bukti bagi penguatan kebijakan pendidikan secara praktis di sisi yang lain. Mengingat dinamika dan luaran yang dihasilkan, FELT dapat menjadi sarana lain bagi Kemendikbudristek dalam membangun kemitraan strategis dengan para peneliti pendidikan untuk memastikan agar transformasi pendidikan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para peneliti yang telah membagi pemikiran dan hasil penelitian mereka melalui forum ini, juga kepada kolega kami dari Article 33 Indonesia atas kerja sama yang sangat bermakna, sehingga FELT 2023 dapat terselenggara dengan baik.

Sampai jumpa di FELT 2024!

Jakarta, Maret 2024

Plt. Kepala PSKP

Irsyad Zamjani

Pendidikan yang merata dan berkualitas adalah pilar utama bagi masyarakat yang majud dan inklusif. Dengan tema “Transformasi untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan,” pada 27–28 November 2023 telah diselenggarakan Forum on Education and Learning Transformation (FELT) pertama kali yang merupakan kerjasama antara Article 33 Indonesia dengan PSKP, Kemdikbudristek. Forum yang menjadi wadah bagi para peneliti pendidikan untuk mengirimkan dan mempresentasikan hasil penelitiannya ini diikuti oleh 18 peserta dari berbagai kalangan dari seluruh Indonesia. Sebagai salah satu hasil dari forum ini, kami menyajikan kompilasi paper yang lolos dalam kegiatan ini.

Judul paper yang disajikan dalam kompilasi ini cukup beragam. Mulai dari hal terkait akses layanan pendidikan, pembelajaran, partisipasi warga sekolah, keberlanjutan ke perguruan tinggi, dan program prioritas Kemdikbudristek seperti program sekolah penggerak dan kurikulum merdeka. Keragaman tema ini menunjukkan rentang ketertarikan pada tema penting dalam isu-isu yang mendukung transformasi pendidikan.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua peserta forum yang telah berbagi wawasan, pemikiran, dan semangat sehingga acara berlangsung dengan sangat dinamis dan bermakna. Terimakasih juga kami ucapkan pada PSKP yang telah mendukung sepenuhnya acara ini dan tim Article 33 Indonesia yang telah mengelola acara ini sehingga dapat terselenggara dengan baik dan lancar.

Semoga kompilasi ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga dapat mendorong penelitian-penelitian pendidikan yang lebih banyak dan berkualitas di kemudian hari. Jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan, ikuti kegiatan FELT tahun 2024! Terimakasih.

Jakarta, Maret 2024

Direktur Eksekutif Article 33 Indonesia

Santoso



FELT
2023

FORUM ON EDUCATION
LEARNING TRANSFORMATION
INDONESIA

EXTENDED ABSTRACT

FORUM ON EDUCATION AND
LEARNING TRANSFORMATION

7-28 November 2023 | Sheraton Grand

<http://www.pendidikan.go.id>

oud

article33.id/id/id





**AKSES
PENDIDIKAN**

Tipologi Akses Pendidikan: Kondisi dan Penyediaan Daya Tampung SMP/MTs di Indonesia

Stephen Pratama^{*1}, Muhamad Nur Chozin², dan Pandu Ario Bismo³

^{1,2,3} Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan

(E-mail: stephen@pspk.id, chozin@pspk.id, pandu@pspk.id)

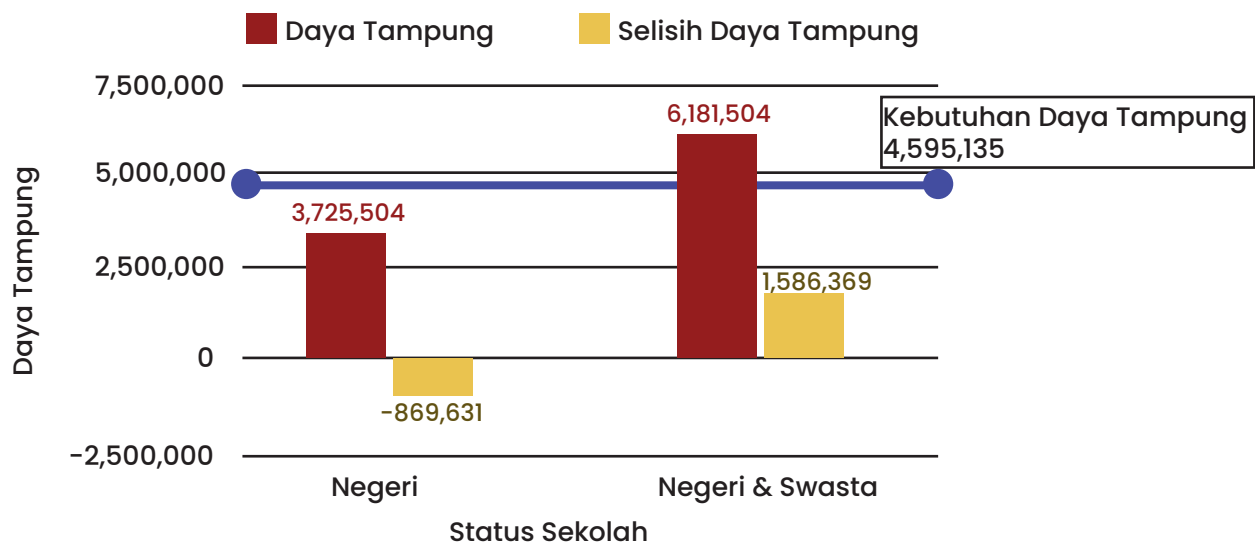
Kata kunci: akses pendidikan; hak sosial; pasar dan komoditas; wajib belajar; kemiskinan

EXTENDED ABSTRACT

Meskipun kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun telah berlangsung selama hampir 30 tahun, akses pendidikan di Indonesia masih belum bersifat universal. Ketersediaan sekolah juga menjadi salah satu isu di Indonesia saat berbicara mengenai akses pendidikan (Suharti, 2013). Hal ini akan menuntun kita pada pertanyaan terkait apa dan siapa yang mengondisikan keterbatasan akses pendidikan. Studi terdahulu sering kali berfokus pada perdebatan penyediaan akses pendidikan secara dikotomis, yakni antara peran pemerintah atau swasta (UNESCO, 2021). Kajian ini berupaya keluar dari pandangan dikotomis tersebut dengan menunjukkan bukti bahwa implementasi Program Wajib Belajar di setiap daerah bervariasi.

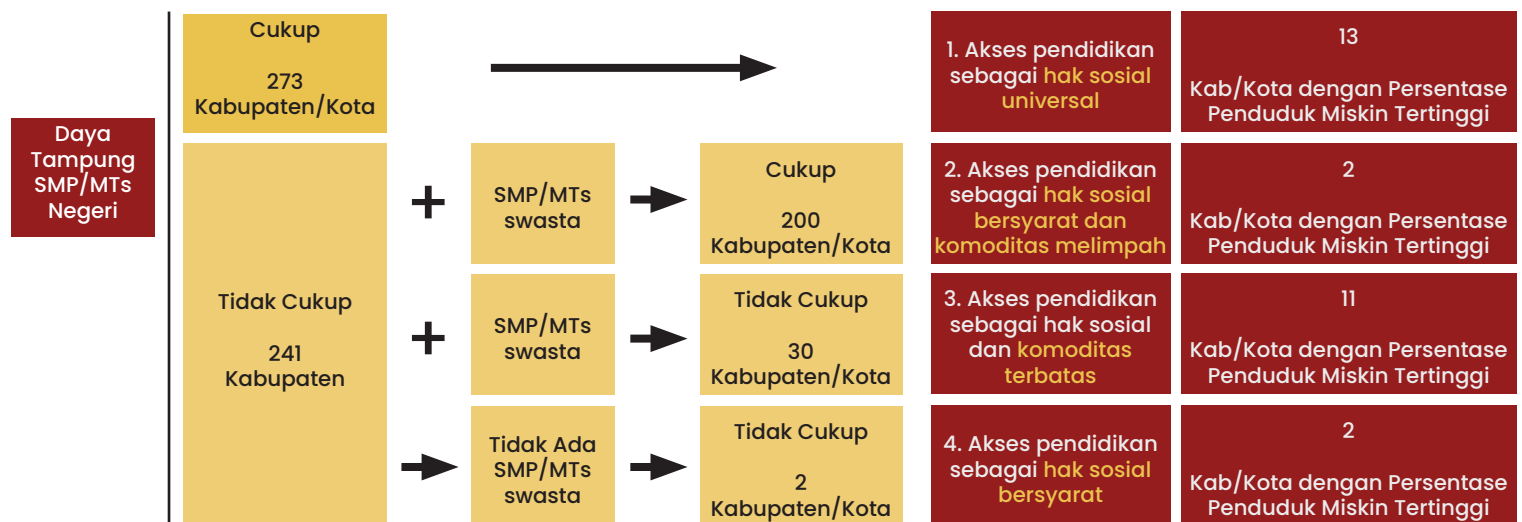
Meskipun secara regulasi akses pendidikan jenjang SMP/MTs merupakan hak sosial semua warga negara Indonesia, pemerintah pusat maupun daerah sering kali dianggap memiliki keterbatasan dalam menyediakan akses pendidikan dasar yang universal (tanpa biaya) melalui SMP/MTs negeri. Dalam situasi ini, sektor swasta hadir untuk menampung sebagian peserta didik (Stern & Smith, 2016; Suharti, 2013). Sektor swasta bisa menjadikan akses pendidikan sebagai komoditas. Implikasinya, kebutuhan pendidikan sebagian anak-anak Indonesia hanya dapat terpenuhi lewat mekanisme pasar. Walau demikian, mengingat kondisi akses dapat berbeda antardaerah, diperlukan pemetaan terhadap variasi-variasi yang ada untuk melandasi rekomendasi kebijakan yang asimetris.

Pada tataran teoretis, kajian ini bermaksud mengembangkan model konseptual yang dapat menggambarkan variasi peran pemerintah dan swasta dalam kaitannya dengan akses pendidikan tersebut. Sedangkan pada tataran empiris, kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran konkret secara kontekstual sebagai dasar rekomendasi kebijakan asimetris dalam penyediaan akses pendidikan di Indonesia. Dengan bantuan konsep pasar dan hak sosial warga negara, kajian ini melakukan analisis deskriptif kuantitatif terhadap berbagai sumber data sekunder guna memetakan akses pendidikan jenjang SMP/MTs di 514 kabupaten/kota. Kajian ini berfokus pada jenjang SMP karena jenjang SMP termasuk dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Serta, ketika dibandingkan dengan kondisi akses pada jenjang SD, jenjang SMP memiliki permasalahan yang lebih kompleks. Data kajian bersifat data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, meliputi BPS dan Dapomart Kemendikbudristek.



Gambar 1 Kondisi Daya Tampung SMP/MTs di Indonesia
Sumber: Olahan Tim Penulis Berdasarkan Dapomart Kemendikbudristek, 2023

Berdasarkan status ketersediaan daya tampung pada tahun 2023, di Indonesia terdapat sebanyak 4.595.135 bangku yang diperlukan untuk menampung seluruh lulusan SD/MI. Jika dilihat dari ketersediaan daya tampung SMP/MTs negeri dan swasta, keseluruhan daya tampung telah memenuhi kebutuhan daya tampung bahkan terdapat kelebihan daya tampung sebesar 1.586.369. Namun, jika dibatasi pada status SMP/MTs negeri saja, daya tampung SMP/MTs masih mengalami kekurangan sebanyak 869.631 bangku. Meskipun secara nasional daya tampung (negeri dan swasta) telah terpenuhi, hal ini tidak berlaku secara konsisten di level daerah. Terjadi variasi akses pendidikan di level daerah, seperti halnya yang terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Kondisi Sifat Daya Tampung di 514 Kabupaten/Kota
Sumber: Olahan tim penulis berdasarkan Dapomart Kemendikbudristek, 2023

Temuan kajian ini menunjukkan adanya variasi akses pendidikan yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi daya tampung dan perbedaan kontribusi oleh swasta maupun pemerintah dalam menyediakan akses layanan pendidikan. Mayoritas kabupaten/kota telah memiliki akses pendidikan sebagai hak sosial yang universal karena mempunyai SMP/MTs negeri yang mampu menampung seluruh lulusan SD/MI di daerah tersebut. Sedangkan, di sejumlah kabupaten/kota lainnya akses pendidikan masih menjadi hak sosial bersyarat, komoditas melimpah, komoditas terbatas, atau kombinasi. Adapun persebarannya dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Peta Diferensiasi Sifat Akses Pendidikan Jenjang SMP/MTs di Indonesia

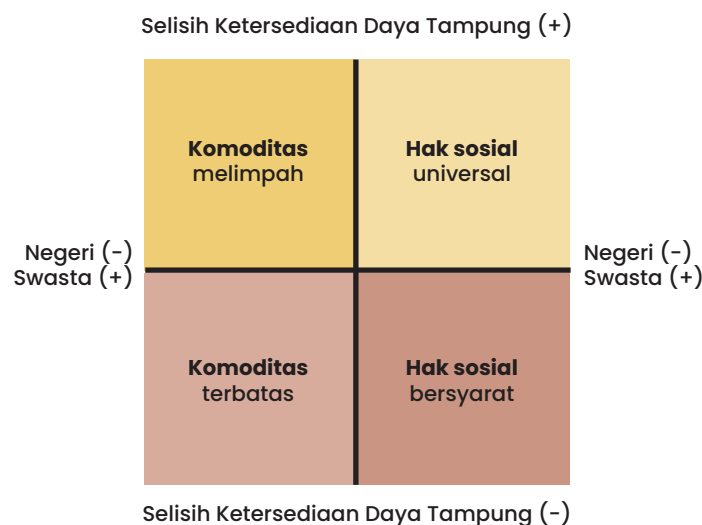
Berdasarkan Gambar 3 dapat diketahui bahwa kekurangan daya tampung terjadi secara tersebar. Pulau Jawa sebagai daerah pusat kemajuan pembangunan (Seda, 2014) juga mengalami keterbatasan dalam pemenuhan akses pendidikan sebagai hak sosial universal. Pada kondisi akses pendidikan sebagai hak sosial bersyarat, karena jumlah daya tampung sekolah negeri terbatas maka memungkinkan dapat terjadi kompetisi antarpeserta didik baik didasari pada capaian akademis (meritokrasi) dan/atau kemampuan finansial (Zamjani, 2021).

Berbicara mengenai akses pendidikan sebagai hak sosial akan mengembalikan diskusi tentang fungsi dari hak sosial itu sendiri. Secara historis, konsep sosiologis ini dibangun oleh T.H. Marshall berdasarkan kondisi empiris masyarakat Barat, di mana hak sosial hadir untuk mengatasi ketimpangan kualitas hidup antarstrata sosial. Walau begitu, konsep ini juga dapat diaplikasikan dalam konteks kebijakan di Indonesia dalam rangka memberikan akses layanan publik (misalnya, pendidikan) kepada warga negara, termasuk kelompok miskin, untuk menipiskan kesenjangan kualitas hidup antara kelompok miskin dengan yang lebih sejahtera. Penyediaan akses pendidikan bagi kelompok miskin di Indonesia sendiri belum maksimal. Jika melihat kondisi di 5% (28) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin tertinggi, 11 di antaranya memiliki SMP/MTs negeri dan swasta yang tidak bisa menampung semua lulusan SD/MI. Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Lanny Jaya, Mamberamo

Tengah, Paniai, Pegunungan Bintan, Puncak Jaya, Yahukimo, dan Manokwari Selatan. Kemudian, terdapat dua kabupaten yang hanya memiliki SMP negeri dan kekurangan daya tampung, yaitu Kabupaten Puncak Jaya dan Pegunungan Arfak.

Kurangnya daya tampung SMP/MTs negeri dapat menyebabkan akses pendidikan yang terjangkau menjadi terbatas, terutama bagi kelompok miskin yang memerlukannya sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan taraf kehidupan di masa depan (Pattinasarany, 2016). Merujuk pada tata aturan yang berlaku, akses pendidikan hingga ke jenjang SMP/MTs merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karenanya, perluasan hak sosial menjadi perlu dilakukan, misalnya dengan cara menambah sekolah dan madrasah yang dibiayai pemerintah dan pemerintah daerah.

Kondisi empiris tersebut kemudian menjadi dasar untuk mengembangkan suatu tipologi akses pendidikan. Hasil pemetaan akses dikategorisasi ulang sehingga menjadi tipologi yang lebih umum dan dapat digunakan sebagai perangkat epistemologis dalam kajian-kajian selanjutnya. Tipologi ini memungkinkan untuk digunakan pada kajian yang mungkin saja memiliki unit analisis selain kabupaten/kota, misal di kecamatan atau bahkan di tingkat wilayah administratif lain. Ilustrasi tipologi akses pendidikan yang lebih umum tersebut terlihat dari Gambar 4.



Gambar 4 Tipologi Akses Pendidikan

Secara konseptual, bangunan tipologi ini memanfaatkan konsep pasar (Aspers, 2011) dan hak sosial warga negara (Marshall & Bottomore, 1992; Esping-Andersen, 1990). Selain konseptual, tipologi ini menggunakan seperangkat landasan empiris meliputi [1] selisih ketersediaan daya tampung (selisih antara lulusan SD/MI dengan daya tampung SMP/MTs) di tingkat kabupaten/kota dan [2] status penyelenggara pendidikan (swasta atau negeri) yang menyediakan daya tampung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Asumsi mendasar tipologi ini adalah bahwa sifat akses pendidikan sebagai hak atau komoditas beserta dengan gradasinya tidak lepas dari interaksi antara aspek demografis (jumlah peserta didik usia sekolah), ketersediaan bangku, pihak yang menyelenggarakan pendidikan, dan aspek legal (tata aturan terkait pendidikan).

Keempat aspek tersebut tidaklah konstan sepanjang waktu. Misal, sebuah kabupaten yang kekurangan daya tampung tahun ini bisa jadi mengalami kelebihan jumlah bangku di tahun mendatang apabila terdapat perubahan jumlah lulusan. Perlu menjadi catatan bahwa landasan empiris dari tipologi ini memiliki beberapa keterbatasan, misalnya tidak menyertakan variabel kualitas satuan pendidikan, tidak melihat sebaran sekolah dan madrasah dalam sebuah kabupaten/kota, tidak melihat kemungkinan sekolah atau madrasah swasta tanpa biaya, dan lain-lain.

Penting untuk diketahui bahwa proporsi dari setiap kategori akses pendidikan ini bisa berubah kalau diaplikasikan pada tingkat administrasi atau zona yang berbeda. Misalnya, di level kecamatan bisa jadi ketersediaan SMP/MTs negeri terkonsentrasi di kecamatan tertentu saja sehingga jumlah kecamatan dengan akses pendidikan yang universal pun menjadi rendah. Kajian selanjutnya diharapkan dapat melakukan telaah di level administrasi yang lain, utamanya untuk melihat pemerataan akses pendidikan sebagai hak sosial. Dengan demikian, tipologi umum akses pendidikan ini dapat menjadi lebih baik.

Pada akhirnya, implikasi temuan empiris dan teoretis terkait variasi akses pendidikan tersebut menuntut adanya kebijakan asimetris sehingga upaya pemenuhan akses pendidikan dapat dilakukan secara kontekstual. Berdasarkan kategori akses pendidikan hasil dari temuan kajian ini, rekomendasi alternatif kebijakan yang dapat dijalankan adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Kondisi Akses Pendidikan SMP/MTs di Indonesia

Kategori	Kondisi	Fokus Intervensi	Implikasi Pendanaan
Akses Pendidikan Sebagai Hak Sosial Universal	SMP/MTs negeri mampu menampung semua lulusan SD/MI.	Peningkatan kualitas	APBD
Akses Pendidikan Sebagai Hak Sosial Bersyarat dan Komoditas Melimpah	SMP/MTs negeri hanya dapat menampung sebagian lulusan SD/MI. Sebagian sisanya dapat tertampung di SMP/MTs swasta karena memiliki daya tampung berlebih.	Pelibatan institusi pendidikan swasta pada PPDB.	APBD
Akses Pendidikan Sebagai Hak Sosial Bersyarat dan Komoditas Terbatas	SMP/MTs negeri dan swasta hanya dapat menampung sebagian lulusan SD/MI.	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan daya tampung di sekolah negeri. • Pendirian unit sekolah negeri baru. 	<ul style="list-style-type: none"> • DAU • DAK Fisik Pendidikan • Bantuan Pemerintah

Kategori	Kondisi	Fokus Intervensi	Implikasi Pendanaan
Akses Pendidikan Sebagai Hak Sosial Bersyarat	SMP/MTs negeri hanya dapat menampung sebagian lulusan SD/MI. Tidak tersedia SMP/MTs swasta untuk menampung sisanya.	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan daya tampung di sekolah negeri. • Pendirian unit sekolah negeri baru. 	<ul style="list-style-type: none"> • DAU • DAK Fisik Pendidikan • Bantuan Pemerintah

Terdapat tiga rekomendasi utama dalam upaya memenuhi kebutuhan daya tampung, yaitu: 1) pendirian unit sekolah negeri baru, 2) penambahan daya tampung di sekolah negeri, dan 3) pelibatan institusi pendidikan swasta. Rekomendasi kebijakan tersebut bersifat asimetris. Maksudnya, intervensi yang dijalankan sangat bergantung pada kondisi ketersediaan daya tampung di setiap daerah. Dengan demikian, sasaran tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih tepat. Selain fokus intervensi pada pemenuhan akses, intervensi berupa peningkatan kualitas dapat dilakukan terutama di daerah yang daya tampung sekolah negerinya telah terpenuhi.

REFERENSI

- [1] Aspers, P. (2011). *Markets*. Polity.
- [2] Esping-Andersen, G. (1990). *The three worlds of welfare capitalism*. Polity Press.
- [3] Marshall, T. H., & Bottomore, T. B. (1992). *Citizenship and social class*. Pluto Press.
- [4] Pattinasarany, I. R. I. (2016). *Stratifikasi dan mobilitas sosial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [5] Seda, F. S. S. E. (2014). *Dinamika sumber daya alam, negara developmentalis, dan masyarakat: perspektif sosiologi perubahan ekonomi*. Penerbit Universitas Indonesia.
- [6] Suharti. (2013). *Education in Indonesia* (D. Suryadarma & G. W. Jones, Eds.). Institute of Southeast Asian Studies.
- [7] UNESCO. (2021). *Global Education Monitoring Report 2021/2: Non-state actors in education: Who chooses? Who loses?*. UNESCO. <https://doi.org/10.54676/XJFS2343>
- [8] Zamjani, I. (2021). *The politics of educational decentralisation in Indonesia: A quest for legitimacy*. Springer Nature Singapore.

Educational Attainment and Labor Market Outcome for Disabilities: An Empirical Study from Indonesia

Ananda Sintia Putri¹, Nur Azizah Arianggi Suryaatmaja², Iqram Ramadhan Jamil³

^{1,2,3} Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran
(E-mail: ananda19009@mail.unpad.ac.id, nur19007@mail.unpad.ac.id,
iqram19001@mail.unpad.ac.id)

Kata kunci: penyandang disabilitas; akses pendidikan; bursa tenaga kerja; kesetaraan; Indonesia

EXTENDED ABSTRACT

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 15% dari populasi dunia (ILO, 2022). Hasil data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terdapat 22,2 juta (8,5%) penduduk Indonesia penyandang disabilitas di tahun 2020. Di seluruh dunia, penyandang disabilitas memiliki tingkat kesehatan yang lebih buruk, capaian pendidikan dan partisipasi ekonomi yang lebih rendah, serta tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bukan penyandang disabilitas (Halimatussadiah dkk., 2017). Isu diskriminasi menjadi salah satu penyebab rendahnya aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Per tahun 2022, terdapat sekitar 40 ribu sekolah inklusi tingkat dasar dan menengah dari sekitar hampir 400 ribu jumlah sekolah dasar dan menengah, baik di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) maupun Kementerian Agama (Kemenag) (Mantey, 2017). Masalah yang menjadi tantangan dalam diskriminasi yang dirasakan anak disabilitas adalah kurikulum yang dirancang untuk anak tanpa disabilitas, sehingga guru kesulitan dalam menghadapi keragaman siswa penyandang disabilitas yang masuk ke dalam kelas reguler (Hay & Winn, 2005).

Beberapa indikator sosial ekonomi memperlihatkan bahwa penyandang disabilitas belum secara penuh mendapatkan kesejahteraan yang diharapkan karena sebanyak 11,42% kelompok penyandang disabilitas hidup di bawah garis kemiskinan (Bappenas, 2021). Per tahun 2020, tingkat persentase penyandang disabilitas yang bekerja adalah sebesar 56,98%. Hampir setengah dari penyandang disabilitas di Indonesia bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (sebesar 45,9%) diikuti sektor perdagangan besar, eceran, dan reparasi (sebesar 15,4%). Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas masih bekerja di lapangan usaha dengan karakteristik informal, sederhana, dan produktivitas yang relatif rendah.

Paradigma dalam literatur terkait dengan penyandang disabilitas diawali dengan pendekatan keterbatasan fungsional. Pendekatan ini menjelaskan penyandang disabilitas memiliki stigma tidak dapat memenuhi tugas dan fungsinya dalam kelompok sosial karena keterbatasan fisik maupun mental (Bernell, 2003). Kemudian, terdapat *medical model* yang menjelaskan bahwa

disabilitas merupakan sebuah penyakit (patogen), sehingga menimbulkan anggapan bahwa disabilitas harus diobati agar seorang penyandang disabilitas dapat terintegrasi dengan masyarakat. Di lain sisi, terdapat *social construction* model yang berlawanan dengan kedua pendekatan sebelumnya. Teori ini juga didukung dengan pendekatan *sociopolitical* yang menegaskan bahwa disabilitas, sebagaimana keberagaman warna kulit, usia, maupun jenis kelamin, seharusnya diperlakukan dengan setara dan tanpa diskriminasi (Kimball dkk., 2016). Selain itu, berdasarkan *human capital theory*, akses pendidikan dapat memberikan pengetahuan dan kemampuan yang dapat meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian maupun pendapatan bagi individu (Becker, 2009). Hal ini dilandaskan pada *stereotype theory* yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas cenderung lebih inferior dan kurang kompetitif, sehingga manfaat pendidikan dalam dunia kerja tidak terlalu dirasakan.

Dalam literatur terdapat banyak penelitian yang secara empiris mencoba untuk menelusuri kesempatan disabilitas dalam kaitannya dengan akses sekolah, peluang kerja, maupun upah yang diterima. Studi empiris terdahulu yang dilakukan di negara-negara berkembang benua Asia (Eide & Mmatli, 2021) dan Afrika (Eide & Mmatli, 2016) menunjukkan hasil yang seragam, di mana penyandang disabilitas memiliki pendidikan formal yang lebih rendah dibandingkan dengan individu non-disabilitas. Sementara itu, penelitian terdahulu menemukan bahwa penyandang disabilitas jika dibandingkan dengan non-disabilitas cenderung tidak memiliki kesempatan untuk bekerja yang lebih baik (Ameri dkk., 2018) serta studi empiris yang dilakukan oleh Baldwin & Choe (2014) dan Schur dkk., (2017) menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mengalami diskriminasi terkait dengan upah yang diterima. Kemudian, Baldrige dkk. (2019) dalam studinya menemukan bahwa pendidikan dapat memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas, namun tidak sebaik yang diterima oleh individu non-disabilitas.

TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur dengan mengestimasi pengaruh dari interaksi antara tingkat pendidikan dengan status disabilitas terhadap kesempatan kerja dan upah di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Februari tahun 2022 untuk menganalisis kondisi penyandang disabilitas terhadap akses pendidikan dan kesempatan mereka mendapatkan pekerjaan yang setara dengan non-disabilitas. Terdapat dua tahap analisis yang dilakukan, yaitu *Ordinary Least Square (OLS)* dan *Binary Logistic Regression*.

HASIL

Penelitian ini menggunakan regresi OLS untuk menganalisis bagaimana kondisi tingkat pendidikan penyandang disabilitas. Tabel 1 menunjukkan tiga model yang menguji hipotesis dalam penelitian ini. Model 1 menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah

dibandingkan dengan non-disabilitas sebesar 3,768 persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari Halimatussadiyah dkk., (2017) yang menemukan bahwa capaian pendidikan penyandang disabilitas lebih rendah dibandingkan dengan non-disabilitas. Rendahnya capaian pendidikan pada penyandang disabilitas diduga karena adanya diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan dipermalukan di lingkup sekolah, sehingga membuat terjadinya ketimpangan yang semakin tinggi pada penyandang disabilitas (Mantey, 2017).

Tabel 1 Hasil Estimasi Disabilitas Terhadap Pendidikan, Kesempatan Kerja, dan Upah

Unsur	(1)	(2)		(3)
	educ	unem	mfx	lnincome
Disabilitas	-3.768*** (0.0805)	-0.0198 (0.152)	-9.03e-05 (0.00692)	-0.594*** (0.0373)
Konstanta	8.527*** (0.0104)	-2.989*** (0.0129)		14.25*** (0.00281)
Observasi	190,851	132,111	132,111	104,204
R-Squared	0.014			0.003

Robust Standard errors in parantheses

*** p<0.01, ** p<0.05, *p<0.1

Model 2 membahas terkait analisis dari sisi ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan binary logistic regression. Berdasarkan asumsi model logit, skala *log-odds* digunakan untuk memperkirakan probabilitas. Namun, skala ini belum cukup untuk menggambarkan hasil secara akurat. Oleh karena itu dalam Tabel 1 ditambahkan *marginal effect* (mfx) untuk menginterpretasikan model non-linear. Sisi ketenagakerjaan yang digunakan dalam estimasi ini adalah status pengangguran. Model 2 menunjukkan bahwa variabel disabilitas tidak berpengaruh signifikan pada variabel status pengangguran. Artinya tidak ada perbedaan antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas dalam mendapatkan kesempatan kerja. Selanjutnya, model 3 membahas analisis sisi ketenagakerjaan berdasarkan upah. Hasil menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki upah yang lebih rendah dibandingkan dengan non-disabilitas sebesar 5,94%.

PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Temuan studi ini mengindikasikan bahwa penyandang disabilitas belum memiliki akses yang setara dalam mengenyam pendidikan formal, jika dibandingkan dengan bukan penyandang disabilitas. Lebih lanjut, studi ini juga menemukan bahwa penyandang disabilitas cenderung kurang diuntungkan pada pasar dunia kerja, terutama terkait dengan tingkat upah yang diperoleh. Secara umum, studi ini menunjukkan bahwa pendidikan formal bagi penyandang disabilitas belum dapat memberikan efek positif untuk menurunkan selisih upah yang dialami penyandang disabilitas.

REKOMENDASI

Dengan demikian, pemerintah perlu mengakomodir sistem *Universal Design for Learning* (UDL) untuk meningkatkan aksesibilitas bagi siswa penyandang disabilitas maupun non-disabilitas dengan kemampuan belajar yang bervariasi melalui keterlibatan aktif dan berbagai cara representatif aktivitas pembelajaran. Selain itu, perlu adanya program konseling karier untuk penyandang disabilitas agar mendapatkan informasi terkait perencanaan karier yang sesuai dengan kapabilitasnya. Penyandang disabilitas harus dilibatkan untuk mengembangkan keterampilan dan menentukan masa depannya sendiri sehingga dapat dengan jelas menyatakan harapan, rencana, dan keinginan mereka selama masa sekolah serta berkarier.

REFERENSI

- [1] International Labour Organization. (2022). Pemetaan pekerja dengan disabilitas di Indonesia: Saran dan rekomendasi kebijakan.
- [2] Ameri, M., Schur, L., Adya, M., Bentley, F. S., McKay, P., & Kruse, D. (2018). The disability employment puzzle: A field experiment on employer hiring behavior. *ILR Review*, 71(2), 329–364. <https://doi.org/10.1177/0019793917717474>.
- [3] Baldwin, M. L., & Choe, C. (2014). Re-examining the models used to estimate disability-related wage discrimination. *Applied Economics*, 46(12), 1393–1408. <https://doi.org/10.1080/00036846.2013.872762>.
- [4] Bappenas. (2021). Kajian Disabilitas. Tinjauan peningkatan akses dan taraf hidup penyandang disabilitas Indonesia: Aspek sosioekonomi dan yuridis.
- [5] Bernell, S. L. (2003). *Theoretical and applied issues in defining disability in labor market research*.
- [6] Becker, G. (2009). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed). Chicago: University of Chicago Press.
- [7] Eide, A. H., & Mmatli, T. (2016). Living conditions among people with disability in Botswana Editor(s). In *SINTEF Technology and Society Health Research*. www.sintef.no
- [8] Halimatussadiyah, A., Nuryakin, C., Muchtar, P. A., Bella, A., & Rizal, H. (2017). Mapping persons with disabilities (PWDs) in Indonesia labor market. *Economics and Finance in Indonesia*, 63(2), 126–149.
- [9] Hay, I., & Winn, S. (2005). Students with Asperger's Syndrome in an inclusive secondary school environment: Teachers', parents', and students' perspectives. *Australasian Journal of Special Education*, 29(2), 140–154.
- [10] Kimball, E. W., Wells, R. S., Ostiguy, B. J., Manly, C. A., & Lauterbach, A. A. (2016). Students with disabilities in higher education: A review of the literature and an agenda for future research. *Higher education: Handbook of theory and research*, 91–156. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26829-3_3.
- [11] Mantey, E. E. (2017). Discrimination against children with disabilities in mainstream schools in Southern Ghana: Challenges and perspectives from stakeholders. *International Journal of Educational Development*, 54, 18–25. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.02.001>.
- [12] Schur, L., Han, K., Kim, A., Ameri, M., Blanck, P., & Kruse, D. (2017). Disability at work: A look back and forward. *Journal of Occupational Rehabilitation*, 27(4), 482–497. <https://doi.org/10.1007/s10926-017-9739-5>.
- [13] Wibowo, S. B., & Muin, J. A. (2018). Inclusive education in Indonesia: Equality education access for disabilities. *KnE Social Sciences*, 3(5), 484. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i5.2351>.



FELT
2023

FORUM ON EDUCATION
LEARNING TRANSFORMATION
INDONESIA

EXTENDED ABSTRACT

FORUM ON EDUCATION AND
LEARNING TRANSFORMATION

7-28 November 2023 | Sheraton Grand

<http://www.pendidikan.go.id>

oud

article33.id/id/id



**PROGRAM
SEKOLAH PENGGERAK**

Studi Empiris Pendidikan di Indonesia: Apa yang Membuat Sekolah Baik?

Alexander Michael Tjahjadi

STF Driyarkara dan Monash University, Indonesia

(E-mail: alexander.michael@driyarkara.ac.id dan amic0015@student.monash.edu)

Kata kunci: kualitas sekolah; ekonomi pendidikan; logit

EXTENDED ABSTRACT

PENDAHULUAN

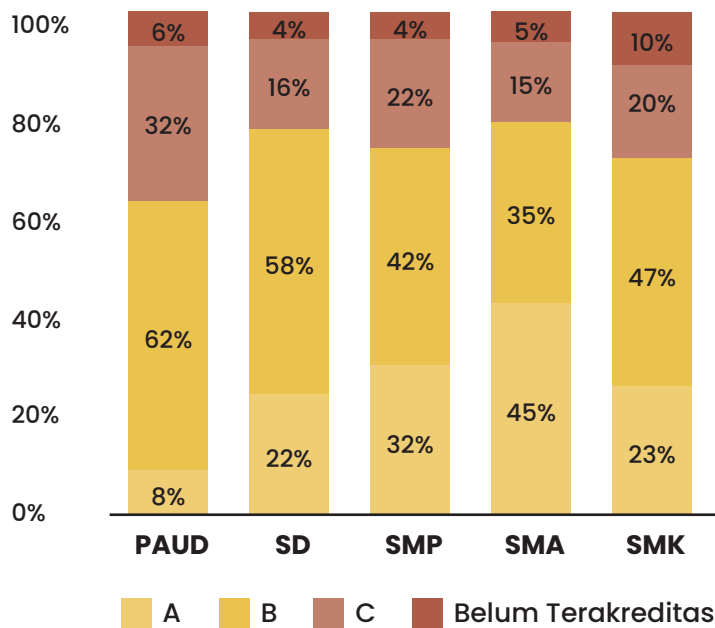
Indonesia memiliki jumlah pendidik dan siswa yang sangat besar dan signifikan, termasuk kompleksitas sistem pendidikan yang dihadapi oleh guru, siswa, dan sekolah. Menurut data pendidikan nasional terbaru (Dapodik), ada sekitar 436 ribu sekolah dengan hampir 53 juta siswa dan 3 juta guru (Kemendikbudristek, 2023).

Tujuan utama akreditasi di Indonesia adalah multifase (BANSM, 2021). **Pertama**, ia berfungsi sebagai sarana untuk menginformasikan publik tentang kualitas dan kinerja sekolah dan madrasah. Hasil akreditasi tersedia untuk umum, memungkinkan orang tua dan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai lembaga pendidikan. **Kedua**, proses akreditasi memberikan sistem penilaian atau persetujuan, mengategorikan lembaga berdasarkan kepatuhan mereka terhadap standar yang ditetapkan.

Salah satu kontradiksi muncul dari sifat kaku standar akreditasi. Meskipun standar ini penting untuk memastikan pendidikan berkualitas, mereka mungkin tidak selalu beradaptasi dengan baik dengan keadaan yang tidak terduga, seperti peralihan mendadak ke pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Penutupan sekolah mengakibatkan kehilangan pembelajaran yang signifikan bagi siswa, menyoroti kebutuhan akan kriteria akreditasi yang lebih fleksibel yang memperhitungkan metode pengajaran yang inovatif dan adaptif (Afkar & Yarrow, 2021).

Selain itu, fokus tradisional akreditasi pada input dan proses mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan visi yang berkembang untuk masa depan pembelajaran (Bank Dunia, 2023). Visi ini menekankan pada keterlibatan peserta didik, fasilitasi guru dalam pembelajaran, sumber belajar yang memadai, inklusivitas, dan sistem sekolah yang efisien.

Menurut Dapodik, pada tahun 2023 ada perbedaan signifikan antara sekolah dengan akreditasi 'A' dan populasi sekolah lainnya. Seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan, jumlah sekolah unggulan juga meningkat. Misalnya, 22% sekolah dasar memiliki akreditasi 'A', dibandingkan dengan 45% sekolah menengah atas. Namun, situasi ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan meningkatkan sekolah yang baik menjadi unggul di sekolah dasar.



Gambar 1 Kualitas Sekolah berdasarkan Akreditasi di Indonesia

METODOLOGI

Studi ini menggunakan dataset Dapodik 2023 sebagai sumber data utama, yang diambil dari situs webnya dan menjanjikan informasi yang sangat kaya. Dataset ini mencakup detail penting terkait akreditasi sekolah dan memberikan wawasan tentang standar dan kualitas berbagai lembaga pendidikan. Selain itu, dataset ini menyediakan informasi komprehensif tentang sekolah, termasuk jumlah siswa, profil guru, dan detail lainnya yang terkait dengan sekolah, memastikan pandangan holistik untuk memahami berbagai aspek sistem pendidikan.

Penelitian ini diperkaya dengan data dari literatur publik, termasuk publikasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BANSM), dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini membutuhkan validasi dan interpretasi yang hati-hati untuk memastikan keandalan dan keaslian data, dengan mengandalkan kredibilitas organisasi penyediannya.

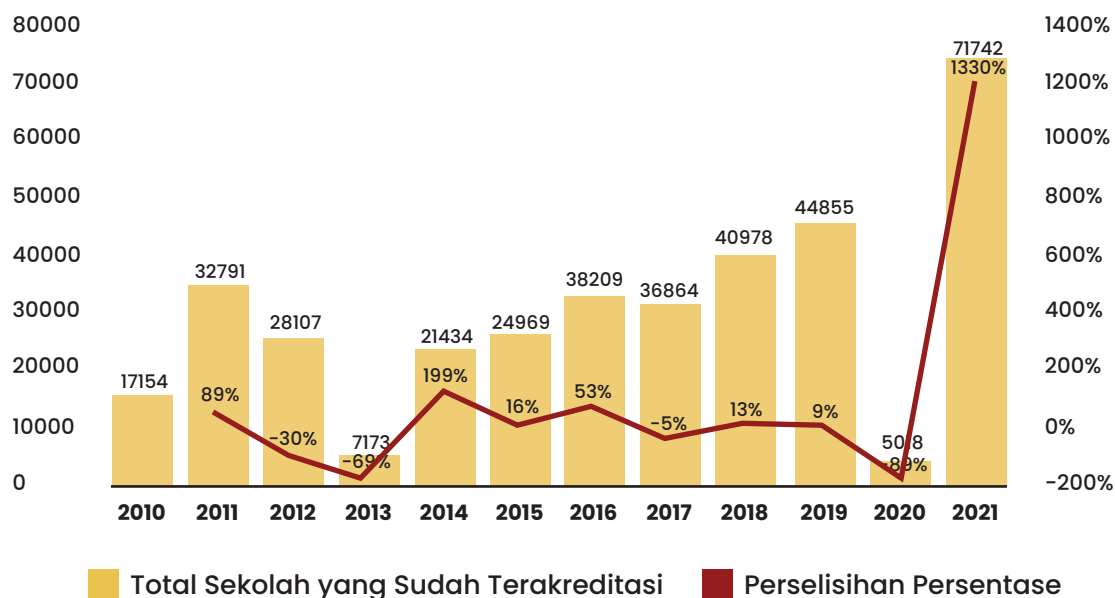
Analisis penelitian menggunakan metode mikroekonometrika, khususnya model regresi logit multinomial. Metode ini fokus pada unit individu seperti siswa atau sekolah dan cocok untuk penelitian ini karena memungkinkan analisis yang lebih rinci. Dengan menggunakan variabel dummy “keunggulan sekolah”, penelitian ini dapat mengkategorikan sekolah berdasarkan standar keunggulan yang berbeda. Model regresi ini menggunakan variabel *dummy* sekolah penggerak sebagai proksi untuk sekolah yang telah mencapai keunggulan dan akreditasi, dan variabel kovariat untuk mewakili karakteristik sekolah seperti akses ke listrik dan internet, serta rasio penting seperti rasio guru-siswa, jumlah guru yang berkualifikasi, dan guru bersertifikat. Setelah menjalankan regresi, margin berbagai variabel seperti kompetensi guru dan proporsi guru yang berkualifikasi akan dihitung.

HASIL

Pengamatan penting tentang sistem akreditasi Indonesia adalah performa pada berbagai indikator standar pendidikan nasional. Dari delapan indikator, empat di antaranya secara konsisten menunjukkan skor rendah, seperti data dari tahun 2016 (PSKP, 2018). Indikator yang terkait dengan proses, lulusan, guru, dan standar peralatan semuanya berada di bawah ambang batas 80, menimbulkan kekhawatiran tentang efikasi metodologi pengajaran, kualitas lulusan, kompetensi staf pengajar, dan kelayakan peralatan dan infrastruktur yang tersedia bagi siswa.

Salah satu tren yang mencolok adalah kurangnya korelasi antara skor akreditasi lembaga pendidikan dengan skor ujian nasional siswanya (PSKP, 2018). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dan kelengkapan proses akreditasi. Di tahun 2020, terjadi perubahan signifikan dengan penggantian Ujian Nasional menjadi asesmen kompetensi minimum sebagai bagian dari inisiatif “Merdeka Belajar” (Kemendikbudristek, 2022), yang bertujuan untuk fokus pada evaluasi kompetensi fundamental siswa daripada pembelajaran hafalan.

Data menunjukkan fluktuasi dalam jumlah sekolah yang terakreditasi setiap tahun, menyoroti masalah yang lebih dalam proses akreditasi dan lanskap pendidikan secara luas (BANSM, 2021). Faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 telah memperburuk tantangan ini, mengganggu sistem pendidikan dan menggeser fokus dari akreditasi.



Gambar 2 Jumlah Sekolah yang Terakreditasi

Analisis ekonometri menunjukkan bahwa infrastruktur dasar seperti akses internet dan listrik berperan penting dalam menentukan apakah sebuah sekolah akan mencapai akreditasi unggul. Akan tetapi, hasilnya menunjukkan bahwa sekolah unggul cenderung menerima bagian yang lebih kecil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), menunjukkan pemanfaatan sumber daya yang efisien atau adanya sumber pendanaan alternatif. Selain itu, komposisi staf pengajar dan rasio guru-siswa menunjukkan variasi menarik dalam menentukan akreditasi

unggul, menekankan perlunya strategi yang disesuaikan pada berbagai tingkatan pendidikan.

Model ekonometri kedua berfokus pada pemahaman faktor-faktor yang memengaruhi kemungkinan sebuah sekolah menjadi 'sekolah penggerak', yang mencerminkan karakter transformatif dan inovatif sebuah sekolah. Variabel tergantung di sini adalah status 'sekolah penggerak', yang berarti hasil yang ingin diprediksi adalah kemungkinan sebuah sekolah menjadi 'sekolah penggerak' dan faktor-faktor yang memengaruhi hal tersebut.

Pertama, analisis menunjukkan bahwa sekolah yang sudah memiliki peringkat unggul (A), terutama di kategori sekolah menengah pertama, memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk memenuhi kriteria sebagai 'sekolah penggerak'. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah dengan rekam jejak kinerja tinggi lebih cenderung memenuhi karakteristik sebagai 'sekolah penggerak'.

Kedua, hasil menarik terkait dengan rasio guru-siswa. Berbeda dengan ekspektasi umum, terdapat hubungan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa rasio siswa-guru yang lebih tinggi tidak selalu berkorelasi dengan kemungkinan sebuah sekolah menjadi 'sekolah penggerak', menantang pandangan tradisional bahwa ukuran kelas yang lebih kecil selalu menghasilkan hasil yang lebih baik.

Terakhir, kemungkinan sebuah sekolah unggul menjadi 'sekolah penggerak' berada pada angka signifikan 15%. Namun, wawasan penting di sini adalah signifikansi infrastruktur, khususnya akses internet dan listrik. Untuk dianggap sebagai 'sekolah penggerak', sepertinya memiliki cakupan akses internet minimal 71% dan cakupan listrik 94% sangat penting. Menariknya, peluang menjadi 'sekolah penggerak' meningkat saat kita bergerak dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama dan kemudian ke sekolah menengah atas. Hal ini menekankan tantangan dan peluang yang berkembang yang dihadapi sekolah pada berbagai tingkatan pendidikan dalam perjalanan mereka menuju keunggulan transformatif.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, berikut adalah empat rekomendasi kebijakan publik:

1. Sederhanakan Indikator Akreditasi: Kekakuan dalam proses akreditasi saat ini tidak efektif dalam meningkatkan sistem pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan indikator akreditasi untuk membuatnya lebih praktis dan mudah diukur. Hal ini dapat membantu lembaga pendidikan fokus pada aspek inti yang benar-benar penting untuk peningkatan kualitas.
2. Penyesuaian Akreditasi dengan Asesmen Nasional dan Perencanaan Berbasis Data: Akreditasi perlu disesuaikan dengan asesmen nasional dan didukung oleh perencanaan berbasis data. Hal ini akan membuka peluang untuk otomatisasi dalam sistem penilaian dan akreditasi, memastikan bahwa prosesnya lebih efisien dan akurat.
3. Konsistensi Validasi Eksternal dan Internal dalam Akreditasi: Penting untuk mencapai konsistensi antara validasi eksternal dan internal dalam proses akreditasi. Hal ini akan memastikan bahwa lembaga

pendidikan secara akurat menilai kinerja mereka sendiri dan sejalan dengan standar eksternal, meningkatkan keandalan proses akreditasi.

4. Pemeliharaan Kepercayaan Masyarakat pada Sistem Pendidikan: Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan Indonesia, perlu ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses akreditasi. Masyarakat perlu merasa yakin bahwa sistem pendidikan terus berkembang dan berupaya untuk menyediakan pendidikan berkualitas kepada siswa.

Implementasi keempat rekomendasi ini akan membantu meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Indonesia dan memelihara kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan.

REFERENSI

- [1] Afkar, R. (2020). The promise of education in Indonesia. World Bank Group. United States of America. <https://policycommons.net/artifacts/1246043/the-promise-of-education-in-indonesia/1801363/> on 12 Jan 2024. CID: 20.500.12592/5xmdrb.
- [2] Afkar, R. & Yarrow, N. (2021). *Rewrite the future: How Indonesia's education system can overcome the losses from the COVID-19 pandemic and raise learning outcomes for all*. World Bank.
- [3] Andrietti, V & Su X. (2019). Education curriculum and student achievement: theory and evidence. *Education Economics*, 27, 4-19
- [4] Anggraena, Y., Felicia, N., Eprijum, D., Pratiwi, I., Utama, B., Alhapip, L., & Widiaswati, D. (2021). *Kajian akademik: Kurikulum untuk pemulihan pembelajaran*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek.
- [5] Azevedo, J.P. (2020). *Learning poverty: Measures and simulations*. World Bank.
- [6] Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BANSM). (2021). *Pedoman akreditasi sekolah/madrasah 2020*.
- [7] BANSM. (2018). *Ringkasan eksekutif hasil akreditasi sekolah dan madrasah*.
- [8] BANSM. (2019). *Ringkasan eksekutif hasil akreditasi sekolah dan madrasah*.
- [9] BANSM. (2020). *Ringkasan eksekutif hasil akreditasi sekolah dan madrasah*.
- [10] BANSM. (2021). *Ringkasan eksekutif hasil akreditasi sekolah dan madrasah*.
- [11] Cameron, A.C., & Trivedi P.K. (2005). *Microeconometrics methods and applications*. Cambridge University Press
- [12] Glewwe, P & Todd, P. (2022). *Impact evaluation in international development*. World Bank Group
- [13] Gouedard, P., dkk. (2020). Curriculum reform: A literature review to support effective implementation. *OECD Working Paper*.
- [14] Hill, M & Varone F. (2017). *The public policy process*. Routledge.
- [15] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Data pokok pendidikan nasional*. <https://dapo.kemdikbud.go.id/>
- [16] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Kurikulum Merdeka jadi jawaban untuk atasi krisis pembelajaran*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/02/kurikulum-merdeka-jadi-jawaban-untuk-atasi-krisis-pembelajaran>

- [17] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Daftar pertanyaan yang sering ditanyakan: *Program Sekolah Penggerak [Dokumen PDF]*. https://merdekabelajar.kemdikbud.go.id/upload/file/143_1638311774.pdf
- [18] Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.
- [19] Mukminin, A., dkk. (2019). Curriculum reform in Indonesia: Moving from an exclusive to inclusive curriculum. *CEPS Journal*, 9, 53–72
- [20] OECD. (2018). PISA: *Country profile*. <https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=IDN&treshold=10&topic=PI>
- [21] Patrinos, H.A. (2020). The learning challenge in the 21st century. *Policy Research Working Paper*. World Bank
- [22] Patrinos, H.A. (2016). *The skills that matter in the race between education and technology*.
- [23] Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- [24] Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) (2022). Belajar melalui refleksi kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka. *Working Paper Series*.
- [25] PSKP. (2018). *Percepatan akreditasi sekolah melalui pembiayaan mandiri*.
- [26] PSKP. (2018). *Akreditasi pemenuhan standar nasional pendidikan dan mutu satuan pendidikan*.
- [27] Randall, R., Sukoco, G. A., Heyward, M., Purba, R., Arsendy, S., Zamjani, I., Hafiszha, A. (2022). *Reforming Indonesia's curriculum: how Kurikulum Merdeka aims to address learning loss and learning outcomes in literacy and numeracy*. Jakarta: INOVASI.
- [28] Saavedra Chanduvi, J., Aedo Inostroza, M. C., Arias Diaz, O. S., Pushparatnam, A., Gutierrez Bernal, M., & Rogers, F. H. (2020). *Realizing the future of learning: From learning poverty to learning for everyone, everywhere*. Washington DC: World Bank. <http://documents.worldbank.org/curated/en/250981606928190510/Realizing-the-Future-of-Learning-From-Learning-Poverty-to-Learning-for-Everyone-Everywhere>
- [29] Wu, X., Ramesh, M., Howlett, M., & Fritzen, S. A. (2017). *The public policy primer: Managing the policy process*. Routledge.

Pengembangan Holistik Kualitas Pendidikan melalui Program Sekolah Penggerak (PSP) di Satuan PAUD

Yuni Cahaya Hati
Universitas Indonesia
(E-mail: yuni.cahayahati@gmail.com)

Kata kunci: kolaborasi; pendampingan; pelatihan; kreativitas; kompetensi; sekolah penggerak

EXTENDED ABSTRACT

Penelitian ini dilakukan sebagai evaluasi terhadap kebijakan Medeka Belajar Episode 7, Program Sekolah Penggerak (PSP). Tujuan dari PSP adalah sebagai katalis untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik melalui dimensi-dimensi Profil Pelajar Pancasila. Fokus penelitian ini melihat proses dan perubahan yang terjadi pada kepala sekolah setelah mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari pusat maupun dinas setempat serta pelatih ahli secara intens. Setelah itu, kepala sekolah didampingi oleh pengawas sekolah yang disebut komite pembelajaran melakukan *in house training* (IHT) secara berkala menggunakan kurikulum paradigma baru (Kurikulum Merdeka).

Program ini didesain untuk menjawab kebutuhan dan tantangan pendidikan di Indonesia selama ini. Salah satunya adalah sistem pendidikan yang bersifat sentralistik. Keseragaman dapat terlihat dari bahan ajar yang digunakan, metode mengajar, hingga pada penilaian ketuntasan belajar (Munirah, 2015). Pendidikan di Indonesia pada tiap-tiap daerah seharusnya kontekstual, holistik, dan fokus pada pemecahan masalah (*problem solving*) (Sukasni & Haldy, 2017). Kontekstual yang dimaksud adalah pendidikan harus menyesuaikan dengan keragaman dan kondisi wilayah setempat. Guru-guru harus memiliki kepekaan dan kemampuan dalam merancang pembelajaran untuk peserta didik.

Sekolah Penggerak menekankan mutu dan kualitas pendidikan dengan meningkatkan kapasitas kepala sekolah dan kompetensi guru-guru. Beberapa hal yang diidentifikasi sebagai penyebab pendidikan di Indonesia tidak berkembang, yaitu kurangnya sosialisasi dan pelatihan; kekurangan bantuan untuk fasilitas, program, dan manajemen yang buruk, tidak tersedianya materi pembelajaran (buku panduan); kurangnya pengawasan dan evaluasi; ketidakseimbangan antara jumlah sekolah dengan pengawas sekolah untuk tiap wilayah (Jhon dkk., 2021). Secara umum, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan mutu pengajaran pada negara berkembang berdasarkan studi yang dilakukan di Indonesia yaitu kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, digitalisasi untuk akses teknologi, sekolah dengan biaya yang terjangkau, manajemen pendidikan, dan SDM (Pramana dkk., 2021).

Perubahan yang diharapkan terjadi pada tahap awal (*baseline*) dalam Sekolah Penggerak adalah kepala sekolah sebagai kepala satuan pendidikan sekaligus pemimpin pembelajaran, adaptasi transisi kurikulum, metode

pengajaran yang berpusat pada anak, penerapan digitalisasi sekolah, standar penilaian, dan perubahan budaya sekolah. Hal baru dalam PSP yaitu penekanan terhadap pendidikan karakter, di mana terdapat alokasi waktu khusus yang harus diselenggarakan dalam bentuk proyek maupun disisipkan dalam materi di kelas.

Pengembangan dalam PSP dilakukan untuk SDM sekolah, mulai dari peserta didik, guru, sampai kepala sekolah. Dalam pelaksanaannya, Kemendikbud didukung dan kolaborasi dengan Kemendagri untuk beberapa hal, seperti: 1) pemerintah daerah diharapkan dapat memahami konsep sekolah penggerak; 2) membuat tindak lanjut untuk mendukung program; 3) dinas terkait memetakan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan Program Sekolah Penggerak; 4) tidak merotasi kepala sekolah, guru, dan SDM lainnya selama minimal 4 tahun. Kehadiran program ini diperlukan untuk kolaborasi, pembinaan, dan pengawasan di tingkat pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota.

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus, di mana program yang telah dilaksanakan kemudian dilakukan evaluasi proses pelaksanaannya, guna memahami faktor-faktor yang memengaruhi, dan dampak yang dihasilkan. Sampel dari penelitian ini merupakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta yang bernaung di bawah yayasan keagamaan yang berada di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen yang berkaitan.

Informan yang menjadi target wawancara adalah kepala sekolah, guru, staf tata usaha, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua peserta didik, dan ketua yayasan. Wawancara dilakukan sebanyak tiga kali dalam durasi 2 bulan, yaitu pada minggu awal, pertengahan, dan akhir. Pengumpulan dokumen berupa kurikulum operasional satuan PAUD (KOSP), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan visi misi sekolah sebelum dan setelah implementasi Program Sekolah Penggerak. Observasi mendalam di sekolah dilakukan selama dua bulan, mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh guru dari awal masuk hingga pulang sekolah. Jika ada kesempatan, mengikuti kegiatan yang diselenggarakan dari sekolah, seperti kunjungan ke tempat-tempat di luar sekolah, *in house training*, dan sosialisasi atau pertemuan dengan wali murid.

Langkah pertama yang dilakukan oleh kepala sekolah setelah ditetapkan menjadi Sekolah Penggerak adalah melakukan perubahan visi misi. Tujuan sekolah setelah menjadi pelaksana Sekolah Penggerak adalah mewujudkan generasi maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, melalui tercapainya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global. Dalam perumusan visi dan tujuan sekolah tersebut, melibatkan pihak yayasan dan guru-guru dan disosialisasikan kepada orang tua anak.

Pembinaan terhadap guru-guru oleh kepala sekolah menyesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kompetensi guru yang berbeda-beda. Profesionalitas kepala sekolah dalam melaksanakan PSP dilakukan dengan supervisi secara rutin, memberikan contoh langsung kepada guru-guru di kelas, dan yang terpenting menjadi pemimpin pembelajaran. Menurut kepala sekolah, PSP memiliki dampak yang baik untuk guru: *"Apabila program ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, guru tidak lebih dibebankan kerjanya, guru lebih ringan pekerjaannya, asalkan memiliki kompetensi."*

Sebelum PSP, guru berperan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, sehingga proses pembelajaran berjalan hanya satu arah. Sekarang anak-anak diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan pengetahuan dari berbagai hal dan bebas untuk bereksplorasi. Penekanan yang penting bahwa anak diberikan kebebasan bermain sambil belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Fokus kegiatan tidak hanya sebatas membaca, menulis, berhitung (calistung) atau mewarnai saja, sekarang menjadi lebih bervariasi dan beragam. Guru harus menyiapkan arena bermain menyesuaikan topik dan tema yang akan dipelajari. Metode mengajar kini menggunakan 3 arena bermain yang dapat dipilih oleh anak sebagai sarana belajar sambil bermain. Standar penilaian yang dilakukan oleh guru sejak PSP sudah berubah. Tidak ada lagi kategori anak pintar dan bodoh, semua anak dilihat dari proses yang dilakukan.

Setelah ditetapkan menjadi sekolah penggerak, PAUD ini mendapat perhatian dari berbagai pemangku kepentingan, seperti dari BP PAUD Dikmas Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Pendidikan Kota Bitung. BP PAUD dari awal memberikan dukungan dan motivasi kepada kepala sekolah. Jika dalam penyusunan program sekolah terdapat kesulitan, dapat bertanya dan menghubungi mereka.

Kompetensi kepala sekolah dan guru terlihat meningkat setelah mulai menjalankan program Sekolah Penggerak. Kepala sekolah yang mendapat pelatihan secara intensif dari berbagai pihak untuk peningkatan kapasitasnya dalam memimpin, kemudian menjadi pemimpin pembelajaran untuk guru-guru yang ada di PAUD. Guru-guru mendapatkan pengetahuan baru sehingga kepercayaan diri guru meningkat dalam mengajar. Metode yang diterapkan dalam pembelajaran menjadi bervariasi. Hal itu berdampak pada anak-anak menjadi lebih bersemangat dan aktif dalam menjalankan proyek pembelajaran. Guru-guru pada awalnya terlihat kesulitan untuk menyesuaikan kurikulum paradigma baru, namun seiring perjalanan waktu terlihat pembelajaran sudah mengarah pada Merdeka Belajar. Persiapan guru untuk mengajar menjadi lebih matang karena setiap hari harus memikirkan ide dan permainan untuk anak. Adanya program Sekolah Penggerak mendorong peningkatan pedagogi dan profesionalitas guru-guru untuk meningkatkan kualitas dalam mengajar.

Program Sekolah Penggerak secara keseluruhan telah memuat poin-poin untuk pengembangan mutu pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kekurangan, seperti miskomunikasi atau pemahaman yang kurang tepat mengenai program dari pihak dinas pendidikan. Diperlukan pelatihan secara intensif untuk kepala sekolah, guru-guru, dan pengawas secara langsung untuk menyamakan persepsi mengenai pembelajaran dalam PSP. Sinergi antara sekolah dan dinas pendidikan setempat diperlukan agar pemahaman terhadap Sekolah Penggerak tidak hanya dinilai dari kesiapan sarana prasarana saja.

REFERENSI

- [1] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023, 24 Oktober). Program Sekolah Penggerak. Halaman web daring. <https://psp.web.pauddikdasmen.kemdikbud.go.id/#/home>.
- [2] UNICEF. (2018). Preschool teacher competencies key to quality pre-school education. <https://www.unicef.org/northmacedonia/press-releases/preschool-teacher-competencies-key-quality-pre-school-education>. Diakses pada 30 Oktober 2023.
- [3] Center for the study of child care employment. (2008). *Early Childhood Educator Competencies. A Literature Review of Current Best Practices, And a Public Input Process on Next Steps for California*.
- [4] Pramana, C., Chamidah, D., Suyatno, S., Renadi, F., Syahrudin. (2021). Strategies to Improved Education Quality in Indonesia: A Review. *Tourkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQ)*, 12(3), 1977-1944.
- [5] Muji, A. P., Gistituati, N., Bentri, A., Falma, F.O. (2021). Evaluation of The Implementation of The Sekolah Penggerak Curriculum Using The Context, Input, Process, and Product Evaluation Model in High Schools. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 7(3), 377-384.
- [6] Fitri, S.F.D. (2021). Problematika Kualitas Pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1617-1620.
- [7] Munirah. (2015). Sistem Pendidikan Indonesia: Antara Keinginan dan Realita. *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 2(2), 233-245.
- [8] Jhon, W., Sugito., Enny Z., & Ali, M. (2021). *Challenges in The Implementation of Character Education in Elementary School from Indonesia*. *Ikogretim Online – Elementary Education Online*, 20(1), 1351-1363.
- [9] Chou, M.-J., Yang, C.-H., & Huang, P.-C. (2014). The beauty of character education on preschool children's parent-child relationship. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 143, 527-533.
- [10] Castro, M., Expósito-Casas, E., López-Martín, E., Lizasoain, L., Navarro-Asencio, E. & Gaviria, J. L. (2015). *Parental involvement on student academic achievement: A meta-analysis*. *Educational Research Review*, 14(1), 33-46.
- [11] Istiningsih. (2016). Character Education of the Most Developed Countries in ASEAN. *Journal of Education and e-Learning Research*, 3(1), 32-37.
- [12] Sukasni, A., & Haldy, E. (2017). The problematic of education system in Indonesia and reform agenda. *International Journal of Education*, 9(3), 183-199.
- [13] Suyanto, (2002). *Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru. Tantangan Global Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- [14] Salo, N. (2011). Knowledge Management in Education in Indonesia: An Overview. *Global Journal of Human Social Science*, 11(1), 30-44.
- [15] Muttaqin, T. (2018). Determinants of Unequal Access to and Quality of Education in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 2(1), 1-23.

Problematika Kepemimpinan Kepala Sekolah Negeri dan Swasta dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui Program Sekolah Penggerak

Ihwan Fauzi

Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam, UIN Malang, Indonesia

(E-mail: Ihwan.fauzi318@gmail.com)

Kata kunci: kepemimpinan kepala sekolah; sekolah negeri; sekolah swasta; peningkatan kualitas pendidikan; Program Sekolah Penggerak

EXTENDED ABSTRACT

PENDAHULUAN

Salah satu inisiatif penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah Program Sekolah Penggerak. Program ini diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah negeri dan swasta. Program ini menekankan peran kepala sekolah sebagai agen perubahan yang dapat memimpin sekolah menuju prestasi yang lebih baik. SK Menteri No. 162 tahun 2021 menjadi dasar hukum pelaksanaan Program Sekolah Penggerak. PSP atau Program Sekolah Penggerak merupakan program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil pelajar Pancasila. Implementasi program diawali dengan intervensi kepala sekolah sebagai pimpinan dalam satuan pendidikan (Hamzah, 2022). Dalam konteks ini, kepemimpinan kepala sekolah menjadi faktor yang sangat penting. Kepala sekolah memiliki peran kunci dalam mengelola sumber daya sekolah, mengawasi kualitas pengajaran, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif (Sudarmanto, 2021).

Sekolah negeri dan swasta memiliki karakteristik yang berbeda dalam sistem pendidikan. Bagi sekolah swasta, selain harus menghadapi berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, sumber daya mereka, termasuk anggaran dan fasilitas, juga sering kali dibatasi oleh kebijakan pemerintah. Namun di sisi lain, mereka juga harus menghadapi tekanan untuk bersaing dengan sekolah-sekolah swasta lainnya dan mempertahankan reputasi mereka (Elwijaya dkk., 2021).

Perbedaan-perbedaan ini menciptakan dinamika unik dalam kepemimpinan kepala sekolah di kedua jenis sekolah. Kepala sekolah di sekolah negeri sering kali menghadapi tantangan yang berbeda dari kepala sekolah di sekolah swasta. Dalam konteks Program Sekolah Penggerak, di mana peningkatan kualitas pendidikan menjadi tujuan utama, pemahaman yang mendalam tentang problematika kepemimpinan ini sangat penting.

Salah satu penelitian menemukan bahwa sebesar 93,3% sekolah swasta menganut pedoman bukan hanya dari dinas pendidikan namun juga ketua yayasan (Ega, 2022). Hasan Marzuki berpendapat bahwa faktor yang berpengaruh kepada kepemimpinan adalah hubungan kemanusiaan, pelimpahan wewenang

dan pengambilan keputusan, serta pengendalian (Muzaki, 2020). Febrianto menjelaskan bahwa kepala sekolah harus punya kuasa atas hal tersebut. Kepemimpinan berpengaruh terhadap kerja sama tim, sedangkan komunikasi efektif berpengaruh terhadap kepemimpinan dan kerja sama. Kepemimpinan yang tidak efektif dapat menyebabkan konflik, seperti yang terjadi di Yayasan Al-Fatah Surabaya karena terdapat dualisme kepemimpinan (Febrianto, 2021). Temuan studi berikutnya terkait penekanan pada kepemimpinan instruksional untuk meningkatkan pembelajaran siswa di sekolah, konflik antara arahan pusat dan pentingnya kepemimpinan situasional, dan kepentingan politik untuk hasil program (Ng, 2017).

Namun, berdasarkan observasi yang dilakukan, tidak semua yayasan memberi dukungan kepada kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Ini mengindikasikan tidak terjalannya komunikasi yang baik. Program yang dirancang lembaga pendidikan swasta kadang bersinggungan dengan program pendidikan nasional. Beberapa model kepemimpinan tersebut berimplikasi pada peningkatan program yang dilaksanakan lembaga pendidikan. Namun hal tersebut harus disesuaikan dengan situasi sekolah dengan karakteristik yang berbeda, seperti pada SMA swasta dan SMA negeri.

Satuan pendidikan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah SMA negeri dan SMA swasta di Kota Bandung. SMA negeri dan SMA swasta kenamaan di kota Bandung ini adalah sekolah penggerak angkatan pertama yang menjalankan Kurikulum Merdeka. Dalam menjalankan program, tentu banyak hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Namun seiring berjalannya waktu, sekolah mulai beradaptasi dengan program tersebut dan menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program tersebut di Provinsi Jawa Barat. Kepala sekolah SMA negeri di Kota Bandung menyatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan di sekolahnya merupakan pembelajaran yang memperhatikan minat dan bakat serta perkembangan zaman selama pelaksanaan program ini. Beliau menyatakan, *"Dengan konsep sekolah penggerak, kita melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ada pembelajaran diferensiasi. Memang kita beda-bedakan antara anak satu dengan yang lainnya terkait bakat dan kodrat alam dan kodrat jaman, kalau kata Ki Hajar Dewantoro. Kemudian pembelajaran proyek"*. (wawancara Kepala Sekolah, 2022).

Berbeda dengan SMA negeri di Kota Bandung, SMA swasta sebenarnya tidak memiliki masalah dalam pelaksanaan program sekolah penggerak dari segi penyesuaian berbagai program sekolah. Hal ini karena sebelumnya mereka sudah melaksanakan program yang dirasa senada dengan PSP. Namun, yang menjadi masalah adalah hubungan yayasan dengan sekolah. Di awal pelaksanaan program, SMA swasta mengalami banyak hambatan karena BOS Kinerja yang terlambat, sehingga akhirnya sekolah harus menggunakan uang yayasan. Namun itu melalui proses yang panjang, karena pencairan dana yayasan yang sangat sulit, padahal skemanya hanya berupa pinjaman (wawancara kepala sekolah, 2022). Kendala lain adalah pelaksanaan pelatihan dari pemerintah daerah yang dirasa kurang sampai pada sekolah tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin menggali lebih dalam bagaimana sebenarnya kepemimpinan kepala sekolah pada sekolah swasta dan negeri dalam melaksanakan program sekolah penggerak, hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaannya, serta hubungan yang terjalin antara pemangku kepentingan khususnya pada sekolah swasta.

METODOLOGI

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menggali problematika kepemimpinan kepala sekolah di Kota Bandung dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui Program Sekolah Penggerak. Dengan menggunakan studi kasus yang bersifat multisitus, studi ini menghasilkan data yang menunjukkan pola-pola berbeda di lokasi dan merupakan sintesis lintas-situs (Maimun, 2020). Sampel harus mencerminkan keragaman dalam konteks problematika kepemimpinan di sekolah negeri dan swasta di Kota Bandung yakni terdiri 4 sekolah, dua sekolah negeri dan dua sekolah swasta. Sampel akan terdiri dari 20 orang informan yang terbagi atas kepala sekolah, guru, dan komunitas sekolah yang berasal dari berbagai sekolah negeri dan swasta yang terlibat dalam Program Sekolah Penggerak di Kota Bandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, analisis dokumen, dan observasi lapangan di 4 sekolah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Lintas Situs Kepala Sekolah Negeri dan Swasta

Bagian ini akan merinci temuan dari penelitian dan menganalisis implikasinya dalam konteks pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian ini mencerminkan berbagai aspek problematika kepemimpinan kepala sekolah di sekolah negeri dan swasta dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak. Dalam analisis data, sejumlah temuan signifikan muncul. Pada Tabel 1 dapat dilihat analisis perbedaan antara sekolah negeri dan swasta.

Tabel 1 Perbandingan antara Sekolah Negeri dan Swasta

Unsur	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta
Pola kepemimpinan Kepala Sekolah	Situasional	Situasional
Pendanaan	Pemerintah	Pemerintah, komunitas sekolah, dan orang tua.
Pelibatan Komunitas	Orang tua, komunitas pendidikan	Yayasan, Orang tua, komunitas Pendidikan.
Kebijakan pengambilan keputusan	Tim Manajemen sekolah dan guru	Tim manajemen sekolah, guru, dan yayasan
Skema kesejahteraan guru	Insentif mengajar dan skema PPPK, serta gaji tetap bagi PNS	Insentif mengajar dan gaji tetap bagi guru tetap yayasan
Pandangan terhadap perubahan	Bersifat terbuka	Bersifat terbuka, namun disesuaikan dengan program yang sedang terlaksana

Pada Tabel 1 dipaparkan bahwa pola kepemimpinan yang digunakan dalam sekolah negeri dan swasta adalah kepemimpinan situasional, di mana para kepala sekolah berusaha untuk selalu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi dan komitmen para anggotanya. Kepemimpinan pendidikan merupakan salah satu poin penting gemilangnya pencapaian hasil belajar siswa. Kinerja suatu kelompok dipengaruhi oleh sistem motivasi dari kepemimpinan dan sejauh mana pemimpin dapat mengarahkan dan memengaruhi suatu situasi tertentu. Menurut Fiedler, kepemimpinan yang efektif akan terjadi jika seorang pemimpin mau belajar menjadi pemimpin yang baik dan peka dalam mengadaptasi perubahan yang terjadi (Saidah dkk., 2022). Pola kepemimpinan dapat tercermin dari cara para kepala sekolah memimpin rapat. Para guru berpendapat bahwa kepala sekolah selalu mengambil keputusan atas dasar kepentingan bersama secara musyawarah (wawancara guru, 2022).

Walaupun terkadang dalam upaya kepala sekolah untuk melibatkan para pemangku kepentingan dalam hal pengambilan keputusan dinilai parsial karena sifat urgensi dari pengambilan keputusan tertentu, prosesnya tetap melibatkan para guru. Seperti yang tergambar dari pernyataan salah satu guru, *“berkaitan dengan program-program sekolah itu pasti didiskusikan dengan guru terkait ataupun dengan panitia ataupun dengan guru yang dia punya job-desk di situ.”* (wawancara Guru, 2022). Begitu pun dengan pihak yayasan, biasanya terlibat dalam implementasi dan evaluasi program. Sebagaimana yang dinyatakan salah satu ketua yayasan, *“kalau ketua yayasan biasanya monitoring kegiatan awal tahun, tengah semester, dan pembagian rapor, jadi beberapa moment itu saja keterlibatannya, intinya sudah ada komunikasi.”* (wawancara Ketua Yayasan, 2022). Untuk memastikan hasil keputusan yang dirancang bersama tim manajemen sekolah sampai pada para pemangku kepentingan lainnya, kepala sekolah tetap mengkomunikasikan hasil keputusan akhir kepada para pemangku kepentingan setelah pelaksanaan rapat.

Kepala sekolah juga seharusnya bertugas melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, baik fungsi yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pendidikan maupun penciptaan iklim dan budaya sekolah yang kondusif bagi terlaksananya proses belajar mengajar secara efektif, efisien, dan produktif (Díaz-Gibson dkk., 2021). Salah satu fungsi kepemimpinan kepala sekolah dalam memastikan proses belajar mengajar yang efektif bergantung pada kualifikasi guru. Sekolah negeri kesulitan merekrut guru berkualitas karena anggaran terbatas dan insentif rendah. Sekolah swasta menawarkan insentif lebih besar, tapi ada beban keuangan untuk siswa dan orang tua. Untuk atasi permasalahan kualifikasi guru, perlu usaha lebih besar di sekolah negeri, seperti peningkatan insentif dan program pengembangan profesional. Guru yang terlatih di sekolah swasta bisa pindah ke sekolah negeri jika kebutuhan tak terpenuhi. Saat ini, perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) lebih memprioritaskan guru sekolah negeri, membuat guru swasta merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah.

Dari segi kebijakan dan administrasi, kepala sekolah di kedua jenis sekolah menghadapi tekanan dari berbagai kebijakan pemerintah dan administrasi sekolah yang kompleks (Rahayuningsih & Rijanto, 2022). Oleh karena itu, kepala sekolah juga senantiasa melakukan adaptasi dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak. Kepala sekolah yang mampu menjalankan perannya secara efektif dan efisien dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi terwujudnya kualitas atau mutu sekolah (Rosidi, 2022). Maka, hal yang paling penting dilakukan, salah satunya adalah merangkul semua warga sekolah agar

mau bekerja sama dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila dan menerapkan kurikulum sesuai dengan pedoman yang telah tersedia (Hidayat, 2022).

Merangkul komunitas sekolah juga penting untuk peningkatan kualitas pendidikan. Partisipasi orang tua siswa dan komunitas sekolah berperan signifikan. Sekolah swasta memiliki hubungan yang lebih erat dengan komunitas, dan orang tua siswa lebih aktif terlibat. Sekolah negeri mungkin menghadapi tantangan, terutama jika hubungan dengan komunitas tidak sekuat sekolah swasta. Beberapa sekolah juga mengalami masalah dengan yayasan dalam pelaksanaan PSP, seperti yang terjadi pada salah satu sekolah swasta terkemuka di Kota Bandung. Kepala sekolah dianggap kurang menghargai yayasan dengan mengikuti program tanpa koordinasi (wawancara ketua yayasan, 2022). Hal ini mengindikasikan pentingnya meningkatkan partisipasi komunitas sekolah di sekolah negeri dan swasta. Kepala sekolah perlu berperan dalam membangun hubungan yang kuat dengan komunitas dan melibatkan orang tua siswa dalam keputusan dan kegiatan sekolah. Program-program yang mendorong partisipasi komunitas perlu dikembangkan.

KESIMPULAN

Perbedaan pendanaan, kualifikasi guru, kebijakan dan administrasi sekolah, serta partisipasi komunitas sekolah memiliki dampak signifikan pada kualitas pendidikan. Ini termasuk peningkatan pendanaan sekolah negeri, pelatihan guru yang relevan, dukungan untuk kepala sekolah dalam mengelola kebijakan dan administrasi sekolah, serta upaya untuk memperkuat partisipasi komunitas sekolah. Dengan pemahaman yang mendalam tentang problematika kepemimpinan kepala sekolah, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi masa depan.

REKOMENDASI

Pemerintah memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua warga negara. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui Program Sekolah Penggerak, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan: peningkatan pendanaan, peningkatan kualitas guru dalam mendukung kepala sekolah, penguatan evaluasi dan pemantauan, serta penguatan partisipasi warga sekolah melalui sosialisasi.

REFERENSI

- [1] Díaz-Gibson, J., Daly, A., Miller-Balslev, G., & Zaragoza, M. C. (2021). The SchoolWeavers tool: supporting school leaders to weave learning ecosystems. *School Leadership & Management*, 41(4-5), 429-446. <https://doi.org/10.1080/13632434.2020.1770210>
- [2] Ega, S. (2022). Profil kepemimpinan kepala sekolah dasar negeri dan swasta di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Manajemen Pendidikan: Jurnal Ilmiah Administrasi, Manajemen, dan Kepemimpinan Pendidikan*, 4(1), 63-78.
- [3] Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). *Konsep dasar kebijakan pendidikan. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 67. <https://doi.org/10.29210/3003817000>
- [4] Febrianto, S. E. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan dan kerjasama tim: Kepemimpinan, komunikasi efektif, pendekatan kepemimpinan tim, dan efektivitas tim (suatu kajian studi literature review ilmu manajemen terapan). *JMPIS, Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 598-609. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2>
- [5] Hamzah, R. A. H. (2022). Pendampingan penguatan komite pembelajaran 3 “merancang dan memandu refleksi” program sekolah penggerak di Kabupaten Soppeng. *Madani: Indonesian Journal Of Civil Society*, 4(2), 95-102. <https://doi.org/10.35970/madani.v1i1.1327>
- [6] Hidayat, T., Irwandi, Nopriyeni, & Rusdi. (2022). Peningkatan mutu penyelenggara pendidikan melalui forum pemangku kepentingan daerah program sekolah penggerak. *Setawar Abdimas*, 1(2), 37-44.
- [7] Maimun, A. (2020). *Penelitian studi kasus: Bidang pendidikan Islam*. UIN Maliki Press.
- [8] Muzaki, H. (2020). Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja (studi pada kantor Desa Adimulya Kecamatan Wanareja). *AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 3(1), 20-32.
- [9] Ng, A. Y.-M. (2017). School leadership preparation in Malaysia: Aims, content and impact. *Educational Management Administration & Leadership*, 45(6), 1002-1019. <https://doi.org/10.1177/1741143216662922>
- [10] Rahayuningsih, S., & Rijanto, A. (2022). Upaya peningkatan kompetensi kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran pada program sekolah penggerak di Nganjuk. *JAMU : Jurnal Abdi Masyarakat UMUS*, 2(02), 120-126. <https://doi.org/10.46772/jamu.v2i02.625>
- [11] Rosidi, R., & Mashitoh, R. F. (2022). Analisis indeks kebahagiaan kepala sekolah dan guru dalam kegiatan bimbingan teknis program sekolah penggerak. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, 5(2), 144-163.
- [12] Saidah, K., & Imron, I. F. (2022). Implementation of the operational curriculum of sekolah penggerak program at elementary schools. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 68-81.
- [13] Sudarmanto. (2021). Pengaruh komunikasi kepala sekolah terhadap keterlaksanaan kepemimpinan sekolah pada program sekolah penggerak. *Jurnal Ilmiah Pro Guru*, 7(4), 462-472.

Digugu lan ditiru: **Normalisasi Perilaku Guru untuk Terbuka terhadap Perubahan**

Bakti Utama¹, Harwan Dharma Aji Manggala²

¹PSKP, Kemendikbudristek, Indonesia
(E-mail: baktiutama@gmail.com)

² Universitas Gadjah Mada, Indonesia
(E-mail: manggalaharwan@gmail.com)

Kata kunci: mutu pendidikan; kualitas guru; Program Sekolah Penggerak; normalisasi perilaku

EXTENDED ABSTRACT

PENDAHULUAN

Keriuhan diskusi tentang “Pendidikan Abad 21” menunjukkan kesadaran tentang pendidikan harus selalu dinamis memenuhi kebutuhan zaman. Di Indonesia, berkembangnya perbincangan terkait pendidikan abad 21 tersebut bersamaan dengan menguatnya perhatian pada peningkatan mutu pendidikan. Perhatian kebijakan di bidang pendidikan mengalami pergeseran tidak lagi pada penanganan isu perluasan akses layanan pendidikan tetapi lebih fokus pada bagaimana layanan pendidikan bisa berkualitas secara merata. Berbagai program berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan diluncurkan seperti: sekolah model, sekolah rujukan, hingga yang terakhir Program Sekolah Penggerak (Zamjani dkk., 2020).

Sebaik apapun desain program peningkatan mutu pendidikan, menjadi tidak berdampak ketika inisiatif perubahan yang didorong melalui program tersebut tidak tumbuh dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh para guru. Rendahnya kompetensi guru tampak pada studi-studi terkait kinerja guru ruang kelas. Zulfikar (2009) menunjukkan sebagian besar pembelajaran di Indonesia masih dijalankan dengan pendekatan yang berpusat pada guru. Selain rendahnya kompetensi, isu yang lebih mendasar adalah rendahnya inisiatif guru untuk terbuka terhadap perubahan. Secara umum hal ini tampak dari berbagai respons negatif setiap kali terjadi perubahan kebijakan pendidikan khususnya terkait kurikulum. Ungkapan yang sering muncul dalam penolakan itu adalah “ganti menteri ganti kurikulum”.

Di tengah gambaran yang memprihatinkan tersebut, dalam rangkaian studi evaluasi Program Sekolah Penggerak yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan satu contoh kasus dimana selama satu tahun implementasi program terjadi satu perubahan yang signifikan terutama dalam sikap guru untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Kasus tersebut ditemukan di SMP Puncak Kedel, pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan 1 Kabupaten Manggarai Timur. Peneliti tertarik menelisik bagaimana perubahan sikap guru tersebut dapat terjadi. Peneliti juga menguraikan kondisi spesifik apa yang melatarbelakangi perubahan sikap guru tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mendapatkan banyak inspirasi dari perspektif Foucault (1995) tentang *disciplinary power*. Untuk itu, pada bagian berikutnya akan diuraikan beberapa poin dari pandangan Foucault yang memengaruhi perspektif peneliti dalam studi ini.

METODOLOGI

Perspektif peneliti dalam melihat bagaimana sikap guru untuk terbuka terhadap perubahan ini tumbuh dan berkembang didasari pada konsep *disciplinary power* yang digagas oleh Michel Foucault (1995). *Disciplinary power* dapat beroperasi melalui pengawasan terhadap subjek yang dikontrol sehingga mereka merasa diamati secara terus menerus. Dalam konteks ini, pengawasan tidak harus dilakukan secara fisik dan kontinu, namun pada saat yang sama harus diketahui dan dirasakan secara terus menerus. Selanjutnya, strategi kuasa bekerja melalui normalisasi perilaku sehingga membentuk subjek yang disiplin dan patuh. Berbagai cara yang dilakukan kepala sekolah melalui diskusi, observasi, dan supervisi guru secara efektif menanamkan cara pandang dan membentuk perilaku guru untuk terbuka terhadap perubahan sebagai normalitas baru.

Studi ini dilakukan sejak 2021 hingga 2022. Dalam kurun dua tahun tersebut kami melakukan dua kali kunjungan lapangan ke SMPN Puncak Kedel, masing-masing dilakukan selama dua bulan. Namun demikian, di antara dua kali kunjungan lapangan tersebut kami tetap berkomunikasi dengan para informan dan mendapatkan update kondisi di SMPN Puncak Kedel baik melalui aplikasi percakapan, telepon, maupun secara langsung ketika para informan kami datang ke Jakarta dan Yogyakarta (domisili peneliti). Studi ini menerapkan beberapa teknik yang biasa digunakan dalam penelitian etnografi, seperti pengamatan partisipatif dan wawancara mendalam. Fokus pengumpulan data pada aspek kepemimpinan kepala sekolah dalam pembelajaran, yaitu terkait strategi kepala sekolah membangun relasi dengan para guru serta praktik-praktik supervisi dan pendampingan kepala sekolah kepada guru terkait pembelajaran. Penelitian ini juga melihat bagaimana implikasi kepemimpinan kepala sekolah ini melalui respons para guru. Dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh gambaran terkait dinamika dalam proses tumbuh dan berkembangnya sikap guru untuk terbuka terhadap perubahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SMPN Puncak Kedel merupakan salah satu sekolah yang berada di daerah 3T. Sebagaimana umumnya sekolah di daerah terpencil, SMPN Puncak Kedel menghadapi permasalahan keterbatasan sarana dan prasarana terutama pada akses jaringan internet. Hal ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran. SMPN Puncak Kedel adalah salah satu sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP) angkatan pertama di Kabupaten Manggarai Timur. Keterlibatan itu bermula dari inisiasi kepala sekolah berpartisipasi dalam seleksi Program Sekolah Penggerak di tahun 2021. Kepala sekolah bercerita bahwa keikutsertaannya adalah murni kemauan dirinya. Keterlibatannya didasari atas rasa ingin mengubah citra sekolah yang sebelumnya dikenal sebagai sekolah terpencil menjadi sekolah yang dapat dipertimbangkan.

Gaya kepemimpinan kepala sekolah berubah semenjak keikutsertaannya dalam Program Sekolah Penggerak. Kepala sekolah mulai mengambil keputusan berdasarkan refleksinya dengan guru dan menjadi lebih tegas dari sebelumnya. Dengan perubahan gaya kepemimpinan tersebut, hubungan kepala sekolah dan para guru menjadi lebih dekat.

Kepala sekolah melakukan pendampingan kepada guru terutama dalam penyiapan rencana pembelajaran maupun pelaksanaan pembelajaran di kelas. Pendampingan tersebut dilakukan dengan meminta guru menyiapkan dokumen perencanaan pembelajaran maupun melakukan observasi selama guru mengajar. Kepala sekolah memilih guru yang didampingi secara acak dan mendadak. Hal ini membuat guru harus selalu siap dalam pembelajaran. Dalam pendampingan tersebut kepala sekolah senantiasa mengoreksi jika ada guru yang dianggap menjalankan perannya dengan kurang baik. Perubahan motivasi dan sikap guru untuk lebih rajin mengajar tidak lepas dari sikap kepala sekolah yang lebih tegas dibandingkan tahun ajar sebelumnya dalam mengupayakan pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah ini.

Dalam perubahan kepemimpinan tersebut, terlihat adanya konsep *disciplinary power* yang berjalan sehingga menciptakan normalisasi guru untuk terbuka terhadap perubahan. Pendisiplinan tubuh terjadi pada SMPN Puncak Kedel. Kepala sekolah menjadi sosok kunci dalam pendisiplinan tersebut. Keteladanan serta praktik baik yang dinormalisasikan oleh kepala sekolah mampu membentuk normal baru bagi guru di satuan pendidikan ini. Guru merasa melakukan hal yang salah jika tidak mengikuti semangat dari kepala sekolah. Alasan keterbatasan sarana dan prasarana menjadi tidak relevan dengan normalisasi keadaan yang diciptakan oleh kepala sekolah.

Pendisiplinan guru juga terjadi ketika kepala sekolah melakukan supervisi pembelajaran bagi guru secara acak. Supervisi secara acak ini menimbulkan rasa diawasi bagi setiap guru. Guru mau tidak mau harus mempersiapkan administrasi pembelajaran hingga kegiatan pembelajaran di kelas. Selain itu, kepala sekolah memberlakukan pemberian reward and punishment kepada guru yang disupervisi. Salah satu guru mengaku sudah mendapatkan *reward* berupa uang dari kepala sekolah, ada pula guru yang mendapat *punishment* dengan mengulangi membuat administrasi pendidikan di hadapan kepala sekolah langsung.

Kasus tersebut relevan dengan pandangan Foucault mengenai model pendisiplinan tubuh Panoptikon. Supervisi acak menghadirkan perasaan diawasi oleh kepala sekolah kepada setiap guru. Sehingga mampu mendisiplinkan guru menjadi guru yang siap dengan perubahan dan tuntutan pendidikan nasional.

KESIMPULAN

Uraian di atas menunjukkan langkah inisiasi yang dilakukan kepala sekolah salah satunya dengan mengubah gaya kepemimpinan yang lebih reflektif dan demokratis. Perubahan gaya kepemimpinan ini membuat relasi dengan para guru menjadi lebih dekat. Perubahan gaya kepemimpinan kepala sekolah juga berimplikasi pada lebih efektifnya pendampingan yang dilakukan kepada guru.

Proses pendampingan kepala sekolah kepada guru menjadi ruang di mana pendisiplinan guru terbentuk. Pendampingan yang dilakukan secara acak dengan waktu yang tidak menentu membuat efek panoptik di mana guru harus senantiasa siap untuk di supervisi oleh kepala sekolah. Pendampingan juga menjadi ruang di mana kepala sekolah mengoreksi praktik-praktik pembelajaran yang dianggap tidak tepat. Dengan proses semacam inilah, terjadi perubahan sikap guru lebih

menerima perubahan-perubahan yang didorong oleh kepala sekolah.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang didapatkan dalam studi ini, maka rekomendasi yang diajukan untuk kepala sekolah adalah dengan berbagi praktik baik kepada satuan pendidikan lain agar satuan pendidikan lain mendapatkan referensi gaya kepemimpinan yang mampu mengantarkan kepada pembiasaan terhadap perubahan tuntutan pendidikan nasional.

PENGAKUAN

Tulisan ini berdasarkan pada temuan-temuan evaluasi proses dan konteks perubahan Program Sekolah Penggerak di Kabupaten Manggarai timur yang dilaksanakan pada 2021 dan 2022. Untuk itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), Badan Standar, Kurikulum, dan Akreditasi Pendidikan (BSKAP), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah membiayai keseluruhan proses penelitian tersebut. Serta kepada Dr. Suzie Handajani, M.A yang telah membimbing dan memberi masukan yang membangun pada tulisan ini.

REFERENSI

- [1] Zamjani, Irsyad dkk. (2020). Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- [2] Zulfikar, T. (2009). The making of Indonesian education: An overview on empowering Indonesian teachers. *Journal of Indonesian Social Science and Humanities*, 2, (13–39)
- [3] Foucault, M. (1995). *Discipline and Punish The Birth of the Prison*. New York: Vintage Book.



FELT
2023

FORUM ON EDUCATION
LEARNING TRANSFORMATION
INDONESIA

EXTENDED ABSTRACT

FORUM ON EDUCATION AND
LEARNING TRANSFORMATION

7-28 November 2023 | Sheraton Grand

<http://www.pendidikan.go.id>

oud

article33.id/id/id



**IMPLEMENTASI
KURIKULUM MERDEKA**

Tantangan Penerapan Kurikulum Merdeka: Karakteristik Guru dalam Beradaptasi dengan Kurikulum Baru

Lukman Solihin¹, Diyan Nur Rakhmah²

^{1,2} Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek
(E-mail: lukman.solihin84@gmail.com, diyan.rakhmah2@gmail.com)

Kata kunci: Kurikulum Merdeka; perubahan kurikulum; adaptasi guru; perubahan pembelajaran; pembelajaran berpusat pada murid

EXTENDED ABSTRACT

PENDAHULUAN

Krisis pembelajaran telah dialami oleh banyak negara berkembang termasuk Indonesia jauh sebelum pandemi COVID-19. Salah satu sebabnya karena negara-negara berkembang umumnya terlalu ambisius dalam menentukan target kurikulum tanpa mengindahkan kondisi siswa, sehingga kemajuan belajar justru berjalan lambat (Beatty dan Pritchett, 2012). Hasil evaluasi terhadap Kurikulum 2013 juga mengonfirmasi hal tersebut, di mana di satu sisi beban pelajaran yang harus dipelajari siswa terlalu banyak, sementara di sisi lain guru juga memaksakan diri untuk menuntaskan materi secara keseluruhan (Anggraena dkk., 2022). Kondisi tersebut turut memberi andil bagi capaian hasil belajar siswa Indonesia yang jauh dari harapan, seperti tergambar dari capaian hasil *Programme for International Student Assessment* (PISA) tahun 2018 yang berada di bawah rata-rata negara-negara OECD (Pusmendik, 2019).

Konteks inilah yang mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menawarkan implementasi Kurikulum Merdeka sebagai alternatif pemulihan pembelajaran bagi satuan pendidikan pada tahun ajaran 2022/2023 (Materi Paparan Merdeka Belajar Episode 15). Salah satu perbedaan mendasar dalam implementasi Kurikulum Merdeka dibandingkan dengan implementasi kurikulum sebelumnya adalah pemberian otonomi bagi satuan pendidikan dan guru dalam proses implementasinya. Dalam hal ini, implementasi Kurikulum Merdeka berupaya menumbuhkan dan menguatkan *agency* satuan pendidikan dan guru, alih-alih menerapkannya sebagai kebijakan yang *top-down* (Anggraena dkk., 2022).

Pada kurun 2022-2023, tercatat sejumlah 293.371 satuan pendidikan atau sekitar 69% dari seluruh satuan pendidikan di jenjang PAUD hingga pendidikan menengah telah menerapkan Kurikulum Merdeka secara sukarela (<https://kurikulum.kemdikbud.go.id/>). Jumlah tersebut menunjukkan tingginya animo dalam merespons kebijakan penerapan Kurikulum Merdeka. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa upaya pemulihan pembelajaran yang menjadi tujuan dari implementasi kurikulum ini dapat tercapai. Dalam hal ini, posisi guru menjadi penting dalam implementasi kurikulum: sejauh mana mereka memahami esensi kebijakan kurikulum yang baru, bagaimana mereka meningkatkan kapasitasnya, serta bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran (Desimone, 2002; Tichnor-Wagner, 2019; Gouédard dkk., 2020).

TUJUAN

Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk memahami karakteristik guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Pemahaman terhadap karakteristik tersebut penting diketahui agar intervensi kebijakan implementasi Kurikulum Merdeka dapat mencapai tujuannya.

METODOLOGI

Artikel ini memanfaatkan data kuantitatif yang diperoleh melalui survei nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), serta data kualitatif dari hasil wawancara dengan guru dan kepala sekolah di beberapa daerah. Pada Juli–Agustus 2023, PSKP melakukan survei kepada 8.279 satuan pendidikan pelaksana implementasi Kurikulum Merdeka yang masing-masing satuan pendidikan diwakili oleh satu orang kepala sekolah dan satu orang guru. Data survei diolah secara deskriptif guna mengetahui perkembangan implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Artikel ini juga memanfaatkan data hasil wawancara kepada kepala sekolah dan guru dan observasi pembelajaran di 10 daerah, guna mendalami proses implementasi yang dilakukan di tingkat satuan pendidikan. Observasi dilakukan pada salah satu sesi pembelajaran di kelas yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka, di mana guru yang bersangkutan kemudian diwawancarai. Sekolah-sekolah yang dikunjungi dipilih berdasarkan informasi dari dinas pendidikan, yakni sekolah yang sudah dianggap baik dalam implementasinya atau masih di taraf berkembang, data pemanfaatan dari dashboard PMM, serta mempertimbangkan keberadaan praktik baik yang telah dilakukan guru.

HASIL

Respons Positif terhadap Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka

Dari studi yang dilakukan, terlihat bahwa persepsi guru terhadap penerapan Kurikulum Merdeka relatif positif terkait beberapa hal. Pertama, sebagian besar guru (87,8%) menganggap bahwa Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan bagi mereka dalam melaksanakan pembelajaran, salah satunya karena pengurangan konten kurikulum. Kedua, sebagian besar guru (88,6%) juga setuju bahwa Kurikulum Merdeka mendorong terjadinya perbaikan proses pembelajaran. Ketiga, Kurikulum Merdeka juga dinilai guru (87,7%) memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Keempat, sebagai kebijakan yang relatif baru, guru menganggap bahwa berbagai sumber belajar dan panduan terkait Kurikulum Merdeka yang disediakan sudah cukup memadai dan membantu guru dalam memahami Kurikulum Merdeka (85,8%), membantu dalam merencanakan pembelajaran (86,4%), dan sudah sesuai dengan kebutuhan di jenjang satuan pendidikan yang diampu (85%).

Berbagai Kendala dalam Penerapan Kurikulum Merdeka

Dari sekian tanggapan yang disampaikan guru, tidak seluruhnya bernada positif. Masih ada guru yang merasa bahwa penerapan Kurikulum Merdeka memberatkan atau sama saja dengan kurikulum sebelumnya (28,9%). Hal yang menjadi catatan salah satunya soal administrasi yang membebani guru (45,2%). Beberapa guru yang diwawancarai mengeluhkan, selain perlu beradaptasi dengan paradigma baru yang diusung oleh kurikulum ini, secara teknis guru juga perlu mempelajari dan menyusun dokumen kurikulum.

Selain masalah administrasi, studi kualitatif yang dilakukan juga menemukan beberapa kendala yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. **Pertama**, keraguan guru terhadap pemahaman mereka mengenai implementasi Kurikulum Merdeka. Para guru yang telah mempelajari Kurikulum Merdeka tidak serta merta percaya diri dengan pemahamannya.

Kedua, pemahaman yang belum memadai disebabkan oleh belum tumbuhnya motivasi belajar secara mandiri serta semangat untuk memanfaatkan otonomi yang diberikan. Faktor intrinsik ini masih menjadi tantangan, di mana guru-guru belum memiliki kemauan untuk belajar melalui sumber yang telah disediakan pemerintah, seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM) maupun sumber-sumber belajar lainnya. Di samping itu, sebagian guru seperti menunggu arahan atau instruksi dalam pelaksanaan kurikulum, sehingga belum menyadari dan memanfaatkan otonomi yang diberikan melalui implementasi Kurikulum Merdeka.

Ketiga, minimnya dukungan eksternal, seperti kepemimpinan kepala sekolah, maupun pendampingan dan pelatihan dari pihak lain. Kepala sekolah belum memberikan dukungan berupa pelatihan atau membentuk komunitas belajar di sekolahnya, sehingga guru tidak mendapat peningkatan kapasitas yang memadai. Ditemukan pula sekolah yang mendapat pelatihan dan pendampingan dari Kelompok Kerja Guru (KKG) di tingkat gugus, sehingga guru memperoleh pemahaman yang memadai mengenai praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, namun jumlah dan jangkauannya jauh dari memadai dari jumlah sekolah dan guru yang ada.

Keempat, pemahaman yang belum baik kemudian berdampak pada sulitnya implementasi pembelajaran yang berpusat pada murid di dalam kelas. Pelaksanaan asesmen awal pembelajaran, pembelajaran berdiferensiasi, dan refleksi pembelajaran merupakan sekian hal yang sering disebutkan guru sebagai sesuatu yang sulit mereka lakukan. Ada kalanya guru mulai melakukan asesmen awal pembelajaran, namun belum memahami manfaat dari praktik tersebut untuk menyesuaikan pembelajaran. Begitu pula dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru belum sepenuhnya memberi perhatian pada keragaman kemampuan siswa, tetapi malah sibuk menyiapkan materi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa.

Karakteristik Guru dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka

Berpijak pada temuan studi yang telah dijelaskan sebelumnya, studi ini menemukan empat karakteristik guru dalam beradaptasi dengan kebijakan Kurikulum Merdeka (Gambar 1).

PRAKTIK MULAI BERKEMBANG Guru kurang memahami IKM, tetapi sudah mempraktikan	PRAKTIK BERKEMBANG BAIK Guru memahami IKM dan sudah mempraktikan
PRAKTIK BELUM BERKEMBANG Guru kurang memahami IKM dan belum mempraktikan	PRAKTIK BERPOTENSI BERKEMBANG Guru sudah cukup memahami IKM, tetapi belum mempraktikan

Gambar 1 Karakteristik Guru dalam Beradaptasi dengan IKM

Praktik Berkembang Baik, yaitu guru sudah memahami implementasi Kurikulum Merdeka dan sudah mempraktikkannya dalam pembelajaran. Guru dengan karakteristik ini umumnya memiliki motivasi belajar mandiri karena mendapatkan manfaat dari yang dipelajari. Guru juga memiliki kepercayaan diri terhadap kompetensi yang dimiliki, cara mengelola pembelajaran, dan berani melakukan terobosan atau inovasi.

Praktik Mulai Berkembang, di mana guru kurang memahami perbedaan Kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya, tetapi telah terbiasa menerapkan prinsip pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum Merdeka. Karakteristik kedua ini ditemukan pada guru-guru yang sudah mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari eksternal sebelum Kurikulum Merdeka diterapkan.

Praktik Berpotensi Berkembang, yaitu guru mulai memahami konsep dan tujuan implementasi Kurikulum Merdeka, tetapi belum mempraktikkannya dalam pembelajaran. Guru-guru dengan karakteristik ini umumnya menerima kebijakan penerapan Kurikulum Merdeka sebagai bentuk *compliance* dan belum termotivasi untuk memperbaiki pembelajaran.

Praktik Belum Berkembang, yaitu guru kurang memahami implementasi Kurikulum Merdeka dan praktik pembelajaran yang dilakukan belum berpusat pada murid. Guru yang berada pada karakteristik ini umumnya guru yang mengaku kurang nyaman terhadap perubahan kurikulum karena pernah mengalaminya beberapa kali. Akibatnya, guru menjadi enggan untuk mempelajari esensi perubahan dari transformasi kurikulum yang sedang berjalan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Merefleksikan beberapa temuan studi di atas, artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan otonomi dan agensi guru yang menjadi strategi implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan baik pada guru-guru yang memiliki motivasi tinggi. Sementara untuk guru-guru lainnya, diperlukan penguatan pendampingan dan ekosistem belajar, sehingga dapat menggerakkan guru untuk memahami dan mempraktikkan pembelajaran yang disarankan. Pelatihan di tingkat gugus, maupun komunitas belajar di sekolah, dapat menjadi fokus penguatan kompetensi guru agar implementasi kurikulum dapat meraih hasil yang diinginkan.

REFERENSI

- [1] Anggraena, Y., Felicia, N., Eprijum, D., Pratiwi, I., Utama, B., Alhapip, L., & Widiawati, D. (2021). *Kajian akademik: Kurikulum untuk pemulihan pembelajaran*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek.
- [2] Flanders, N. A. (1974). Interaction analysis: A technique for quantifying teacher influence. <http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED088855.pdf>
- [3] Göncz, L. (2017). Teacher personality: a review of psychological research and guidelines for a more comprehensive theory in educational psychology. *Open Review of Educational Research*, 4(1), 75–95, DOI: 10.1080/23265507.2017.1339572
- [4] Khonsa, N., Safitri, D., Sujarwo. (2023). Kesiapan guru dalam implementasi kurikulum merdeka (studi kasus SMP Negeri 137 Jakarta). *Journal on Education*, 6(1), 6908–6921.
- [5] Pusat Penilaian Pendidikan (Pusmendik). (2019). *Pendidikan di Indonesia: Belajar dari hasil PISA 2018*. Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Kemendikbud.

Upaya Meningkatkan *Self Management* dalam Belajar Berbasis Layanan Bimbingan Kelompok Berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Atas

Fuad Aminur Rahman

SMA Negeri 1 Cihara, Kabupaten Lebak, Banten, Indonesia
(E-mail: fuadrahman77@guru.sma.belajar.id)

Kata kunci: *self management*; layanan bimbingan kelompok; berdiferensiasi; Kurikulum Merdeka

EXTENDED ABSTRACT

PENDAHULUAN

Keterampilan manajemen diri ataupun *self management* dalam belajar pada peserta didik mencakup empat bentuk indikator tindakan yaitu motivasi diri, pengendalian diri, pengorganisasian diri dan pengembangan diri (Al-Qadri & Rahmi, 2022). Ada beberapa tujuan utama dalam penerapan *self management* bagi peserta didik, yakni (a) melakukan perubahan sikap; (b) memunculkan penerimaan diri; (c) membangun kesadaran; (d) berusaha untuk bertanggungjawab; (e) mengarahkan dalam memecahkan masalah; (f) berlatih untuk mencegah timbulnya permasalahan dari diri sendiri (Suwanto, 2016).

Self management dalam belajar juga mampu memberikan pengetahuan dalam mengendalikan diri (kontrol diri) (Fitriani dkk., 2021). Hasil catatan dan wawancara dengan Wali Kelas X dan Guru Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 1 Cihara menunjukkan masih ada beberapa siswa yang belum memiliki *self management* yang baik dalam belajar. Hal ini dilihat dari catatan kehadiran, kedisiplinan, dan hasil nilai tugas harian.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan sebagai upaya memberikan solusi untuk meningkatkan *self management* dalam belajar melalui layanan bimbingan kelompok berdiferensiasi menggunakan Kurikulum Merdeka bagi peserta didik kelas X di SMA Negeri 1 Cihara. Pemilihan solusi didasari pada beberapa alasan, yakni layanan bimbingan kelompok berdiferensiasi merupakan layanan yang dilakukan dengan strategi yang variatif, dengan tujuan membantu peserta didik dalam menata konsep diri serta menetapkan tujuan yang dikehendaki.

Penelitian lain juga menyatakan bahwa setelah dilaksanakannya layanan bimbingan kelompok dengan metode *self management*, peserta didik menjadi lebih bertanggung jawab dalam belajar, baik di sekolah maupun saat belajar secara mandiri. (Asmara, 2021).

TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bahwa layanan bimbingan kelompok berdiferensiasi dapat meningkatkan *self management* dalam belajar bagi peserta didik di SMA Negeri 1 Cihara.

METODOLOGI

Metode penelitian tindakan bimbingan dan konseling (PTBK) menjadi metode dalam penelitian ini. Subjek PTBK berjumlah 10 peserta didik dari kelas X SMA Negeri 1 Cihara. Terdiri dari tiga laki-laki dan tujuh perempuan. Waktu penelitian dimulai dari bulan Agustus sampai dengan bulan September 2023.

Kegiatan penelitian dirancang dalam dua siklus aksi. Pada tiap siklus, ada dua aktivitas layanan bimbingan kelompok berdiferensiasi dengan merujuk pada empat tahapan penting: perencanaan (*planning*), penerapan (*acting*), pemantauan (*observing*), serta refleksi (*reflecting*) (Suharsimi, 2013).

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus dan tanggal 21 Agustus 2023, sedangkan siklus II terdiri dari dua kali pertemuan, yakni pada 4 September dan 11 September 2023. Pelaksanaan bertempat di SMA Negeri 1 Cihara.

HASIL

Pada tahap perencanaan, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang juga merupakan guru BK adalah: 1) membuat RPL (Rencana Pelaksanaan Layanan) layanan bimbingan kelompok berdiferensiasi tentang Pentingnya *Self Management* dalam Belajar Bagi Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas; 2) mempersiapkan instrumen soal tes tentang *self management* dalam belajar serta lembar observasi atau pengamatan untuk mengamati aktivitas dan antusias peserta didik selama pemberian tindakan layanan bimbingan kelompok berdiferensiasi; 3) menetapkan subjek penelitian; 4) menyusun dan mempersiapkan daftar hadir; 5) mempersiapkan perlengkapan serta materi yang hendak dipakai sepanjang layanan bimbingan kelompok berdiferensiasi dilaksanakan.

Siklus I terdiri dari dua kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, kegiatan yang dilakukan adalah mengadakan diskusi dan menyampaikan pemahaman tentang konsep dasar manajemen diri (*self management*) dalam belajar, sekaligus pembagian kelompok.

Pada pertemuan kedua, setiap peserta didik diminta mengamati dan mengikuti diskusi yang disampaikan oleh guru bimbingan dan konseling. Kemudian masing-masing kelompok ditugaskan untuk mengamati tayangan video tentang manajemen diri (*self management*) dalam belajar. Setelah itu, peserta didik diminta membuat peta konsep terkait dengan isi materi, yang kemudian dipresentasikan. Terakhir, peneliti memberikan lembar soal tes tentang *self management* dalam belajar.

Dalam setiap pertemuan, dilakukan kegiatan observasi dengan memakai instrumen lembar observasi yang sudah disiapkan, serta dilaksanakan refleksi

siklus I.

Berikutnya pada siklus II, yang juga merupakan pertemuan ketiga, peserta didik diminta mencermati materi tentang *self management* dalam belajar yang disajikan oleh guru bimbingan dan konseling (BK) melalui *power point* dan video. Setelah itu, dibentuk kembali kelompok untuk mengerjakan tugas mencari konsep dan makna *self management* dalam belajar disertai contoh dari berbagai sumber yang relevan. Pada pertemuan terakhir, peserta didik diminta untuk menyampaikan tugas kelompok yang sudah diselesaikan, sementara peserta didik yang lain diminta untuk mengamati.

Pada setiap pertemuan dilakukan kegiatan observasi menggunakan lembar observasi, serta dilakukan refleksi pada siklus II. Refleksi dilakukan menggunakan instrumen pengukuran hasil *self management* dalam belajar, yang kemudian dianalisis serta ditafsirkan untuk memastikan hasil tindak lanjut.

Tabel 1 Data Hasil Observasi Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok Berdiferensiasi tentang Self Management dalam Belajar pada Siklus I (S-1)

Unsur	Pertemuan ke-			
	1	1	2	2
	(S-1) Aktivitas	(S-1) Antusias	(S-1) Aktivitas	(S-1) Antusias
1	40	40	41	42
2	42	44	44	46
3	45	51	46	52
4	53	53	55	55
Rata-rata skor	45	47	46,5	48,75

Berdasarkan Tabel 1, penerapan layanan bimbingan kelompok berdiferensiasi mengenai *self management* dalam belajar pada siklus I (S-1), menunjukkan adanya kenaikan angka dari setiap layanan yang dilakukan. Pada pertemuan awal di siklus I, bagian aktivitas menunjukkan angka 45, namun pada pertemuan kedua, terjadi kenaikan sebesar 1,5 poin menjadi 46,5. Sedangkan bagian antusias peserta didik, pada pertemuan satu menunjukkan angka 47, sementara pada pertemuan kedua terjadi kenaikan sebesar 1,75 poin menjadi angka 48,75.

Namun, hasil refleksi pada siklus ke-I belum masuk ke dalam kategori baik. Hal ini karena sebagian peserta didik masih belum begitu memahami pengertian dari *self management* dalam belajar, serta belum adanya perhatian khusus atau fokus dari beberapa peserta dalam mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok berdiferensiasi dengan baik. Sehingga, perlu dilakukan upaya perbaikan dalam kegiatan siklus II. Oleh karena itu, guru BK melanjutkan layanan dalam kegiatan siklus ke-II

Tabel 2 Data Hasil Observasi Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok Berdiferensiasi tentang Self Management dalam Belajar Pada Siklus II (S-II)

Unsur	Pertemuan ke-			
	1	1	2	2
	(S-I) Aktivitas	(S-I) Antusias	(S-I) Aktivitas	(S-I) Antusias
1	55	56	69	67
2	59	60	70	69
3	60	62	74	71
4	62	64	75	73
Rata-rata skor	59	60,5	72	70

Tabel 2 menampilkan informasi hasil observasi penerapan layanan bimbingan kelompok berdiferensiasi mengenai *self management* dalam belajar pada siklus II (S-II). Dari hasil tersebut terlihat adanya kenaikan angka dari setiap layanan yang dilakukan. Pada pertemuan awal siklus ke-II, bagian aktivitas menunjukkan angka 59. Setelah itu, pada pertemuan kedua, terjadi kenaikan sebesar 13 poin menjadi 72. Sedangkan untuk bagian antusias peserta didik, pada pertemuan satu menunjukkan angka 60,5, dan pada pertemuan kedua terjadi kenaikan sebesar 9,5 poin menjadi angka 70.

Hasil observasi penerapan layanan bimbingan kelompok berdiferensiasi mengenai *self management* dalam belajar membuktikan terdapat kenaikan nilai, dari awal pada pertemuan ke-1 siklus I di angka 45 menjadi 72 pada pertemuan ke-4 siklus ke II. Nilai ini sudah masuk dalam kategori baik. Sementara pada bagian antusias juga terjadi peningkatan dari angka 47 pada pertemuan ke-1 siklus I menjadi 70 pada pertemuan ke-4 siklus II, dan nilai ini pun sudah memenuhi kategori baik.

Terdapat juga peningkatan hasil skor tes pemahaman *self management* dalam belajar yang terjadi selama proses penelitian, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Data Hasil Tes Pemahaman *Self Management* dalam Belajar

Kegiatan	Pertemuan ke-	Kategori
Pra-tindakan	50	Cukup Baik
Pasca-Siklus I	63	Baik
Pasca-Siklus II	72	Baik

Pada Tabel 3 terlihat adanya kenaikan skor rata-rata pemahaman. Diamati dari pra-tindakan yang menunjukkan angka 50 pada kategori cukup baik, lalu pada pascasiklus I terjadi kenaikan 13 poin menjadi 63 dan masuk kategori baik, serta pada pascasiklus II terjadi kenaikan nilai sebesar 9 poin menjadi 72 yang masuk pada kategori baik.

KESIMPULAN

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok berdiferensiasi adalah hal yang dibutuhkan peserta didik di sekolah menengah atas, terlihat dari hasil tes dan observasi yang menunjukkan peningkatan dan pencapaian ke kategori baik.

REKOMENDASI

Perlu dikembangkan pedoman pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka di SMA secara komprehensif, baik dalam bentuk modul maupun buku panduan, sehingga dapat lebih memberikan akses kemudahan bagi guru bimbingan dan konseling dalam menerapkan layanan bimbingan dan konseling berdiferensiasi pada Kurikulum Merdeka di sekolah terutama mengenai *self management* dalam belajar.

REFERENSI

- [1] Al-Qadri, A., & Rahmi, A. (2022). Self management siswa dalam belajar online di SMAN 1 Kuantan Hilir. *Indonesian Research Journal on Education*, 2(2), 671-690.
- [2] Asmara, T. (2021). Meningkatkan tanggung jawab belajar melalui layanan bimbingan kelompok teknik self management. *Jurnal Prakarsa Paedagogia*, 4(1).
- [3] Fitriani, D.D., Pandini, J. K. R., & Chasani, S. (2021). Korelasi kontrol diri dengan kecanduan online game pada remaja. *NURSING ANALYSIS: Journal of Nursing Research*, 1(1), 1-8.
- [4] Suharsimi. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [5] Suwanto, I. (2016). Konseling behavioral dengan teknik self management untuk membantu kematangan karir siswa SMK. *JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia)*, 1(1), 1.

Model-Model Pembelajaran Kurikulum Merdeka yang Mengakomodir Keragaman Karakteristik Peserta Didik

Jenri Ambarita

Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Indonesia
(E-mail: jenriambarita7@gmail.com)

Kata kunci: model pembelajaran; pendidikan inklusif; karakteristik peserta didik; Kurikulum Merdeka

EXTENDED ABSTRACT

Salah satu prinsip dari Kurikulum Merdeka adalah menerapkan proses pembelajaran yang berkeadilan. Berkeadilan yang dimaksud adalah memberikan kesempatan belajar yang sama pada setiap individu dengan cara memfasilitasi keragaman karakteristik yang ada. Keragaman ini merupakan kenyataan dalam setiap kelas, karena setiap anak didik datang dengan kemampuan kognitif, kecenderungan gaya belajar, minat, dan latar belakang budaya yang sangat beragam (Andini, 2016). Dalam penelitiannya, Salsabila mengatakan bahwa tidak ada satu model pembelajaran yang sesuai atau tepat untuk semua karakteristik. Dengan demikian, dibutuhkan transformasi dari pembelajaran konvensional yang memandang semua peserta didik itu sama (Salsabila dkk., 2021). Model pembelajaran menjadi salah satu bagian penting untuk memastikan pembelajaran yang responsif terhadap karakteristik peserta didik.

Transformasi ini mencakup perubahan signifikan dalam cara memandang dan mendekati proses pembelajaran. Konsep pembelajaran inklusif menjadi kunci dalam menjawab tantangan keragaman karakteristik peserta didik (Wijaya & Supriyono, 2022). Ini berarti mengadaptasi strategi pengajaran dan materi agar sesuai dengan tingkat kemampuan, ragam kecenderungan gaya belajar bahkan minat bakat dari peserta didik. Oleh sebab itu, dalam proses pembelajaran, seorang guru harus memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik. Tomlinson menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan upaya untuk menyesuaikan proses pembelajaran di dalam kelas guna memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda-beda pada setiap siswa. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ini mencakup diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk (Tomlinson 2000).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan: 1. Mengidentifikasi karakteristik model pembelajaran kurikulum Merdeka di SMP Negeri 34 Banda; 2. Mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana model-model pembelajaran mampu mengakomodir keragaman karakteristik peserta didik; dan 3. Mendeskripsikan tantangan dan hambatan dalam menerapkan model pembelajaran yang inklusif dalam pembelajaran di SMP Negeri 34 Banda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada SMP Negeri 34 Banda sebagai studi kasus untuk menjelajahi rancangan dan implementasi model pembelajaran dalam konteks Kurikulum Merdeka.

Sebagai Sekolah Penggerak Angkatan 1, SMP Negeri 34 Banda menjadi contoh implementasi Kurikulum Merdeka yang inovatif dan sesuai dengan

semangat pengembangan potensi unik setiap peserta didik. Penelitian ini melibatkan kepala sekolah dan 11 guru bukan penggerak atau dewan komite pembelajaran dalam wawancara, observasi langsung di kelas, dan telaah dokumen modul ajar untuk memahami pemilihan dan pengembangan model pembelajaran di kelas inklusif. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, dan penelitian dilakukan pada bulan Agustus – September 2023. Hasilnya diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang keberhasilan model pembelajaran dengan mengakomodir keragaman peserta didik, serta memberikan pedoman bagi sekolah lain yang ingin menerapkan pendekatan serupa.

Diskusi Hasil Penelitian: Peserta didik dalam kelas terdiri dari 33 orang dengan gaya belajar kinestetik (11 orang), auditori (9 orang), dan visual (13 orang). Guru mempraktikkan empat model pembelajaran: *discovery learning*, *cooperatif learning*, *contextual learning*, dan *problem-based learning* dalam konteks Kurikulum Merdeka. *Discovery learning*, yang berfokus pada peserta didik dan pengalaman belajar aktif, diimplementasikan dengan sumber belajar beragam seperti video tutorial dan mikroskop. Model pembelajaran kontekstual menekankan keterkaitan dengan kehidupan nyata, dengan guru Bahasa Indonesia menggunakan model *contextual teaching and learning* (CTL) untuk mengajarkan teks prosedur. Meski upaya dilakukan untuk menyesuaikan materi dengan tingkat kemampuan, masih ada kekurangan dalam menyediakan Lembar Kerja Peserta Didik sesuai dengan kemampuan peserta didik.

Faktor Pendukung dan Penghambat: Faktor pendukung mencakup dukungan individual guru, penggunaan materi yang relevan dan kontekstual, serta modul pembelajaran yang mendukung diferensiasi. Faktor penghambat mencakup terbatasnya pengetahuan guru tentang keragaman peserta didik, keterbatasan keterampilan IT guru, resistensi siswa terhadap perubahan, dan ketidakmampuan mengukur kemajuan secara holistik. Pentingnya pelatihan tambahan bagi guru, kesadaran akan kebutuhan siswa, dan penggunaan evaluasi holistik menjadi kunci untuk mengatasi kendala-kendala ini.

Dalam menghadapi tantangan ini, guru perlu lebih memahami berbagai karakteristik peserta didik dan mendapatkan pelatihan teknologi. Siswa perlu didukung dan diberikan pemahaman mengenai manfaat perubahan dalam kurikulum. Evaluasi holistik juga harus diterapkan untuk mencerminkan kemajuan siswa secara menyeluruh. Kolaborasi antara guru, siswa, dan pihak sekolah menjadi kunci untuk mencapai pendidikan inklusif dan efektif bagi semua peserta didik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SMP Negeri 34 Banda menerapkan empat model pembelajaran: Kontekstual, *Discovery Learning*, *Think Pair Share* (TPS), dan *Problem Based Learning*. Penelitian menunjukkan implementasi model-model tersebut masih perlu dioptimalkan untuk memperhatikan lebih baik tingkat kemampuan siswa. Rekomendasi mencakup dukungan sekolah pada model inovatif, kolaborasi antar mata pelajaran, pengembangan kreativitas guru, pendekatan kolaboratif dalam kelas, dan pelatihan lebih lanjut.

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi, yaitu: 1) Sekolah perlu mendukung model pembelajaran inovatif oleh guru dengan memberikan sumber daya dan pelatihan, serta mendorong kolaborasi antar mata pelajaran untuk mengakomodir keragaman karakteristik peserta didik. 2) Guru perlu terus mengembangkan kreativitas

dalam merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, mempertimbangkan penggunaan pendekatan kolaboratif, seperti pembelajaran kelompok, untuk mempromosikan keterlibatan peserta didik, serta melanjutkan pelatihan dan pengembangan profesional dalam model-model pembelajaran yang diterapkan. 3) Pemangku kebijakan pendidikan perlu memberikan dukungan dan sumber daya kepada guru dalam menerapkan model pembelajaran inovatif, memfasilitasi kolaborasi antara guru-guru untuk berbagi pengalaman dalam mengakomodir keragaman karakteristik peserta didik. 4) Peneliti a. Penelitian Lebih Lanjut: Lanjutkan penelitian untuk memahami lebih dalam implementasi model pembelajaran dalam mengakomodir keragaman peserta didik. b. Identifikasi Praktik Terbaik: Fokus pada identifikasi praktik terbaik dalam penggunaan model pembelajaran untuk mengakomodir keragaman peserta didik.

REFERENSI

- [1] Ahdhianto, E., Marsigit, Haryanto, & Santi, N. N. (2020). The effect of metacognitive-based contextual learning model on fifth-grade students' problem-solving and mathematical communication skills. *European Journal of Educational Research*, 9(2), 753-764. <https://doi.org/10.12973/euler.9.2.753>
- [2] Ambarita, J. & Simanullang, P. S. (2023a). *Implementasi pembelajaran berdiferensiasi* (1st ed.). Penerbit Adab.
- [3] Ambarita, J., & Simanullang, P. S. (2023b). *Pengantar pembelajaran berdiferensiasi*. Penerbit Adab.
- [4] Andini, D. W. (2016). Differentiated instruction: Solusi pembelajaran dalam keberagaman siswa di kelas inklusif." *Jurnal Pendidikan Ke-SD-An* 2(3), 340-49.
- [5] Barlian, U. C., Solekah, S., & Rahayu, P. (2022). Implementasi kurikulum merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(12), 2105-2118. <https://doi.org/10.53625/joel.v1i12.3015>
- [6] Banerji, R., Agarwal, A., & Lakshman, S. (2020). Teaching at the right level: From concern with exclusion to challenges of implementation. *Paper commissioned for the 2020 Global Education Monitoring Report, Inclusion and Education*.
- [7] Hadi, S., & Bayu, Y. (2021). Membangun kerukunan umat beragama melalui model pembelajaran PAI berbasis kearifan lokal pada perguruan tinggi. *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 8(1), 23-36.
- [8] Kafa, S. K. Q. (2022). The influence of visual, auditorial and kinesthetic learning styles on the learning achievement of cancer fighting children. *Pedagogia: Jurnal Pendidikan*, 11(2), 89-98. <https://doi.org/10.21070/pedagogia.v11i2.1198>
- [9] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka. <https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/>.
- [10] Lubis, M. (2020). Peran guru pada era pendidikan 4.0. *EDUKA: Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis*, 4(2), 0-5. <http://dx.doi.org/10.32493/eduka.v4i2.4264>
- [11] Marlina. (2020). *Strategi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah inklusif*.
- [12] Masfuah, S., & Fakhriyah, F. (2021, June). Profile of student misconceptions: limited scale trial of diagnostic assessment development based on science literacy. *In Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1918, No. 5, p. 052080). IOP Publishing.

- [13] Nuranafi, D. A., & Rusnilawati. (2022). Efektivitas discovery learning menggunakan media pop-up book untuk meningkatkan hasil belajar dan keterampilan berpikir kritis. *Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(2), 239–260. <https://doi.org/10.31800/jtp.kw.v10n2.p239--260>.
- [14] Giang, P. N. T. (2022). Differentiated instruction approach: Characteristics and misconceptions. *Journal of Science*, 67(1). doi: 10.18173/2354-1075.2022-0002.
- [15] Abong, R. (2015). Konstelasi kurikulum pendidikan di Indonesia. *At-Turats*, 9(2), 37–47.
- [16] Salsabila, U. H., Utami, S. N., Zahra, A., Haikal, F., & Cahyono, A. (2021). Pengaruh penggunaan media belajar online selama pandemi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4412063>.
- [17] Permata, S. D., & Khusniyah, T. W. (2022). Pemanfaatan sumber belajar untuk meningkatkan literasi sains sekolah dasar (studi kasus di Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta). *Jurnal Pendidikan Modern*, 7(2), 75–81. <https://doi.org/10.37471/jpm.v7i2.431>
- [18] Sarie, F. N. (2022). Implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan model problem based learning pada siswa sekolah dasar kelas VI. *Tunas Nusantara, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 4(2), 492–498. doi: 10.34001/jtn.v4i2.3782
- [19] Selviana, A. (2023). Penggunaan lembar kerja peserta didik (LKPD) akuntansi berbasis problem based learning pada materi pokok jurnal penyesuaian terhadap peningkatan hasil belajar. *Jurnal Inovasi Pembelajaran dan Pendidikan Islam [JIPPI]*, 1(1). <https://doi.org/10.30596/jippi.v1i1.3>
- [20] Setiana, D. S., & Purwoko, R. Y. (2020). Analisis kemampuan berpikir kritis ditinjau dari gaya belajar matematika siswa. *Jurnal Riset Pendidikan Matematika*, 7(2), 163–77. <http://dx.doi.org/10.21831/jrpm.v7i2.34290>
- [21] Sumanti, V., Firman, F., & Ahmad, R. (2022). Peran guru dalam kebijakan Kurikulum Merdeka di sekolah. *Keguruan*, 10(2), 49–52.
- [22] Sundayana, R. (2016). Kaitan antara gaya belajar, kemandirian belajar, dan kemampuan pemecahan masalah siswa SMP dalam pelajaran matematika. *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika*, 5(2), 75–84.
- [23] Suwandi, S. (2022, July). Pedagogi genre dan siberlogi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di era digital untuk mewujudkan kompetensi multiliterasi siswa. In *Seminar Nasional Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Universitas Timor* (pp. 191–210).
- [24] Suyanti, S. (2019). Peran guru sejarah dalam pendidikan karakter di era Revolusi Industri 4.0. *FOUNDASIA*, 10(2). <https://doi.org/10.21831/foundasia.v10i2.27924>.
- [25] Syafitri, Y. (2022). *Program Sekolah Penggerak SMA Negeri 1 Kota Tual*. Kota Tual.
- [26] Tomlinson, C. A. (2000). Differentiation of instruction in the elementary grades. ERIC Digest.
- [27] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pemerintah Republik Indonesia.
- [28] Wijaya, M. M., & Supriyono, S. (2022). Pengembangan pendidikan inklusi: argumentasi dan tantangan di era modern. *MIMIKRI: Jurnal Agama dan Kebudayaan*, 8(2), 415–431.
- [29] Zhang, Z., Xu, H., Ke, G. Y., & Chen, K. (2022). Selecting online distribution modes for differentiated products in a platform supply chain. *Internasional Journal of Production Economics*, 244, 108384. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2021.108384>
- [30] Zunidar, Z., & Siagian, S. (2021). Development of contextual teaching learning model based on blended learning. In *Proceedings of the 6th Annual International Seminar on Transformative Education and Educational Leadership (AISTEEL 2021)*. Atlantic Press.



FELT
2023

FORUM ON EDUCATION
LEARNING TRANSFORMATION
INDONESIA

EXTENDED ABSTRACT

FORUM ON EDUCATION AND
LEARNING TRANSFORMATION

7-28 November 2023 | Sheraton Grand

<http://www.pendidikan.go.id>

oud

article33.id/id/id





**INOVASI
PEMBELAJARAN**

Pembelajaran Berbasis Tugas dan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi: Studi pada Kelas Desain Pembelajaran

Henry Yanto The

Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalada, Indonesia

(E-mail: heryyantothe@gmail.com)

Kata kunci: pembelajaran berbasis tugas; desain pembelajaran; refleksi pembelajaran; tes; non-tes; studi kasus

EXTENDED ABSTRACT

PENDAHULUAN

Keterampilan membaca kritis dan intensif sangat penting bagi mahasiswa. Dengan menguasai keterampilan ini, mahasiswa bisa menavigasi perubahan cepat yang dibawa oleh arus deras informasi. Keterampilan ini juga menjadi kunci bagi mahasiswa untuk memperoleh manfaat optimal dari sumber bacaan yang mereka telusuri. Membaca kritis tidak hanya menyangkut pemahaman teks, tetapi juga kemampuan mengorganisasi ide dan gagasan dari bahan bacaan, serta kemampuan mengeksplorasi makna yang tersirat di dalam bahan tersebut (Cárdenas, 2020).

Eksplorasi makna bacaan dan pesan-pesan di dalamnya merupakan suatu keterampilan yang dapat dipelajari. Keterampilan ini juga sekaligus melatih mahasiswa untuk mengevaluasi informasi, menganalisis informasi tersebut dari berbagai perspektif keilmuan, dan mengoreksi kekeliruan berpikir yang ada pada bacaan (Van dkk., 2022). Semua keterampilan tersebut merupakan bentuk pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi.

Konteks spesifik di mana keterampilan membaca kritis dan intensif dikembangkan pada penelitian ini adalah pada tugas di mata kuliah Desain Pembelajaran. Mahasiswa melakukan praktik desain dengan mempelajari kasus-kasus dari bacaan dan mengerjakan tugas. Interaksi mereka dengan modul yang disiapkan pengajar membantu mereka memahami prinsip-prinsip desain yang diterapkan dalam dunia nyata.

Tugas yang diberikan pada mata kuliah ini mendorong mahasiswa untuk membaca teks asli dalam bahasa Inggris. Jika menemukan kesulitan mahasiswa dapat menerjemahkannya dengan dukungan teknologi. Membaca teks berbahasa asing bisa memperkaya kemampuan berbahasa mereka mahasiswa (Ulanovich, 2015). Selain itu bacaan berbahasa Inggris juga menghadirkan perspektif budaya yang berbeda, meningkatkan kemampuan menganalisis ide dari sudut pandang global.

Kombinasi membaca teks dalam bahasa Inggris dan menganalisis kasus dalam bahasa Indonesia membantu mahasiswa melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi (Ulanovich, 2015). Kombinasi kegiatan membaca dan tugas ini mengasah kemampuan siswa untuk membuat sintesis informasi dari dua bahasa

dan konteks berbeda, mempersiapkan mereka untuk menghadapi kondisi nyata dalam lingkungan belajar yang multikultural (Priya & Jayasridevi, 2018).

TUJUAN

Fokus penelitian ini ada pada efektivitas implementasi pembelajaran berbasis tugas dalam mata kuliah Desain Pembelajaran bagi mahasiswa Program Studi Kependidikan Agama Buddha di Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Nalanda. Dengan memadukan bacaan dalam bahasa Inggris dan tugas dalam bahasa Indonesia, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi hubungan antara tugas terstruktur dan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam memahami dan menerapkan model desain pembelajaran. Kontribusi penelitian ini tidak hanya bagi STAB Nalanda, namun juga memberikan inspirasi dan panduan bagi lembaga pendidikan lain agar dapat secara efektif mengasah pemikiran kritis dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi pada mahasiswa.

METODOLOGI

Studi kasus ini dilakukan pada kelas belajar daring mata kuliah Desain Pembelajaran di STAB Nalanda. Pengumpulan data dilakukan pada pertemuan keempat, saat perkuliahan dilakukan secara asinkron melalui Google Kelas dan WhatsApp. Dari 57 mahasiswa terdaftar, 47 mahasiswa menyelesaikan tugas dan hasil kerja inilah yang menjadi sumber data. Instrumen pengumpulan data terdiri dari Google Formulir yang berisi 17 pertanyaan dalam sebuah tes dan 2 pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka dianalisis secara kualitatif menggunakan QDA Miner. Perangkat lunak ini membantu dalam membedah tanggapan mahasiswa terkait pemahaman dan refleksi terhadap tugas. Analisis data terpusat pada tema membaca kritis dan tantangan belajar, dengan bantuan QDA Miner untuk visualisasi dan pemrosesan data.

Bahan Ajar, Tugas, dan Capaian Belajar

Mahasiswa diberi modul bacaan multimodal dalam bahasa Inggris sebagai bagian dari pembelajaran berbasis tugas (*Task-Based Learning*). Modul belajar dirancang dengan foto, diagram, dan teks untuk maksimalkan efektivitas informasi dan estetika desain. Disampaikan sebagai dokumen pdf melalui Google Kelas, modul ini disertai instruksi tugas yang jelas untuk mencapai tujuan belajar. Soal diberikan melalui Google Formulir, di mana bagian konsep dan aplikasi dinilai otomatis untuk umpan balik cepat. Mahasiswa dapat mengerjakan soal tiga kali, memanfaatkan umpan balik untuk peningkatan. Tugas terdiri dari 17 pertanyaan objektif dan dua pertanyaan refleksi terbuka, menguji pengetahuan dan keterampilan analitis mahasiswa dengan berbagai jenis pertanyaan, termasuk melengkapi teks tulisan dan menganalisis gambar. Tes ini memberikan penilaian komprehensif terhadap pemahaman mahasiswa.

Evaluasi

Mahasiswa melakukan pemeriksaan kesiapan sebelum menjawab bagian inti tugas. Sebagian kecil (8,5%) yang tidak siap tetapi telah klik tautan langsung, menyadari keterbatasan waktu. Bagian pertama fokus pada melengkapi teks

mengenai model desain instruksional ADDIE dan *Backward Design*. Rata-rata akurasi mahasiswa mencapai 71,82%, dengan pertanyaan 10.1 memiliki akurasi terendah (40,4%) karena kesalahan memahami ekspektasi pembelajaran. Bagian kedua menguji pemahaman melalui diagram model desain instruksional Merrill, menunjukkan penurunan akurasi, rata-rata (64,52%). Pertanyaan 17 mencatat akurasi terendah (36,3%) karena kata “tidak” membingungkan. Namun, pertanyaan 16 memiliki akurasi tertinggi (100%) karena langkah-langkah penerapan jelas tergambar. Analisis tugas ini memberikan wawasan tentang pemahaman dan penerapan model desain instruksional serta menggambarkan efektivitas mata kuliah Desain Instruksional pada mahasiswa.

Refleksi Belajar dan Tantangan

Penggunaan QDA Miner untuk menganalisis jawaban terbuka mahasiswa dimulai dengan pembuatan awan kata-kata. Melalui awan kata-kata, kata kunci yang sering muncul diidentifikasi untuk proses pemberian kode. Jawaban dibagi menjadi dua kategori dengan masing-masing kode yang didefinisikan secara operasional. Pengkodean dilakukan dengan membaca pernyataan tiga kali dan mewarnai segmen jawaban di QDA Miner. Mahasiswa menekankan membaca intensif dengan strategi seperti “cermati, pahami, teliti”, memperkuat pemahaman dengan “membuat saya bisa mengintegrasikannya dengan konsep”, dan repetisi membaca. Tantangan utama dalam tugas adalah waktu, proses alih bahasa, dan koneksi. Kesimpulan dari pernyataan mahasiswa memberikan wawasan untuk penyesuaian pengajaran yang inklusif dan personal. Informasi ini membantu pengajar memahami perbedaan capaian mahasiswa dan mengidentifikasi kebutuhan yang beragam.

PEMBAHASAN

Penggunaan bahan ajar, pemberian tugas mahasiswa, dan penentuan capaian belajar yang ada pada penelitian ini didukung oleh teori pendidikan. Modul bacaan komprehensif berbasis multimodal mengacu pada teori konstruktivisme, memungkinkan siswa membangun pengetahuan melalui akses terhadap beragam sumber informasi dan fitur visual (Alismaiel dkk., 2022). Pendekatan pembelajaran berbasis tugas sesuai dengan prinsip konstruktivisme sosial, memberikan siswa peran aktif dalam pembelajaran. Tugas melibatkan pertanyaan objektif dan refleksi, mendorong pemahaman konsep dan pemikiran siswa. Evaluasi menunjukkan variasi capaian mahasiswa, dijelaskan oleh teori diversifikasi pembelajaran (Handa, 2019). Penggunaan Google Formulir untuk melakukan umpan balik langsung terhadap proses pembelajaran, sementara analisis refleksi menyoroti gaya belajar dan hambatan individu. Temuan ini mendukung prinsip konstruktivisme dan diversifikasi pembelajaran, menekankan pentingnya umpan balik langsung, dan memberikan wawasan pada kebutuhan individual siswa. Ini membentuk dasar untuk merancang pengalaman belajar yang lebih efektif dan inklusif.

KESIMPULAN

Pendekatan tugas dengan modul visual berbahasa Inggris dan platform digital efektif meningkatkan pemahaman desain instruksional. Konstruktivisme terbukti relevan, melibatkan siswa dalam pemecahan masalah dan pemahaman konsep. Evaluasi memperlihatkan variasi kemampuan, menekankan diversifikasi pembelajaran. Refleksi siswa menggarisbawahi kebutuhan pendekatan inklusif. Temuan ini penting bagi pengembangan pembelajaran lebih inklusif dan efektif bagi mahasiswa.

REKOMENDASI

Pendekatan tugas dan modul bacaan komprehensif dalam bahasa Inggris dengan platform digital dapat menjadi fasilitator belajar untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Diversifikasi strategi pembelajaran dan penilaian adalah kunci keberhasilan. Selain itu juga sangat penting untuk memberikan pilihan tugas sesuai gaya belajar siswa. Akses internet yang menjadi masalah juga harus diantisipasi sejak awal. Implementasi rekomendasi ini akan meningkatkan kualitas pembelajaran, mendukung pengembangan keterampilan, dan menciptakan pengalaman belajar yang inklusif.

REFERENSI

- [1] Alismaiel, O. A., Cifuentes-Faura, J., & Al-Rahmi, W. M. (2022). Online learning, mobile learning, and social media technologies: An empirical study on constructivism theory during the COVID-19 pandemic. *Sustainability (Switzerland)*, 14(18). <https://doi.org/10.3390/su141811134>
- [2] Priya, T. A., & Jayasridevi, B. (2018). Integrating translation in classroom: *Facilitating language skills. In Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 10(1). <https://doi.org/10.21659/rupkatha.v10n1.13>
- [3] Handa, M. C. (2019). Leading Differentiated Learning for the Gifted. *Roeper Review*, 41(2). <https://doi.org/10.1080/02783193.2019.1585213>
- [4] Cárdenas, A. I. (2020). Enhancing reading comprehension through an intensive reading approach. *HOW*, 27(1). <https://doi.org/10.19183/how.27.1.518>
- [5] Ulanovich, O. I. (2015). Understanding of the original text while translating: Phenomenological aspects. *Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Filologiya*, 33(1). <https://doi.org/10.17223/19986645/33/7>
- [6] Van, L. H., Li, C. S., & Wan, R. (2022). Critical reading in higher education: A systematic review. *Thinking Skills and Creativity*, 44. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2022.101028>

Peningkatan Keterampilan Berbicara dan HOTS Siswa pada Pembelajaran Bahasa Inggris di Sekolah 3T melalui Permainan Papan Ludo

Muttahidah

Universitas Negeri Malang, Indonesia
(E-mail: muttahidah.2202218@students.um.ac.id)

Kata kunci: bahasa Inggris; keterampilan berbicara; HOTS; papan ludo; sekolah 3T

EXTENDED ABSTRACT

PENDAHULUAN

Pembelajaran bahasa Inggris fase D dalam Kurikulum Merdeka mengharuskan siswa untuk tidak hanya mengembangkan kemampuan komunikatif, salah satunya berbicara, namun juga kemampuan bernalar kritis atau berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skill*-HOTS) (Kemendikbudristek, 2022). Masih lemahnya kemampuan berbicara dan HOTS siswa di SMPN 1 Mauponggo Satap, yang mana masih dikategorikan sebagai sekolah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), mendorong guru untuk menemukan metode atau media yang tepat dalam pembelajaran. Salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris adalah permainan. Menurut Nguyen dan Pham (2018), permainan dapat memantik semangat siswa untuk berkompetisi, sehingga mereka dapat berlatih berbicara secara alami dengan teman. Terdapat beberapa jenis permainan yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris, salah satunya adalah permainan papan (*board game*). Melalui permainan papan, siswa dapat secara bergantian mengutarakan ide dan gagasan sesuai dengan instruksi yang diberikan (Barton dkk., 2018; Mangaleswaran & Aziz, 2019). Permainan papan dapat dimodifikasi menjadi beberapa permainan, salah satunya Ludo. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan HOTS siswa SMP Negeri 1 Mauponggo Satap pada kelas VII melalui permainan papan Ludo.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan mengadaptasi Classroom Action Research model dari Kemmis dan Mc Taggart (1992). Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus di mana di tiap siklus terdiri dari tiga tahapan, yakni Perencanaan, Pelaksanaan, dan Refleksi. Dua puluh siswa kelas VII (Fase D) di SMPN 1 Mauponggo Satap, terdiri dari dua belas siswa perempuan, dan delapan siswa laki-laki menjadi subjek dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tes dan observasi. Tes yang diujikan adalah penilaian keterampilan berbicara siswa. Di samping tes, hasil observasi melalui catatan lapangan juga digunakan dalam penelitian ini. Catatan lapangan digunakan untuk mengamati keterampilan HOTS siswa saat pembelajaran bahasa Inggris menggunakan permainan papan Ludo yang berfokus pada kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta.

Indikator keberhasilan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) siswa untuk penilaian keterampilan berbicara dengan nilai ≥ 71 (Cukup) dan nilai rata-rata mereka meningkat di tiap siklus. Selain itu, kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) mereka terlihat saat pengamatan selama pembelajaran.

HASIL

1. Kondisi Awal (Pra-Siklus)

Pada tahap pra-siklus, guru melakukan pembelajaran berbicara bahasa Inggris menggunakan metode role play. Materi yang diajarkan adalah teks transaksional dan interpersonal lisan pendek dan sederhana dalam menyapa, berkenalan, dan berpamitan. Pada akhir pembelajaran, hasil penilaian berbicara menunjukkan bahwa hanya beberapa siswa yang mendapatkan nilai tuntas. Berikut nilai rata-rata keterampilan berbicara siswa pada tahap pra-siklus.

Tabel 1 Nilai Rata-rata Keterampilan Berbicara Siswa pada Kondisi Awal

Kriteria	Pra-Siklus
Pra-tindakan	50
Pasca-Siklus I	63
Pasca-Siklus II	72

Pada Tabel 1 terlihat bahwa nilai rata-rata siswa pada kondisi awal adalah 66,6 dengan nilai tertinggi siswa 74 dan nilai terendah 58. Hal ini juga menunjukkan bahwa masih ada siswa yang belum tuntas, sehingga perlu ada perbaikan. Selain itu, kemampuan HOTS siswa saat pra-tindakan atau pra-siklus, seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta juga belum terlihat selama pembelajaran. Mereka masih terlihat menghafal dan meniru ucapan pada percakapan yang telah dicontohkan dan tidak sesuai dengan situasi yang diberikan.

2. Deskripsi Siklus I & II

Pada pembelajaran di siklus 1 dan 2, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan dibagikan papan Ludo dengan beberapa kotak nomor. Mereka kemudian berdiskusi membuat pertanyaan yang berkaitan dengan ungkapan menyapa, berkenalan, dan berpamitan dilanjutkan dengan memberikan umpan balik kepada kelompok lain. Berikut perbandingan nilai rata-rata siswa pada tiap siklus.

Tabel 2 Perbandingan Nilai Rata-Rata Keterampilan Berbicara Siswa pada Tiap Siklus

Kriteria	Pertemuan ke-	Nilai Siklus I	Nilai Siklus II
Nilai Tertinggi	74	82	86
Nilai Terendah	58	60	72
Nilai Rata-Rata	66,6	70,5	77,8

Pada Tabel 2 terlihat bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan pada tiap siklus. Nilai tertinggi siswa naik dari 74 di pra-siklus, menjadi 82 di siklus I, dan 86 saat siklus II. Sementara itu, pada pra-siklus dan siklus I, nilai terendah siswa masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), yaitu 58 dan 60, dan meningkat pada siklus II menjadi 72. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini memenuhi indikator keberhasilan pertama, yaitu semua siswa mendapatkan nilai ≥ 71 . Keberhasilan penelitian ini juga terlihat pada kenaikan nilai rata-rata siswa di tiap siklus, dari 66,6 ke 70,5, dan meningkat menjadi 77,8.

Hasil pengamatan saat pembelajaran menunjukkan bahwa siswa terlihat sangat antusias dan aktif selama pembelajaran. Pada saat diskusi kelompok dan membuat pertanyaan, siswa telah menunjukkan kemampuan HOTS mereka, yaitu mencipta. Siswa juga merasa senang saat diminta memodifikasi aturan pada permainan papan Ludo. Mereka juga terlihat lebih percaya diri saat berbicara. Siswa juga mampu menganalisis dan mengevaluasi ungkapan-ungkapan yang termasuk dalam menyapa, berkenalan, dan berpamitan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan permainan papan Ludo dalam pembelajaran bahasa Inggris dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Hal ini terbukti dari peningkatan nilai rata-rata siswa di tiap siklus. Penelitian ini sejalan dengan Fithriani (2018) bahwa permainan papan Ludo dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Selain itu, pada saat pembelajaran menggunakan permainan papan Ludo, siswa dapat memperkaya pengetahuan kosa kata mereka yang mana penting dibutuhkan saat berbicara (Badriyatin dkk., 2022). Di samping itu, penggunaan permainan papan Ludo terutama saat memodifikasi kartu soal ini juga dapat mengasah keterampilan HOTS siswa, seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwarsi dkk. (2018) yang menyatakan bahwa penggunaan kartu soal dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan kreatif.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penggunaan permainan papan Ludo dalam penelitian ini memberikan hasil yang signifikan kepada siswa. Selain kemampuan berbicara siswa meningkat, kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti mengevaluasi dan mencipta dapat terasah dengan baik. Permainan papan Ludo memberikan kesempatan kepada

siswa untuk mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, yang juga sekaligus meningkatkan motivasi dalam berbicara. Di penelitian selanjutnya, pengembangan media pembelajaran papan Ludo dapat diintegrasikan dengan penggunaan teknologi melalui aplikasi berbasis komputer maupun digital. Hal ini sesuai dengan pembelajaran abad 21 di mana penggunaan teknologi secara masif dimanfaatkan dalam pembelajaran.

REFERENSI

- [1] Badriyatin, F. E., Supriyono, & Aini, M. R. (2022). Integrated flashcard and ludo vocabulary learning game to increase vocabulary achievement of the first grade of junior high school: Research and development. *JARES (Journal of Academic Research and Sciences)*, 7(1), 11–18. <https://doi.org/10.35457/jares.v7i1.1856>
- [2] Barton, E. E., Pokorski, E. A., Sweeney, E. M., Velez, M., Gossett, S., Qiu, J., Flaherty, C., & Domingo, M. (2018). An empirical examination of effective practices for teaching board game play to young children. *Journal of Positive Behavior Interventions*, 20(3), 138–148. <https://doi.org/10.1177/1098300717753833>
- [3] Fithriani, R. (2018). Communicative game-based learning in EFL grammar class: Suggested activities and students' perception. *JEELS (Journal of English Education and Linguistics Studies)*, 5(2), 171–188. <https://doi.org/10.30762/jeels.v5i2.509>
- [4] Kemendikbudristek. (2022). SK Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No.008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/kurikulum-merdeka/capaian-pembelajaran>
- [5] Kemmis, S., & McTaggart, R. (1992). *The action research planner (3rd ed.)*. Geelong, Australia: Deakin University Press.
- [6] Mangaleswaran, S. & Aziz, A. A. (2019). The impact of the implementation of CLT on students' speaking skills. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 9(4), 75–82. <http://dx.doi.org/10.29322/IJSRP.9.04.2019.p8814>
- [7] Nguyen, T. M. A., & Pham, V. P. H. (2018). Improving EFL students' speaking performance by using games in the classroom. *Proceedings from Conference: Teaching and Learning English as Job Requirements in the Modern Age*. Ho Chi Minh, Vietnam: Van Lang University. <https://www.researchgate.net/publication/327835311>
- [8] Suwarsi, Zaenal, M., & Ardhi, P. (2018). Meningkatkan keterampilan HOTS siswa melalui permainan kartu soal dalam pembelajaran PBL. *Prisma 1, Prosiding Seminar Nasional Matematika* (248–255). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/prisma>

Menjadi Guru yang Efektif dengan *Teaching Mastery Framework* (TMF): Kerangka Peningkatan Kualitas Pengajaran

Zulfikar Alimuddin¹, Sauqina²

^{1,2} HAFECS, Yayasan Hasnur Centre, Indonesia

(E-mail: z.alimuddin@hasnurcentre.org, sauqina@hasnurcentre.org)

Kata kunci: Teaching Mastery Framework (TMF); Pedagogical Content Knowledge (PCK); Higher Order Thinking Skill (HOTS); kualitas pengajaran

EXTENDED ABSTRACT

PENDAHULUAN

Melakukan transformasi pendidikan membutuhkan pandangan yang luas dan mendalam tentang praktik pendidikan itu sendiri untuk mengetahui apakah transformasi yang dituju sudah tepat. Sebuah *framework* diperlukan untuk memberikan struktur, arah, dan konsistensi pada praktik pendidikan untuk menuju peningkatan performa (Danielson, 2007). Dalam bukunya, *Enhancing Professional Practice: A Framework for Teacher*, Danielson menguraikan bahwa dengan adanya *framework* yang terstruktur, guru dapat lebih memerhatikan dan mengenali berbagai aspek yang ada dalam kompleksitas praktik mengajar. *Teaching Mastery Framework* (TMF) adalah kerangka peningkatan kualitas pengajaran guru yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan sekolah yang pada saat itu masih kesulitan dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas yang berpusat pada kebutuhan belajar siswa.

TMF dikembangkan melalui proses implementasi, revidi, dan evaluasi secara berkelanjutan di Global Islamic Boarding School (GIBS). TMF dikembangkan untuk menjawab sejumlah masalah dalam praktik pendidikan di GIBS dan selanjutnya sekolah lain di Indonesia (Hapsari dkk., 2019). Beberapa masalah tersebut yakni masih rendahnya kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran dan teknik pengajaran di kelas. Dalam hal pengelolaan pembelajaran, masalah yang umum ditemukan yakni guru yang terlalu fokus dalam menuntaskan materi ajar untuk menyelesaikan tuntutan kurikulum. Hal ini berakibat terhadap rendahnya kualitas interaksi antara guru dan siswa di kelas. Kondisi ini jelas menjadi masalah, sebab proses pembelajaran menjadi membosankan dan tidak menarik, materi mudah terlupakan, dan peserta didik menjadi pasif (Indriani dkk., 2021).

Selain itu, dalam hal cara mengajar guru, guru masih terlalu fokus pada konsep dan materi sehingga belum melaksanakan pembelajaran yang kontekstual. Akibatnya siswa mempelajari hal-hal abstrak dengan istilah-istilah yang asing sehingga menghambat proses belajarnya (Shulman dkk., 2020). Di sisi lain, guru yang terlalu fokus pada penyelesaian materi cenderung menjadi tidak responsif terhadap kebutuhan dan masalah siswa yang beragam. Padahal setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama (Mahfudz, 2023). Kurangnya respons interaksi bermakna antara guru dan siswa dapat menimbulkan sifat pasif dan apatis pada siswa

yang akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya proses belajar, salah satunya kemampuan berpikir kritis siswa (Nurdyansyah & Fitriyani, 2018).

Teaching Mastery Framework (TMF) dikembangkan dengan mempertimbangkan tiga tahapan yang harus dilakukan untuk terwujudnya praktik pengajaran yang efektif dan mengantisipasi munculnya masalah di kelas. Untuk itu, maka TMF dikembangkan dengan tiga tahapan sirkular, yang dimulai dari tahap perencanaan, eksekusi, dan evaluasi. Dalam tiga tahapan tersebut, terdapat delapan aspek utama yang secara teoritis dapat menyelesaikan masalah yang diuraikan di atas. Aspek tersebut yakni: *Pedagogical Content Knowledge* (PCK), *Higher Order Thinking Skill* (HOTS), *Lesson Plan*, *Teaching Tactics*, *Classroom Management*, *Soft Skill*, *Teaching Scenario*, dan *Teaching Grading*. Implementasi TMF di sekolah GIBS merupakan suatu kerangka menjaga kualitas pengajaran yang melibatkan pihak guru serta manajemen sekolah sebagai suatu komunitas belajar yang terus aktif meningkatkan kemampuan mengajar di kelas.

Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari dilaksanakannya Program Organisasi Penggerak (POP) tingkat SMP yang dilaksanakan oleh HAFECS. POP oleh HAFECS menggunakan kurikulum yang disusun berdasarkan aspek-aspek yang ada pada TMF. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi peranan TMF dalam meningkatkan pengetahuan guru dalam mengajar, khususnya ketika diberikan dalam pelatihan pengembangan profesionalitas guru SMP. Metode penelitian ini yakni kuasi eksperimen dengan *one group pretest post-test design*. Sampel penelitian ini sebanyak 110 guru SMP negeri dari 11 sekolah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Sampel tersebut merupakan 55% dari peserta POP oleh HAFECS untuk tingkat SMP.

Penelitian menunjukkan bahwa setelah diberikan pelatihan tentang pelaksanaan TMF secara daring sebanyak 2 kali seminggu selama 5 bulan, pengetahuan guru tentang teknik mengajar dengan memperhatikan PCK dan teknik mengajarkan materi HOTS kepada siswa meningkat secara signifikan setelah diuji dengan uji Wilcoxon (Sig. 0,000). Kemudian setelah diberikan jeda selama 3 bulan, pengetahuan tentang teknik mengajar yang didapat terus bertahan (Sig. 0,301) sedangkan pengetahuan tentang teknik mengajar HOTS mengalami penurunan dengan beda (Sig. 0,046). Namun setelah kembali diberikan pelatihan tentang TMF selama 3 bulan, kedua pengetahuan tersebut kembali meningkat secara signifikan uji (Sig. 0,000).

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka dapat terlihat bahwa setelah diberikan pelatihan dengan materi yang disusun berdasarkan TMF, maka pengetahuan guru tentang mengajar dengan memperhatikan PCK dan teknik mengajarkan materi HOTS dapat meningkat. Selain itu, juga dapat terlihat bahwa pelatihan yang dilaksanakan secara rutin dengan materi yang mencakup perspektif utuh tentang kerangka pengajaran efektif (TMF) dapat meningkatkan pengetahuan guru tentang mengajar menggunakan PCK dan teknik mengajarkan materi HOTS.

Teaching Mastery Framework disusun sebagai suatu kerangka yang dirancang agar dapat menjadi acuan praktis bagi guru dalam merealisasikan suatu pengajaran yang efektif. Adanya suatu kerangka yang mampu memberikan struktur atas tugas guru sebagai pengajar di kelas dapat membantu guru yang telah berpengalaman untuk mengenali kemampuan serta potensialnya.

Tiga tahapan terwujudnya pengajaran yang efektif oleh TMF dimulai dari tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan tersusun atas tiga aspek, yakni PCK, HOTS, dan *lesson plan*. PCK sebagai aspek pertama yang perlu dikuasai oleh guru, terdiri atas gabungan dari sekurang-kurangnya tujuh pengetahuan menurut Shulman (1987) yakni pengetahuan pedagogis, pengetahuan konten (materi ajar), pengetahuan tentang kurikulum, pengetahuan tentang belajar dan pembelajar, tujuan, sasaran dan evaluasi pendidikan, pengetahuan kontekstual, dan pengetahuan tentang konteks pendidikan secara umum. Dengan menguasai ketujuh pengetahuan ini dan menjadikannya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan saat merencanakan pembelajaran dalam kelas, maka seseorang dikatakan telah memiliki PCK (Morine-Dersheimer & Kent, 1999; Shulman, 1987).

Data di atas juga menunjukkan bahwa adanya jeda dapat menurunkan tingkat retensi pada pengetahuan tertentu, dalam penelitian ini yakni tentang teknik mengajarkan materi HOTS. Namun, jika guru kembali dikondisikan ke dalam lingkungan belajar dengan materi yang masih berdasar pada konsep yang sama, maka pengetahuan tersebut dapat dikuatkan kembali, dan peningkatan pengetahuan secara signifikan masih dapat terjadi. Penelitian ini sejalan dengan pandangan yang menekankan pentingnya para profesional, termasuk guru, untuk terus berada di lingkungan yang mendukung proses belajar sebagai upaya untuk meningkatkan performa kerja (Mash & Edwards, 2020).

Transformasi pendidikan akan sulit terlaksana tanpa adanya arah yang jelas dan kesepakatan tentang transformasi praktik pendidikan seperti apa yang diinginkan. Tulisan ini memberikan penekanan atas pentingnya guru di Indonesia untuk memiliki suatu kerangka kerja atau *framework* pengajaran efektif yang dapat menjadi acuan oleh guru secara kolektif dalam melaksanakan pengajarannya. Walaupun selama ini guru di Indonesia mengajar tanpa mengacu kepada *framework* tertentu, adanya *framework* seperti TMF akan dapat membantu guru menyadari kemampuannya, serta mengarahkan peningkatan kemampuannya secara kolektif sehingga dampak yang besar bisa dicapai dan transformasi pendidikan Indonesia segera terwujud.

REFERENSI

- [1] Danielson, C. (2007). *Enhancing professional practice: A framework for teaching*. New York, Amerika Serikat: ASCD.
- [2] Hapsari, E. E., Sumantri, M. S., & Astra, I. M. (2019). Strategi guru meningkatkan hasil belajar menggunakan pendekatan saintifik di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, (Query date: 2020-08-14 14:24:03). <http://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/171>
- [3] Indriani, N., Aisyah, A. N., & Elok, F. N. (2021). Pembelajaran satu arah menyebabkan pembelajaran Matematika tidak bermakna. *Jurnal Amal Pendidikan*, 2(3), 196–202.
- [4] Mahfudz, M. S. (2023). Pembelajaran Berdiferensiasi dan Penerapannya. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 533–543.
- [5] Mash, B., & Edwards, J. (2020). Creating a learning environment in your practice or facility. *South African Family Practice : Official Journal of the South African Academy of Family Practice/Primary Care*, 62(1), e1–e5. <https://doi.org/10.4102/safp.v62i1.5166>.

- [6] Morine-Dersheimer, G., & Kent, T. (1999). The complex nature and sources of teachers' pedagogical knowledge. In J. Gess-Newsome & N. G. Lederman (Eds.), *Examining Pedagogical Content Knowledge* (pp. 21–50). Dordrecht, Belanda: Springer Netherlands.
- [7] Nurdyansyah, N., & Fitriyani, T. (2018). Pengaruh strategi pembelajaran aktif terhadap hasil belajar pada Madrasah Ibtidaiyah.
- [8] Shulman, H. C., Dixon, G. N., Bullock, O. M., & Colón Amill, D. (2020). The effects of jargon on processing fluency, self-perceptions, and scientific engagement. *Journal of Language and Social Psychology*, 39(5–6), 579–597.
- [9] Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. *Harvard Educational Review*, 57(1), 1–23.

Keterlibatan Siswa dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Sekolah: Studi Kasus Sekolah Lukman Al-Hakim, Mataram

Eka Hermansyah

Universitas Islam Internasional Indonesia, Indonesia

(E-mail: eka.hermansyah@uiii.ac.id)

Kata kunci: pembuatan kebijakan sekolah; siswa; partisipasi; pemenuhan hak anak; model partisipasi Lundy

EXTENDED ABSTRACT

Indonesia sedang melakukan transformasi penting dalam sektor pendidikan, di mana pendapat anak menjadi aspek kritis yang perlu dipertimbangkan dalam mewujudkan transformasi yang tepat sasaran. Mimpi besar dari transformasi ini salah satunya adalah untuk memaksimalkan manfaat dari bonus demografi dan mencegah *bottleneck effect* yang Indonesia dapatkan pada 2045 (Mishra, 2007). Proses ini sangat fundamental, karena sering kali anak diabaikan dalam pertimbangan orang dewasa tanpa memperhatikan pendapat mereka (Mayall, 2000). Sering kali anak dianggap sebelah mata sebagai individu yang tidak mampu menyampaikan pendapat dan tidak mampu berpikir secara matang. Melihat dari sudut pandang sosiologi anak, paradigma ini menempatkan masa kanak-kanak sebagai perhatian fundamental bagi para profesional, dengan menekankan inklusinya dalam perumusan kebijakan dan praktik (Graham, 2011). Pentingnya melibatkan anak-anak dalam eksplorasi ide, menangkap sudut pandang mereka, dan memberdayakan mereka menjadi agen perubahan yang fokus pada perubahan yang berpusat pada mereka (Scorza dkk., 2017).

Melihat keterlibatan atau partisipasi anak dalam pengambilan keputusan, *framework* inklusi yang menjadi acuan adalah model partisipasi milik Lundy (2007). Model partisipasi Lundy (2007) terdiri dari empat elemen utama, yaitu ruang, suara, audiens, dan pengaruh, yang berfungsi sebagai indikator partisipasi. Salah satu elemen penting adalah memberikan akses kepada anak-anak dalam lingkungan yang inklusif dan aman, sehingga anak-anak dapat dengan bebas menyampaikan pandangan mereka, yang direpresentasikan dalam elemen ruang (Gordon, 2014; UNICEF, 2018). Selanjutnya, elemen suara menekankan perlunya memfasilitasi anak-anak dalam mengungkapkan pendapat mereka, memastikan bahwa suara mereka didengar dan dihormati (Solin & Ruwaida, 2022). Ada kesalahpahaman umum bahwa audiens menganggap orang dewasa sudah mendengar apa yang diinginkan oleh anak-anak, padahal kenyataannya sering kali hanya mencerminkan apa yang diinginkan oleh orang dewasa. Elemen audiens menekankan pentingnya mendengarkan dengan aktif pandangan anak-anak, mengakui perspektif mereka, dan menghargai kontribusi mereka (McTavish dkk., 2012). Terakhir, elemen pengaruh menekankan kebutuhan untuk mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan pandangan anak-anak, menggabungkan masukan mereka, dan memberi mereka pengaruh yang nyata pada keputusan dan hasil (Nupur, 2018). Elemen-elemen ini secara kolektif membentuk kerangka kerja komprehensif yang mengakui hak dan agensi anak dalam proses partisipatif. Kerangka kerja partisipasi Lundy memberikan

pendekatan komprehensif dan holistik untuk menilai efektivitas dan inklusivitas proses partisipasi, mempromosikan keterlibatan dan pemberdayaan yang bermakna bagi individu.

Dalam mengeksplorasi keterlibatan anak di sekolah, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Sekolah Dasar Lukman Al-Hakim, Kota Mataram. Kepala sekolah, guru, dan orang tua diwawancara mengenai persepsi mereka tentang partisipasi siswa dan juga implementasi pelibatan siswa dalam pengambilan keputusan atau kebijakan di sekolah.

Hasil wawancara menunjukkan adanya pemahaman yang keliru oleh orang tua dan kepala sekolah mengenai apa yang dimaksud dengan partisipasi siswa di sekolah. Kepala sekolah melihat bahwa partisipasi siswa dapat dilakukan dengan melibatkan orang tua yang dianggap sebagai wali dari siswa. Selain itu, orang tua juga memiliki pandangan yang tidak jauh beda di mana orang tua merasa bahwa keputusan terkait anak di sekolah dapat diwakili oleh orang tua. Namun, ketika melihat skala yang lebih kecil, yaitu pada konteks kelas, guru melibatkan anak-anak jika terdapat informasi dan memberikan ruang serta mendengarkan pendapat siswa. Dengan merujuk pada model partisipasi Hart (1992), terlihat bahwa tingkat pemahaman orang tua dan kepala sekolah terkait partisipasi cenderung kurang bermakna, sementara guru sudah mulai menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih baik. Dalam pelaksanaan partisipasi di tingkat sekolah dilaksanakan sebagai upaya pengambilan keputusan yang tepat sasaran dan menjadi sarana refleksi dan evaluasi program sekolah dalam akreditasi. Akan tetapi, miskonsepsi kepala sekolah terkait konsep partisipasi berdampak pada program yang dibuat sekolah dengan melibatkan orang tua sebagai bentuk partisipasi siswa melalui forum kelas. Siswa diberi kesempatan menjadi relawan dalam program-program yang telah disediakan oleh sekolah berdasarkan forum kelas, namun sayangnya siswa hanya dilibatkan dalam tahap pelaksanaan, sedangkan pada tahap perencanaan siswa tidak dilibatkan (Setiawan, 2013).

Dalam mengevaluasi hasil temuan berdasarkan penerapan pemenuhan hak partisipasi, dapat disimpulkan bahwa komponen awal dari model tersebut, yaitu lingkungan, telah dipenuhi di lingkungan sekolah karena upaya mereka untuk memastikan adanya ruang ekspresi yang bebas diskriminasi. Sekolah berhasil menciptakan suasana yang aman dan inklusif bagi siswa dan orang tua mereka untuk secara terbuka menyampaikan pandangan dan pendapat tanpa memandang latar belakang (Lundy, 2007; Mangiaracina dkk., 2021). Dalam aspek suara, sekolah telah mendorong siswa dan orang tua untuk menyampaikan pandangan dan keprihatinan mereka, dan komunikasi antara guru dan sesama orang tua telah ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa baik anak-anak maupun orang tua diberi kesempatan yang setara untuk berbagi pandangan dan keprihatinan mereka. Sekolah tidak hanya menyediakan ruang untuk ekspresi dan memfasilitasinya, melainkan juga secara aktif mendengarkan serta mempertimbangkan pemikiran dan keprihatinan anak-anak dan orang tua, yang berkaitan dengan unsur pendengar dalam model partisipasi (Harris & Manatakis, 2013; Lundy, 2007). Kriteria pendengar terpenuhi dalam konteks sekolah karena institusi ini memiliki struktur hierarkis yang digunakan untuk menangani masalah, dimulai dari guru kelas, dilanjutkan oleh administrasi, dan jika diperlukan, melibatkan yayasan atau badan pengelola sekolah. Sedangkan pada aspek pengaruh, keputusan siswa sering kali tidak dipertimbangkan bahkan terhalang kepentingan yayasan.

Sebagai rekomendasi, pemahaman dan miskonsepsi mengenai hak partisipasi anak perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa anak-anak diakui sebagai peserta aktif dalam proses pengambilan keputusan.

REFERENSI

- [1] Gordon, K. A. (2014). *Early childhood education: Becoming a professional*. Los Angeles: SAGE.
- [2] Graham, M. (2011). Changing paradigms and conditions of childhood: Implications for the social professions and social work. *British Journal of Social Work*, 41(8), 1532–1547. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcr033>.
- [3] Harris, P., & Manatakis, H. (2013). *Children's voices: A principled framework for children and young people's participation as valued citizens and learners*. Adelaide: Department for Education and Child Development and the University of South Australia.
- [4] Hart, R. A. (1992). *Children's participation from tokenism to citizenship*. Florence: UNICEF.
- [5] Lundy, L. (2007). 'Voice' is not enough: Conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. *British Educational Research Journal*, 33(6), 927–942. <https://doi.org/10.1080/01411920701657033>.
- [6] Mangiaracina, A., Kefallinou, A., Kyriazopoulou, M., & Watkins, A. (2021). Learners' voices in inclusive education policy debates. *Education Sciences*, 11(10), 599. <https://doi.org/10.3390/educsci11100599>.
- [7] Mayall. (2000). The sociology of childhood in relation to children's rights. *The International Journal of Children's Rights*, 8(3), 243–259. <https://doi.org/10.1163/15718180020494640>.
- [8] McTavish, M., Streelasky, J., & Coles, L. (2012). Listening to children's voices: Children as participants in research. *International Journal of Early Childhood*, 44(3), 249–267. <https://doi.org/10.1007/s13158-012-0068-8>.
- [9] Mishra, V. K. (2007). Social infrastructure: A key factor in harnessing demographic dividend. *The ICFAI Journal of Infrastructure*, 45–57.
- [10] Nupur, S. S. (2018, November 20). *Child forum: A platform where children feel courageously empowered*. Diambil 17 Juni 2023, <https://www.wvi.org/child-participation/article/child-forum-platform-where-children-feel-courageously-empowered>.
- [11] Scorza, D., Bertrand, M., Bautista, M. A., Morrell, E., & Matthews, C. (2017). The dual pedagogy of YPAR: Teaching students and students as teachers. *Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies*, 39(2), 139–160. <https://doi.org/10.1080/10714413.2017.1296279>.
- [12] Setiawan. (2013). *Tingkat partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga di sekolah dasar se-gugus Gili Kelir Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga* (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta). Universitas Negeri Yogyakarta. <http://eprints.uny.ac.id/14436/1/34.%20Setiawan.pdf>.
- [13] Solin, R., & Ruwaida, I. (2022). Reflection on the implementation of children's participation rights (Based on Lundy's Participation Model). *Journal of Strategic and Global Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/jsgs.v5i1.1088>.
- [14] UNICEF. (2018). *Children's participation in the work of NHRIs*. UNICEF.



FELT
2023

FORUM ON EDUCATION
LEARNING TRANSFORMATION
INDONESIA

EXTENDED ABSTRACT

FORUM ON EDUCATION AND
LEARNING TRANSFORMATION

7-28 November 2023 | Sheraton Grand

<http://www.pendidikan.go.id>

oud

article33.id/id/id





PASCASEKOLAH

Efektivitas Program BOLD oleh Komunitas Kepemudaan Bidang Pendidikan dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Studi Lanjut

**Fauzia Dwi Sasmita^{*1}, Rafa'na Rahman², Muhammad Azidan³,
Anisha Yasmintya⁴, Wawan Prasetyo⁵**

¹ Universitas Negeri Malang, Indonesia
(E-mail: fauziadwill@gmail.com)

² Institut Teknologi Bandung, Indonesia
(E-mail: rafarahmann@gmail.com)

³ Universitas Islam Negeri Antasari, Indonesia
(E-mail: muhammadazidanr08@gmail.com)

⁴ Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia
(E-mail: anyasmintya@gmail.com)

⁵ Yayasan Hasnur Centre, Indonesia
(E-mail: wawan@hasnurcentre.org)

Kata kunci: efektivitas program; BOLD; build your own dreams; minat studi lanjut; perguruan tinggi

EXTENDED ABSTRACT

PENDAHULUAN

Hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengenai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2022 menunjukkan bahwa salah satu fokus permasalahan IPP di Kalsel adalah Indikator Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) (Arief, 2021). Berdasarkan hasil studi awal peneliti, rendahnya angka partisipasi studi lanjut ke perguruan tinggi, terutama di daerah 3T di Provinsi Kalsel disebabkan oleh 4 faktor utama, yakni (a) ekonomi; (b) rendahnya cakupan instansi perguruan tinggi yang seyogyanya berperan untuk mensosialisasikan kebutuhan studi lanjut; (c) minimnya peran pemuda daerah yang berkesempatan untuk studi lanjut namun tidak membagikan pengalaman yang telah didapatkan selama belajar di PT kepada adik tingkat di sekolahnya; dan (d) terbatasnya informasi tentang peluang dan kesempatan beasiswa yang ditawarkan oleh kampus negeri maupun kampus swasta di Provinsi Kalsel. Beberapa penelitian serupa juga menunjukkan bahwa faktor penyebab kurangnya minat peserta didik terhadap pendidikan perguruan tinggi ialah sikap apatis (Hermambang dkk., 2021), tidak adanya motivasi atau dorongan dari lingkungan (Abdullah & Gani, 2022; Rista & Marlina, 2022), kendala ekonomi atau finansial (Indriyanti & Ivada, 2013), dan lebih memilih bekerja untuk membantu keberlangsungan ekonomi keluarga (Lestari dkk., 2020).

TUJUAN

Salah satu upaya yang diusulkan untuk menghadapi tantangan mengenai rendahnya minat partisipasi studi lanjut ke perguruan tinggi ialah melalui program kunjungan langsung (sosialisasi) yang diawasi dan dievaluasi secara berkala, serta diberikan pendampingan dan bimbingan khusus. Program **BOLD** merupakan akronim dari *Build Your Own Dream* yang diinisiasi oleh komunitas kepemudaan dari Kota Banjarmasin dalam rangka memberikan informasi dan pendampingan melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi melalui program KIP Kuliah bagi peserta didik tingkat SMA/ sederajat di daerah 3T di Provinsi Kalsel. KIP kuliah dapat menjadi salah satu solusi bagi peserta didik SMA/ sederajat yang mempunyai kendala ekonomi untuk melanjutkan studi ke tingkat perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas program **BOLD** sebagai upaya menyebarluaskan informasi mengenai KIP kuliah dan pendampingan terkait pendidikan perguruan tinggi.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang dilakukan pada bulan Februari hingga Mei tahun 2023 di MAN 2 Batola, Barito Kuala, Kabupaten Marabahan, Provinsi Kalimantan Selatan. Subjek pada penelitian ini adalah 58 orang peserta didik kelas XII. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data dari angket respons dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase minat studi ke perguruan tinggi. Adapun untuk aspek penilaian efektivitas, program **BOLD** diukur melalui uji N-Gain dengan menghitung selisih antara skor post-survey dan skor pre-survey untuk kemudian dibandingkan dengan kriteria efektivitas.

Tabel 1 Perbandingan Minat Studi Sebelum dan Sesudah Sosialisasi

Aktivitas	Minat Studi Lanjut (%)	Minat Studi Rata-rata	Efektivitas N-Gain	Kategori N-Gain
Sebelum Sosialisasi	50,00	56,33	0,73	Tinggi
Setelah Sosialisasi	75,00	88,33		

Tabel 2 Respons terhadap Pemahaman Program **BOLD**

Aktivitas	Pemahaman tentang Perkuliahan (%)	Pemahaman tentang Program KIP Kuliah (%)
Sebelum Sosialisasi	50,00	39,66
Setelah Sosialisasi	89,66	93,10

Tabel 3 KPI (*Key Performance Indicator*) Program BOLD

Key Performance Indicator (KPI)	Tercapai/Tidak Tercapai
Terlibatnya minimal 2 orang volunteer lapangan	Tercapai 50,00%
Terlibatnya minimal 2 orang volunteer pengajar; bahasa Inggris dan Matematika	Tercapai 100,00%
Meningkatnya partisipasi studi lanjut (kuliah) sebesar 25% setelah dilaksanakan kunjungan/ sosialisasi berdasarkan hasil angket respons	Tercapai 100,00%
20% dari total seluruh partisipan kegiatan program mengikuti kelas persiapan masuk PT	Tercapai 25,00%
Jumlah kehadiran aktif peserta di poin sebelumnya pada program mentoring belajar persiapan masuk PT minimal 50%	Tercapai 71,42%
50% dari total seluruh partisipan yang mengikuti kelas persiapan masuk PT, lolos perguruan tinggi dengan skema beasiswa	Tercapai 42,86%

Tabel 1 menunjukkan peningkatan minat studi peserta didik setelah diadakan sosialisasi dengan derajat efektivitas program sebesar 0,73 (berkategori tinggi). Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program yang ditinjau dari respons peserta didik dinilai positif dan memberikan manfaat untuk menstimulasi serta membangun motivasi peserta didik agar melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Adapun Tabel 2 menunjukkan bahwa melalui pelaksanaan program **BOLD**, peserta didik telah memperoleh pemahaman dan informasi mengenai jurusan dan program studi yang ditawarkan serta peluang beasiswa bagi pemegang kartu KIP kuliah. Sementara itu, Tabel 3 menunjukkan persentase akhir dari program **BOLD** berdasarkan indikator-indikator ketercapaian program.

Implementasi program **BOLD** di MAN 2 Batola dianggap sangat sesuai, mengingat sekolah ini terletak di Kabupaten Barito Kuala yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia sebesar 67,37 dan merupakan salah satu dari dua wilayah dengan capaian terendah di Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Badan Pusat Statistik, 2022). Menurut penuturan kepala sekolah, MAN 2 Batola sangat jarang menerima kunjungan terkait program pendidikan tinggi dan beasiswa, sehingga program BOLD dirasa sangat tepat dilaksanakan di sekolah tersebut. Melalui program ini, diharapkan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) dapat meningkat sebagai faktor pendukung Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Barito Kuala.

Jadwal pelaksanaan program **BOLD** dari Februari hingga Mei juga dinilai tepat, mengingat bahwa pendaftaran untuk program KIP kuliah dan pendaftaran masuk perguruan tinggi melalui jalur tes (SNBT) yang diselenggarakan oleh Pemerintah mulai dibuka dari bulan Maret hingga April tahun 2023. Hal ini memastikan bahwa program **BOLD** berjalan sejalan dengan periode pendaftaran KIP kuliah dan periode pendaftaran kampus, sehingga memberikan kesempatan yang ideal bagi para peserta untuk mendapatkan informasi dan bantuan terkait pendidikan tinggi serta program KIP kuliah.

Meskipun ketercapaian program dan efektivitas yang diperoleh sebesar 0,73 (berkategori tinggi), pelaksanaan program **BOLD** juga menghadapi beberapa kendala, seperti:

- a. Ketidaksesuaian NIK di kartu KIP kuliah yang terdaftar, sehingga peserta didik membutuhkan waktu tambahan untuk mengurus perbedaan nomor tersebut.
- b. Orang tua dan peserta didik banyak yang tidak memiliki m-banking atau metode pembayaran lain yang lebih ringkas. Hal tersebut mengakibatkan proses pembayaran SNBT peserta didik menjadi terhambat, namun dapat diantisipasi oleh bantuan fasilitator.
- c. Banyak peserta didik yang mengeluhkan pemberkasan terkait slip gaji orang tua, sementara pihak kelurahan setempat tidak memberikan nominal gaji yang pas (tepat), hanya memberikan kisaran rentang saja.

Ke depannya, kendala tersebut diharapkan dapat diantisipasi dengan memastikan kesesuaian nomor KIP Kuliah di Dapodik sekolah, setidaknya tiga bulan sebelum pembukaan pendaftaran KIP kuliah dimulai. Begitu pula dengan pemberkasan slip gaji orang tua, hendaknya dimintakan secara langsung kepada pihak kelurahan untuk menuliskan nominal gaji sesuai dengan nominal pendapatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa program **BOLD** dapat meningkatkan minat peserta didik untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi dengan efektivitas program sebesar 0,73 (berkategori tinggi). Skema kegiatan program **BOLD** meliputi tahapan sosialisasi, mentoring, dan tutoring yang disusun secara terpadu dan sistematis disertai dengan pendampingan yang efektif dari alumni dan pihak-pihak yang terlibat langsung, baik terkait dengan jurusan pendidikan tinggi maupun dengan program beasiswa KIP kuliah.

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki peranan paling sentral untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini dan mulai memastikan pelaksanaan program **BOLD** atau program yang serupa pada tahun mendatang secara intensif. Konsep kolaborasi dengan melibatkan mahasiswa dan komunitas kepemudaan bidang pendidikan sebagai pihak fasilitator lapangan, maupun LLDIKTI Wilayah XI sebagai pihak narasumber utama program KIP kuliah, serta hadirnya peranan media massa diharapkan mampu memastikan ketercapaian program yang lebih efektif dan berkelanjutan sehingga dapat berkontribusi pada capaian Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Barito Kuala.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, rekomendasi paling utama ditujukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dengan beberapa opsi jangka pendek, yakni:

- a. Menambahkan program BOLD atau program serupa pada Rencana Kerja Pemerintah, dimulai pada Periode 2024 dengan pengawasan yang baik dan terukur sehingga lebih banyak daerah, khususnya daerah 3T di Provinsi Kalimantan Selatan yang mendapat kebermanfaatan dan meningkatkan indeks APK PT.
- b. Menyusun anggaran dan deskripsi kegiatan demi terlaksananya program serupa pada awal tahun mendatang dengan tidak hanya berfokus pada satu sekolah saja sehingga dapat ditentukan sasaran penerima manfaat.
- c. Membuka pintu kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya para komunitas kepemudaan bidang pendidikan yang dapat menjadi fasilitator/pendamping.

REFERENSI

- [1] Abdullah, I., & Gani, M. I. A. (2022). Analisis Faktor Penyebab Kurangnya Minat Remaja Terhadap Pendidikan Perguruan Tinggi. *Jayapangus Press Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(2), 128–137.
- [2] Arief, A. R. (2021). *Balitbangda Kalsel gelar seminar hasil kajian indeks pembangunan pemuda*. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Selatan. Retrieved June 5, 2023 from <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2021/09/24/balitbangda-kalsel-gelar-seminar-hasil-kajian-indeks-pembangunan-pemuda/>.
- [3] Badan Pusat Statistik. (2022). *Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) menurut provinsi 2020–2022*. Badan Pusat Statistik. Retrieved June 5, 2023 from <https://www.bps.go.id/indicator/28/1443/1/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt-menurut-provinsi.html>.
- [4] Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E. S., Sanusi, F., Ulfa, W. M., & Nooraeni, R. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 1–12. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>.
- [5] Indriyanti, N., & Ivada, E. (2013). Faktor-faktor yang memengaruhi minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada siswa kelas XII Akuntansi SMK Negeri 6 Surakarta 2013. *Jurnal Pendidikan Ekonomi UNS*, 1(2), 1–10.
- [6] Lestari, M., Zakso, A., & Hidayah, R. Al. (2020). Faktor-faktor penyebab rendahnya minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (Kasus pada remaja di Desa Sepadu). *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 9(7), 1–8. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/41380>.
- [7] Rista, N. R. N., & Marlina, N. (2022). Pengaruh Motivasi Belajar dan Lingkungan Teman Sebaya Terhadap Minat Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi Siswa Kelas XII BDP SMK Negeri di Surabaya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 10330–10341.

Pandemi dan Aspirasi Profesional: Pengaruh Demografi terhadap Pilihan Karier Siswa Sekolah Menengah Atas

Rahmi*¹, Intan Dahayu Prastutiningtyas², Muhammad Fadhil Sulaiman³, Regan Changa⁴, Aditia⁵, Shagiva Quinella Devanadia Putri⁶

¹ Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
(E-mail: rahmi.ami@ui.ac.id*)

Kata kunci: profesi impian; siswa sekolah menengah; perspektif pekerjaan; pandemi

EXTENDED ABSTRACT

Penelitian ini menggali aspirasi profesional siswa sekolah menengah atas Indonesia yang lahir antara tahun 2001–2005, dengan fokus khusus pada dampak pandemi terhadap aspirasi tersebut. Sementara generasi sebelumnya umumnya mengarah pada karier seperti kedokteran, penerbangan, atau arsitektur, terlihat pergeseran ke bidang-bidang yang berkaitan dengan teknologi informasi seperti pengembangan *game*, pembuatan aplikasi, dan desain situs web di kalangan siswa saat ini. Penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana pandemi telah memengaruhi impian karier ini, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk demografi, dampak teknologi, dan sumber informasi. Studi ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci tentang distribusi demografi, sifat dari impian profesional, pengaruh pandemi terhadap aspirasi tersebut, dan peran demografi dalam membentuk mimpi-mimpi ini. Unik dalam pendekatannya, penelitian ini membandingkan periode sebelum pandemi dan selama pandemi untuk memahami bagaimana peristiwa global dapat membentuk jalur karier. Temuan-temuan ini penting bagi lembaga pendidikan, pembuat kebijakan, dan pemberi kerja, menawarkan wawasan untuk pengembangan kurikulum, pembuatan kebijakan, dan pemahaman tentang ekspektasi tenaga kerja masa depan.

Tinjauan literatur penelitian mengeksplorasi struktur sekolah menengah atas di Indonesia, profesi impian, pengaruh orang tua, faktor budaya, dan sumber informasi dalam membentuk aspirasi karier siswa. Penelitian ini juga menyoroti fokus kurikulum yang berbeda dari sekolah SMA, SMK, dan MA di Indonesia. Perubahan historis dan sosial telah signifikan memengaruhi aspirasi karier, dengan pergeseran mencolok menuju profesi zaman baru di era saat ini, yang didorong oleh kemajuan teknologi. Status sosial ekonomi orang tua dan pencapaian pendidikan merupakan faktor kritis dalam membentuk aspirasi karier anak-anak. Anak-anak dari latar belakang yang kurang mampu sering kali berjuang dengan keterbatasan peluang pendidikan, yang memengaruhi tujuan karier mereka. Elemen budaya seperti tradisi bercerita dan interaksi dinamis antara usia dan jenis kelamin juga memainkan peran penting dalam evolusi mimpi profesional. Layanan informasi telah muncul sebagai kunci dalam membimbing siswa melalui pilihan karier mereka, menyediakan wawasan ke berbagai bidang dan tren pasar. Studi ini mengadopsi pendekatan analitis deskriptif dan inferensial, mengumpulkan data dari 430 siswa sekolah menengah atas lintas SMA, SMK, dan MA melalui kuesioner via Google Forms. Analisis menggunakan uji t sampel berpasangan,

uji kebebasan chi-square, dan Cohen's d untuk penentuan ukuran efek, dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics. Kerangka Klasifikasi Standar Internasional Pekerjaan dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) (ISCO-08) digunakan untuk klasifikasi kategori pekerjaan. Penelitian ini berfokus pada korelasi antara karakteristik demografis siswa dengan aspirasi profesional mereka selama kondisi normal dan pandemi.

Analisis dilakukan menyeluruh mengenai bagaimana karakteristik demografis dan pandemi COVID-19 memengaruhi aspirasi profesional siswa sekolah menengah atas Indonesia. Data yang dikumpulkan dari 430 responden mengungkapkan beberapa temuan kunci:

1. Perubahan dalam Aspirasi Karier: 21,4% responden melaporkan perubahan dalam aspirasi profesional mereka akibat pandemi. Perubahan ini menekankan dampak pandemi terhadap pilihan karier individu muda, menunjukkan pergeseran dari jalur karier tradisional menuju bidang yang dirasakan lebih tahan banting atau relevan dalam konteks gejolak global.
2. Asosiasi dengan Faktor Demografis: Studi ini mengungkapkan asosiasi yang substansial antara profesi impian siswa dan berbagai faktor demografis. Ini termasuk gender, usia, jenis pendidikan sekolah menengah atas (SMA, SMK, MA), jurusan akademik, dan tingkat pendapatan penghasil utama keluarga. Sebagai contoh, terdapat perbedaan yang mencolok dalam aspirasi karier berdasarkan gender, dengan beberapa profesi tampak lebih disukai oleh satu gender.



(a) Pekerjaan Orang Tua



(b) Profesi Impian Siswa Sekolah Menengah

Gambar 1 Distribusi Pekerjaan Orang Tua dan Profesi Impian untuk Siswa Sekolah Menengah/Setara Menggunakan *Word-cloud*

3. Koneksi Moderat: Koneksi moderat diamati antara profesi impian dan faktor-faktor seperti gender, usia, jenis sekolah menengah atas yang dihadiri, jurusan akademik tertentu, dan domisili selama pandemi. Ini menunjukkan bahwa meskipun faktor-faktor ini membentuk aspirasi karier, pengaruh mereka mungkin tidak sekuat faktor lain.
4. Efek Minimal: Studi juga mengidentifikasi efek minimal dalam hubungan antara profesi impian dan faktor-faktor seperti domisili, pekerjaan orang tua, dan pendapatan kepala keluarga. Meskipun faktor-faktor ini

memengaruhi aspirasi karier, pengaruhnya lebih kecil dibandingkan dengan faktor lain seperti latar belakang pendidikan dan gender.

5. Saluran Informasi: Internet menjadi saluran informasi utama bagi siswa yang menjelajahi opsi karier. Pengalaman pribadi, orang tua, tokoh berpengaruh, dan teman sebaya juga memainkan peran penting sebagai sumber informasi. Ini menyoroti pentingnya media digital dan jejaring sosial dalam membentuk aspirasi karier pemuda masa kini.
6. Tabel 1 Uji t sampel berpasangan, uji kebebasan chi-square, dan besarnya pengaruh (Cohen's d) pada faktor demografis dan profesi impian - baik di masa normal maupun pandemi.

Tabel 1 Uji t Sampel Berpasangan, Uji Kebebasan *Chi-Square*, dan Besarnya Pengaruh (Cohen's d) pada Faktor Demografis dan Profesi Impian di Masa Normal maupun Pandemi

	Profesi Impian	Profesi Impian di Masa Pandemi
Jenis Kelamin	$t(430) = 15,243, p < 0,001$	$t(92) = 12,685, p < 0,001$
d	0,74	1,32
chi-square	$\chi^2 (10, 430) = 20.962, p = 0,021$	$\chi^2 (7, 92) = 7.355, p = 0,393$
Usia	$t(430) = 6,155, p < 0,001$	$t(92) = 8,416, p < 0,001$
d	0,30	0,88
chi-square	$\chi^2 (40, 430) = 74.695, p = 0,001$	$\chi^2 (28, 92) = 33.674, p = 0,212$
Jenis sekolah menengah atas	$t(430) = 16,471, p < 0,001$	$t(92) = 12,854, p < 0,001$
d	0,50	1,34
chi-square	$\chi^2 (30, 430) = 43.153, p = 0,057$	$\chi^2 (14, 92) = 12.869, p = 0,537$
Jurusan	$t(430) = 10,334, p < 0,001$	$t(92) = 9,835, p < 0,001$
d	0,50	1,03
chi-square	$\chi^2 (30, 430) = 43.153, p = 0,057$	$\chi^2 (21, 92) = 18.602, p = 0,611$
Domisili	$t(430) = 3,103, p = 0,002$	$t(92) = 6,642, p < 0,001$
d	0,15	0,69
chi-square	$\chi^2 (50, 430) = 59.032, p = 0,179$	$\chi^2 (35, 92) = 26.336, p = 0,854$

	Profesi Impian	Profesi Impian di Masa Pandemi
Pekerjaan Orang tua	$t(430) = -15,184, p < 0,001$	$t(92) = -0,593, p = 0,555$
d	0,73	0,06
chi-square	$\chi^2 (100, 430) = 164.846, p < 0,001$	$\chi^2 (63, 92) = 66.637, p = 0,353$
Penghasilan Kepala Keluarga	$t(430) = 5,994, p < 0,001$	$t(92) = 8,427, p < 0,001$
d	0,29	0,88
chi-square	$\chi^2 (40, 430) = 33.415, p = 0,760$	$\chi^2 (28, 92) = 34.058, p = 0,199$
Pengetahuan terkait Pekerjaan Impian	$t(430) = -16,600, p < 0,001$	$t(92) = -0,303, p = 0,762$
d	0,80	0,03
chi-square	$\chi^2 (90, 430) = 76.378, p = 0,846$	$\chi^2 (56, 92) = 72.661, p = 0,067$

7. Dampak Latar Belakang Sosial-Ekonomi: Latar belakang sosial-ekonomi siswa sangat memengaruhi aspirasi karier mereka. Siswa dari berbagai strata ekonomi menunjukkan preferensi yang bervariasi dalam pilihan karier, yang mungkin disebabkan oleh perbedaan dalam paparan, peluang, dan ekspektasi keluarga.
8. Peran Lembaga Pendidikan: Jenis lembaga pendidikan (SMA, SMK, MA) yang dihadiri siswa juga berdampak signifikan terhadap aspirasi karier mereka. Kurikulum dan fokus dari lembaga-lembaga ini kemungkinan membentuk persepsi siswa tentang jalur karier yang layak dan diinginkan.
9. Kesadaran tentang Profesi Selama Pandemi: Tingkat kesadaran tentang berbagai profesi selama pandemi juga menunjukkan efek yang bervariasi. Dinamika pasar kerja yang berubah selama pandemi mungkin telah memengaruhi pemahaman dan minat siswa dalam berbagai bidang karier.

KESIMPULAN

Penelitian ini menawarkan gambaran komprehensif tentang aspirasi profesional siswa sekolah menengah atas Indonesia, menekankan pada distribusi demografis yang beragam dan pengaruh tren saat ini dan pandemi terhadap pilihan karier. Faktor demografis berdampak signifikan terhadap aspirasi ini, menuntut panduan pendidikan dan karier yang disesuaikan. Studi ini menekankan pentingnya memahami interaksi rumit antara ambisi pribadi, konteks demografis, dan tantangan sosial-lingkungan yang lebih luas seperti pandemi untuk efektif mendukung pemuda dalam pengembangan karier mereka.

REFERENSI

- [1] Baenanda, L. (2019, December 25). Profesi-profesi paling diminati saat ini. Retrieved September 16, 2020, from <https://binus.ac.id/knowledge/2019/12/profesi-profesi-paling-diminati-saat-ini/>.
- [2] Field, A. (2013). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics*. Sage.
- [3] Hanggoro, H. (2019, July 19). Cita-cita favorit anak-anak tiap zaman. Retrieved September 16, 2020, from <https://historia.id/kultur/articles/cita-cita-favorit-anak-anak-tiap-zaman-v5bE9>.
- [4] Hidayati, R. (2015). Layanan Informasi karir membantu peserta didik dalam meningkatkan pemahaman karir. *Jurnal Konseling GUSJIGANG*, 1(1).
- [5] Hirata, A. (2006). *Sang pemimpi* (Vol. 2). Bentang Pustaka.
- [6] Hirschi, A. (2009). Career adaptability development in adolescence: Multiple predictors and effect on sense of power and life satisfaction. *Journal of Vocational Behavior*, 74(2), 145-155.
- [7] International Labour Office. (2012). *International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08): structure, group definitions, and correspondence tables*. International Labour Office.
- [8] Katadata.co.id. (2019, May 2). Berapa jumlah peserta didik Indonesia? Retrieved September 10, 2020, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/02/berapa-jumlah-peserta-didik-indonesia>.
- [9] Kelley, K., & Preacher, K. J. (2012). On effect size. *Psychological methods*, 17(2), 137.
- [10] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017, July 6). Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI & KD) SMK/MAK. Retrieved September 16, 2020, from <http://psmk.kemdikbud.go.id/kikd2017>.
- [11] Kusnadi M, S. H. (2010). *Perbedaan perencanaan karir siswa SMK dan SMU* (Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- [12] Mardiyati, B. D., & Yuniawati, R. (2015). Perbedaan adaptabilitas karir ditinjau dari jenis sekolah (SMA dan SMK). *Empathy*, 3(1), 31-41.
- [13] MommiesDaily. (2018, July 30). Ini dia 4 cita-cita anak muda zaman sekarang. Retrieved September 10, 2020, from <https://mommiesdaily.com/2018/07/30/ini-dia-4-cita-cita-anak-muda-zaman-sekarang/>.
- [14] Nuriani, Nuriani (2018). *Perancangan informasi pengenalan ragam profesi kesehatan pada anak melalui buku ilustrasi*. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia. Retrieved from https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/601/8/UNIKOM_Novi%20Nuriani_12.BAB%20II%20Ragam%20Profesi.pdf.
- [15] Ottovordemgentschenfelde, S. (2014). An experts' dialogue: child safety for the online world. *Media Policy Project*.
- [16] Prayitno, E. A., & Amti, E. (2004). *Dasar-dasar bimbingan dan konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [17] Rahmi, R., Joho, H., & Shirai, T. (2019). An analysis of natural disaster-related information-seeking behavior using temporal stages. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 70(7), 715-728.
- [18] Ray, J. W., & Shadish, W. R. (1996). How interchangeable are different estimators of effect size? *Journal of consulting and clinical psychology*, 64(6), 1316.
- [19] Rohana, R., Saragih, S. Z., & Hasibuan, M. N. (2019). Perbedaan antara kecerdasan dan kesadaran moral siswa SMA sederajat ditinjau dari jenis kelamin dan jenis sekolah. *ANALITIKA*, 11(2), 72-81.

- [20] Smith, L., & Sinclair, K. E. (2005). Empirical evidence for multiple goals: A gender-based, senior high school student perspective. *Australian Journal of Educational & Developmental Psychology*, 5, 55-70.
- [21] Sudarsana, I. K., Lestari, N. G. A. M. Y., Wijaya, I. K. W. B., Krisdayanthi, A., Andayani, K. Y., Trisnadewi, K., ... & Kusumawati, N. A. (2020). *Covid-19: Perspektif pendidikan. Yayasan Kita Menulis*.
- [22] Sumaryadi, A. (2017, January 26). Apa cita-cita anak sekolah zaman sekarang? Retrieved September 10, 2020, from <http://pkbmdaring.kemdikbud.go.id/blog/read/pendidikan/2/apa-cita-cita-anak-sekolah-zaman-sekarang.html>.
- [23] Suyono, A. (2016). Pengaruh latar belakang sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar yang dimediasi oleh fasilitas belajar. *Journal of Accounting and Business Education*, 1(2).
- [24] Tarmizi, T. (2014). The impact of inquiry method usage through arranging concept map for student learning results and response on environment subject in SMA NEGERI 1 Sigli. *Jurnal Biologi Edukasi*, 6(2), 57-63.

Pencapaian Tujuan Kemandirian Pasca-Sekolah Remaja Tunanetra-Ganda: Tantangan Kolaborasi Guru dan Orang Tua pada Masa Transisi

Hasti Trustisari

Universitas Binawan, Jakarta, Indonesia
hastin@binawan.ac.id

Kata kunci: kolaborasi; program transisi; disabilitas ganda; kemandirian; pasca lulus sekolah

EXTENDED ABSTRACT

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama bagi perkembangan setiap individu, tak terkecuali bagi remaja disabilitas ganda (Eriksen dkk., 2021). Pada proses pembelajaran, remaja disabilitas ganda membutuhkan layanan sangat spesifik, sehingga mereka sering kali rentan terabaikan dalam sektor pendidikan, sekalipun pada layanan disabilitas (Alana dkk., 2019). Terbatasnya kesempatan disabilitas ganda untuk bekerja berbayar dan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi membuat mereka makin tersisih dan menghadapi tantangan berat pasca lulus sekolah (Lipscomb dkk., 2017; Petroff dkk., 2019). Sejumlah studi memperkuat gambaran suram kondisi pascalulus yaitu terbatas menjalani kehidupan sosial, terisolasi, kurang dukungan, mengalami kesulitan menjalani masa dewasa, depresi, penurunan kemandirian, kesehatan serta keterampilan hidup (Cmar dkk., 2018; Mazzotti dkk., 2016; Patton & Kim, 2016; Petroff dkk., 2019).

Patton & Kim (2016) menegaskan salah satu hal yang penting dalam pendidikan disabilitas adalah mempersiapkan pascalulus. Persiapan transisi dari sekolah menuju kehidupan rumah pascalulus diyakini menjadi hal yang tersulit bagi banyak penyandang disabilitas muda. Idealnya, perencanaan transisi yang efektif menekankan kolaborasi awal antara guru, keluarga, dan siswa untuk memastikan kemandirian (Romano dkk., 2023). Sekolah dan keluarga memainkan peran penting dalam mendukung pembelajaran secara konsisten (Mazzotti dkk., 2016; Romano dkk., 2023; Wagner, 2012). Kenyataannya, mendorong kolaborasi orang tua dan guru untuk penentuan nasib anak-anak mereka menuju kemandirian pascasekolah masih menjadi tantangan (Cavendish, 2018; Cavendish dkk., 2020). Bahkan, proses perencanaan transisi sering kali dirusak oleh berbagai hambatan dalam proses transisi yang berkontribusi pada rendahnya realisasi hasil pascasekolah (Ball dkk., 2019; Shogren, 2020).

TUJUAN

Kajian ini bertujuan menggali tantangan dan hambatan yang muncul pada kolaborasi guru dan orang tua di masa transisi remaja tunanetra-ganda dari sekolah menuju lulus sekolah dan kembali ke keluarga.

METODOLOGI

Pendekatan kualitatif eksploratif (Creswell, 2012) diterapkan dengan sampel *purposive* berfokus pada guru dan orang tua yang memiliki remaja tunanetra-ganda pada masa transisi menuju lulus sekolah. Informan terdiri dari 5 guru dan 7 orang tua di wilayah perkotaan dan pedesaan. Tahapan penelitian meliputi: **Tahap pertama**, berfokus pada program transisi yang sedang dijalankan; **Tahap kedua**, penggalan data melalui wawancara mendalam untuk menggali hambatan dan tantangan kolaborasi guru dan orang tua dan observasi pada proses pelaksanaan program transisi baik di rumah maupun sekolah; **Tahap ketiga**, analisis data dilakukan dengan *Manual Data Analysis Procedure* yang terdiri dari tahapan 1) transkrip hasil wawancara, 2) pengkodean temuan, 3) pengategorisasian, 4) penetapan tema dan memo (Bungin & Irwanti, 2022).

HASIL

Ringkasan hasil penelitian disajikan pada Tabel 1:

Tabel 1 Gambaran Umum Kondisi Orang Tua dan Remaja Tunanetra Ganda

No	Gambaran Umum			Kondisi Keluarga	
	Gender	Usia	Diagnosa	Lokasi	Ekonomi
1	Laki-laki	19	Tunanetra, tuli, autis	Perkotaan	Menengah ke atas
2	Perempuan	18	Tunanetra, gangguan pendengaran dan motorik	Perkotaan	Menengah
3	Perempuan	19	Tunanetra, autis, gangguan perkembangan mental	Pedesaan	Rendah
4	Perempuan	18	Tunanetra, gangguan motorik, autis	Perkotaan	Rendah
5	Laki-laki	17	Tunanetra, tuli, gangguan perkembangan mental	Perkotaan	Menengah ke atas
6	Laki-laki	19	Tunanetra, tuli, autis	Perkotaan	Menengah ke bawah
7	Laki-laki	16	Tunanetra, autis, gangguan motorik	Pedesaan	Menengah ke bawah

Berdasarkan Tabel 1, letak geografis orang tua tinggal, berpengaruh pada pengasuhan dan pendampingan jangka panjang remaja tunanetra-ganda pascalulus di keluarga. Orang tua di pedesaan cenderung melibatkan keluarga besar untuk mendampingi anak mereka. Sedangkan keluarga di perkotaan memilih untuk mempekerjakan *caregiver* atau menitipkan anak pada lembaga pengasuhan/panti serta kerabat. Sebagian besar orang tua menghadapi kebingungan, tidak siap, dan menyadari beban yang akan muncul akibat berbagai penurunan kondisi anak. Keragaman hambatan membuat orang tua kehilangan harapan atas masa depan anak-anak mereka karena harus memberikan bantuan penuh sepanjang kehidupan anak.

Tabel 2 Tantangan Kolaborasi Guru, Orang Tua, dan Sekolah

No	Tantangan	Penjelasan
1	Lemahnya Kebijakan	Kebijakan sekolah tentang keterlibatan orang tua tidak ditemukan. Lemahnya kebijakan tidak memberikan panduan landasan yang mengikat bagi guru dan orang tua untuk membangun tradisi kolaborasi pada program transisi.
2	Overload Administrasi Guru	Beban tugas administrasi guru yang berat dan menghabiskan waktu, mengakibatkan terbatasnya koordinasi dan komunikasi intens dengan orang tua.
3	Ketidakpahaman Guru dalam Kolaborasi	Guru tidak memiliki keterampilan komunikasi dan mengalami kebingungan untuk memulai kolaborasi dengan orang tua.
4	Rendahnya konsistensi dan komitmen orang tua	Rendahnya komitmen dan konsisten orang tua melaksanakan program sekolah yang telah disepakati untuk dilakukan di rumah.
5	Perbedaan pembelajaran dan orientasi masa depan	Guru menekankan pembelajaran kemandirian secara konsistensi, sedangkan orang tua lebih fleksibel. Orang tua memiliki harapan yang tinggi, atau bahkan tidak memiliki harapan apapun terhadap anak mereka.
6	Masalah domestik	Mendampingi anak di sepanjang waktu di rumah menimbulkan tekanan emosional, konflik pembagian peran, keterbatasan waktu serta biaya.
7	Keterbatasan sistem dukungan dan jejaring	Guru/ sekolah dan orang tua memiliki keterbatasan pengetahuan membangun jejaring dukungan penanganan jangka panjang remaja tunanetra-ganda paska sekolah.
8	Visi sekolah dan kepemimpinan	Keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh visi sekolah dan dukungan pimpinan yang menempatkan orang tua sebagai mitra bukan sebagai objek.

PEMBAHASAN

Keseluruhan konteks penelitian ini memberikan pandangan bahwa kolaborasi guru dan orang tua baik dari pedesaan maupun perkotaan, memunculkan tantangan tersendiri meskipun tidak ada yang signifikan. Salah satu langkah penting untuk membangun kolaborasi dengan sekolah mengkomunikasikan kepada orang tua atas pentingnya menjalankan program kemandirian anak dengan menekankan pada komitmen yang dibangun sejak awal antara anak, orang tua dan guru. Kehidupan pasca-12 tahun wajib belajar yang ditempuh oleh remaja tunanetra-ganda, nyatanya belum dapat memengaruhi paradigma orang tua tentang harapan pascakulak untuk anak-anak mereka. Program

persiapan transisi remaja dari sekolah kembali ke keluarga, masih dimaknai sebagai proses pembelajaran yang menjadi tanggungjawab sekolah dan guru. Perbedaan paradigma, problem domestik serta keterbatasan dukungan yang melingkupi guru dan orang tua membuat kolaborasi ini menjadi tidak mudah diwujudkan. Selain itu, penelitian ini melihat keterlibatan orang tua masih sebatas pada aktivitas kehadiran di sekolah, dan bukan sebagai mitra yang menjalankan komitmen bersama dalam melakukan kegiatan secara konsisten baik di rumah maupun sekolah untuk mendukung tujuan kemandirian remaja tunanetra-ganda pasca sekolah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Keberhasilan kolaborasi dapat dipahami upaya membangun pemahaman bersama antara guru dan orang tua bahwa kunci utama keberhasilan program kemandirian disabilitas ganda adalah komitmen dan konsisten menjalankan program kegiatan baik di sekolah maupun di rumah. Selain diperlukan pemetaan tugas administratif guru, penting juga diadakan pelatihan keterampilan orang tua mendampingi anak mereka pascakuliah sekolah. Ketegasan atas adanya kebijakan sekolah yang menghendaki keterlibatan orang tua perlu dibangun sejak awal ketika orang tua memasukkan anak sekolah agar tercipta kemitraan positif antara sekolah, guru, anak dan orang tua. Peluang penelitian kedepan dapat dikaji tentang implementasi Permendikbud No 30 tahun 2017 tentang pelibatan orang tua di Sekolah Luar Biasa Ganda dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal untuk mendukung pencapaian tujuan akhir pendidikan disabilitas ganda di Indonesia.

REFERENSI

- [1] Alana, R., McVilly, K. R., & Crisp, B. R. (2019). Working with deafblind people to develop a good practice approach. *Journal of Social Work*, 21(1), 69–87. <https://doi.org/10.1177/1468017319860216>.
- [2] Ball, A., Bates, S., Amorose, A., & Anderson-Butcher, D. (2019). The Parent Perceptions of Overall School Experiences Scale: Initial Development and Validation. *Journal of Psychoeducational Assessment*, 37(3), 251–262. <https://doi.org/10.1177/0734282917742310>.
- [3] Bungin, B., & Irwanti, M. (2022). *Qualitative data analysis Manual Data Analysis Procedure (MDAP)* (Pertama). PRENADAMEDIA GROUP.
- [4] Cavendish, W. (2018). Toward Authentic IEPs and Transition Plans: Student, Parent, and Teacher Perspectives. *Learning Disability Quarterly*, 41(1), 32–43. <https://doi.org/10.1177/0731948716684680>.
- [5] Cavendish, Wendy, Connor, D. J., Olander, L., & Hallaran, A. (2020). Preparing for their Future: Perspectives of High School Students with Learning Disabilities about Transition Planning. *Exceptionality*, 28(5), 349–361. <https://doi.org/10.1080/09362835.2019.1625777>.
- [6] Cmar, J. L., McDonnall, M. C., & Markoski, K. M. (2018). In-School Predictors of Postschool Employment for Youth Who Are Deaf-Blind. *Career Development and Transition for Exceptional Individuals*, 41(4), 223–233. <https://doi.org/10.1177/2165143417736057>.
- [7] Creswell, J. (2012). *Educational Research*. Pearson.

- [8] Eriksen, S. H., Grøndahl, R., & Sæbønes, A.-M. (2021). On CRDPs and CRPD: why the rights of people with disabilities are crucial for understanding climate-resilient development pathways. In *The Lancet Planetary Health* (Vol. 5, Issue 12). [https://doi.org/10.1016/s2542-5196\(21\)00233-3](https://doi.org/10.1016/s2542-5196(21)00233-3).
- [9] Lipscomb, S., Thurlow, M., Halmson, J., Y.Liu., A., Burghardt, J., & R.Johnson, D. (2017). *Preparing for life after high school: The characteristics and experiences of youth in special education* (Issue March). <https://ies.ed.gov/ncee/pubs/20184007/>.
- [10] Mazzotti, V. L., Rowe, D. A., Sinclair, J., Poppen, M., Woods, W. E., & Shearer, M. L. (2016). Predictors of post-school success: A systematic review of NLTS2 secondary analyses. *Career Development and Transition for Exceptional Individuals*, 39(4), 196–215. <https://doi.org/10.1177/2165143415588047>.
- [11] Patton, J. R., & Kim, M. K. (2016). The importance of transition planning for special needs students. *Revista Portuguesa de Educação*, 29(1), 9. <https://doi.org/10.21814/rpe.8713>.
- [12] Petroff, Jerry G., Pancsofar, N., & Shaaban, E. (2019). Postschool Outcomes of Youths with Deafblindness in the United States: Building Further Understandings for Future Practice. *Journal of Visual Impairment and Blindness*, 113(3), 274–282. <https://doi.org/10.1177/0145482X19860005>.
- [13] Romano, L. E., Trainor, A. A., & Newman, L. A. (2023). Triad Transition Planning for Students Receiving Special Education and English Learner Services, Families, and Teachers. *Career Development and Transition for Exceptional Individuals*. <https://doi.org/10.1177/21651434221143514>.
- [14] Shogren, K. A. (2020). CEC Division on Career Development and Transition Invested in IEPs. In *Teaching Exceptional Children* (Vol. 52, Issue 5, pp. 281–282). <https://doi.org/10.1177/0040059920915810>.
- [15] Wagner, M. (2012). A National Picture of Parent and Youth Participation in IEP and Transition Planning Meetings. *Journal of Disability Policy Studies*, 23(3), 140–155. <https://doi.org/10.1177/1044207311425384>.

Tentang Penyelenggara



Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) adalah salah satu pusat di bawah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia. PSKP memiliki tugas pokok melaksanakan penyiapan kebijakan standar, penyusunan standar, dan analisis kebijakan pendidikan.



pskp@kemendikbud.go.id



Article 33 Indonesia adalah sebuah lembaga riset kebijakan untuk perubahan sosial yang berbentuk yayasan. Tema utama riset Article 33 Indonesia adalah pembangunan inklusif. Tema ini menyiratkan tentang komitmen Article 33 Indonesia untuk mendorong kebijakan berbasis bukti yang memastikan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam berperan dan menikmati pembangunan.



comms@article33.or.id



ISBN 978-623-504-117-9 (PDF)



9 786235 041179